

Nina Lamatenggo  
Hamzah Baik Uno

# PENDIDIKAN MASA DEPAN BANGSA

Sebuah Pemikiran Tentang Transformasi Pedagogik





**Nina Lamatenggo  
Hamzah Baik Uno**

**PENDIDIKAN MASA DEPAN BANGSA**  
Sebuah Pemikiran Tentang Transformasi Pedagogik

**Yayasan Barcode  
2021**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000;00 (lima milyar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta terkait bagaimana dimaksud pada ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00; (lima ratus juta rupiah).*

**Judul Buku** : PENDIDIKAN MASA DEPAN BANGSA  
Sebuah Pemikiran Tentang Transformasi  
Pedagogik

**ISBN** : (Sementara Proses)

**Penulis** : Nina Lamatenggo  
Hamzah Baik Uno

**Cetakan** : Pertama Oktober 2021

**Ukuran Buku** : 15 x 23 cm

**Layout oleh** : Sulaiman

---

Diterbitkan Oleh

**Penerbit Yayasan Barcode**

Divisi Publikasi dan Penelitian

Jl. Kesatuan 3 No. 9 Kelurahan Maccini Parang

Kecamatan Makassar Kota Makassar

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Wasyukurillah kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penyusunan buku yang berjudul “PENDIDIKAN MASA DEPAN BANGSA Sebuah Pemikiran Tentang Transformasi Pedagogik”, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Penyusun juga berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penyusun pada khususnya. Namun demikian, penyusun menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna. Dengan lapang dada dan kerendahan hati penyusun bersedia untuk diberi saran dan kritik yang bersifat membangun dan dapat memperbaiki buku ini.

Oktober 2022

Penyusun

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar\_iii  
Daftar Isi\_iv

**(DIISI SETELAH DI ACCKAN)**

# BAB I

## LINGKUP KAJIAN

### PENDIDIKAN MASA DEPAN

Pendidik profesional bukan sekedar merupakan pekerja teknis dengan pemikiran mikro semata. Sebagai pendidik profesional, termasuk para guru bersangkut-paut dengan berbagai konsep dan kaidah-kaidah yang harus dipahami dan disikapi secara profesional pula.

Laju perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang menandai abad sekarang, dan lebih-lebih di masa-masa mendatang, menghajatkan para pendidik profesional yang handal, yang dapat merasionalkan tugas dan fungsinya berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, baik dari bidang kajian ilmu yang ditekuni, maupun ilmu-ilmu lain yang bersifat membantu. Dengan demikian, seorang pendidik profesional bukan sekedar tahu bagaimana mengerjakan tugas-tugas dan fungsinya, melainkan secara kritis dituntut untuk menjawab persoalan ke-mengapa-an dari apa yang dilakukan (atau) tidak dilakukan atau mungkin akan dilakukan. <sup>1</sup>

Pendidikan sebagai proses dan gejala, tidak berada dalam kehampaan, bukan mengada dengan sendirinya. Pendidikan bersinggungan dengan manusia sebagai subyek pelaku dan penerima, sebagai yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Memahami pendidikan, oleh karena itu tidak dapat tidak menuntut pemahaman yang memadai tentang manusia dengan berbagai ciri generik dan uniknya. Dalam nirmana (*perspective*) ini, kaidah-kaidah psikologik, kesejarahan, dan politik-legalistik menawarkan cakrawala pandang yang komprehensif tentang ke-mengapa-an pendidikan.

Ke arah pemahaman yang lebih baik mengenai pendidikan tersebut, kehadiran pembelajar yang

memusatkan perhatian pada pendidikan masa depan menjadi suatu keharusan.

### **Tujuan Kajian**

Sajian pendahuluan ini berupaya: (1) memberikan wawasan awal mengenai peristiwa pendidikan dengan pendekatan struktural pendidikan masa depan, (2) mengetengahkan beberapa dasar pemikiran (*basic reasoning*) digunakannya model pendekatan struktural bagi pendidikan masa depan, (3) mengetengahkan konsep dasar pendidikan masa depan, (4) mengetengahkan fungsi yang diemban pendidikan masa depan bagi pengupayaan kebijakan dan peningkatan praktek pendidikan, dan (5) mengetengahkan tata sajian buku dan garis besar isi buku sehingga memudahkan pengkaji di dalam menelaah isu pendidikan masa depan.

### **Materi Kajian**

Pendidikan masa depan pada dasarnya merupakan paparan analisis kritis akan kaidah-kaidah dan kenyataan dasar (*basic fact*) pendidikan. Kaidah-kaidah dan kenyataan dasar dimaksud, merupakan dasar bagi upaya penemuan kebijakan dan praktek kependidikan yang tepat-guna dan bernilai. Secara lebih sederhana, kaidah-kaidah tersebut merupakan dasar bagi pengembangan upaya kependidikan dalam makna luas.

Pemahaman akan pendidikan masa depan akan membantu para calon/pendidik profesional untuk memikirkan persoalan ini (*esentials*) dari tugas dan fungsinya secara lebih jelas.

Berbagai persoalan kritis, misalnya bagaimana mengelola “energi” atau potensi kemampuan partisipan pendidikan untuk menciptakan situasi belajar yang optimal dengan kurikulum yang bersesuaian dengan murid, bagaimana bekerja sama dengan orang tua, pengelola dan lain-lain dalam proses pendidikan secara efektif, memerlukan landasan kaidah-kaidah tertentu. Menghadapi persoalan tersebut, para pendidik dituntut memiliki

penguasaan akan data, informasi dan konsep yang diemban oleh kajian pendidikan masa depan.

Kajian pendidikan masa depan mengetengahkan pandangan yang komprehensif tentang mengapa dan dalam situasi bagaimana peristiwa pendidikan muncul. Melalui kajian pendidikan masa depan, para pendidik memiliki peluang lebih besar untuk merasionalkan atau menalarkan upaya pendidikan yang dilibatinnya.

Kerumitan, dinamika dan saling keterkaitan antar peristiwa pendidikan mengakibatkan sulit berkembangnya pemahaman yang baik. Keberadaan pendidikan masa depan sebagai kajian awal, menawarkan semacam “benang-benang merah” atau “batang peninjau” yang mempersatukan serpihan-serpihan pemahaman menjadi lebih komprehensif.

Betapa sederhana pun, peristiwa pendidikan tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan tunggal. Ini berarti bahwa setepatnya bila digunakan pendekatan terpadu multi disiplin mengenai pendidikan masa depan sebagai pemandu analisis.

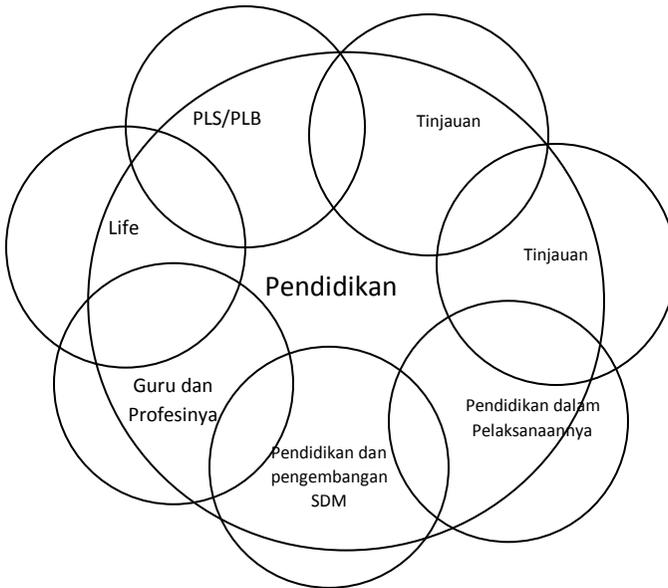
Secara umum, buku pendidikan masa depan menyajikan seperangkat pemahaman tentang : (1) konsep dasar dan fungsi pendidikan masa depan, (2) berbagai sudut pandang kajian akan pendidikan masa depan, yang dipadukan dalam model pendekatan struktural pendidikan masa depan, (3) pendalaman penalaran ke-mengapa-an peristiwa kependidikan, dan (4) perluasan wawasan dalam kerangka telaah praktek pendidikan.

Di depan telah diketengahkan bahwa pendidikan masa depan merupakan paparan kritis akan kaidah-kaidah dan kenyataan dasar kependidikan. Kaidah-kaidah dan kenyataan dasar tersebut pada dasarnya disarikan dari berbagai kajian, yang boleh jadi dihasilkan oleh bidang keilmuan di luar pendidikan .

Ke arah pemahaman yang lebih memadai, diperlukan semacam “benang-benang merah” yang merangkaikan kaidah-kaidah dan kenyataan dasar yang “berserakan”. Untuk maksud ini, model pendekatan

struktural pendidikan masa depan merupakan alternatif yang berpeluang besar. Secara tergambar, model pendekatan struktural pendidikan masa depan dapat disajikan sebagai berikut:

## Model Struktural Pendidikan masa depan



Gambar 1. Model Pendekatan Struktural Pendidikan masa depan

Adaptasi dari buku Frank H. Blacksten dan Robert School Society and The Professional Education, 1968

Berdasarkan model pendekatan struktural pendidikan masa depan tersebut, dikembangkan semacam anatomi pendidikan masa depan. Anatomi pendidikan masa depan ini tidak dimaksudkan untuk memisah-misahkan antar pendidikan masa depan, melainkan untuk memberikan peluang kepada masing-masing aspek agar lebih mudah dikaji dan dikembangkan. Harus selalu diingat bahwa keterpisahan antar pendidikan, tidak mendukung bagi pemahaman yang menyeluruh mengenai pendidikan masa depan. Peristiwa pendidikan harus selalu dipahami dalam keterkaitan, dinamika dan kerumitannya dengan berbagai mantra kehidupan manusia selaku partisipan pendidikan.

Bab-bab berikut dari buku ini, menyajikan materi kajian untuk masing-masing landasan. Sajian ditata sebagai berikut: (1) rasional, yang memaparkan secara kritis dasar pemikiran disajikannya sesuatu sajian/landasan dan kebermaknaannya bagi pendidikan profesional, (2) tujuan sajian, yang merupakan paparan rinci mengenai sasaran yang akan dicapai melalui sajian, (3) materi sajian, yang merupakan uraian, contoh dan kaidah-kaidah dari pendidikan dengan berbagai landasannya, (4) bahan diskusi, yang merupakan umpan bagi pengayaan dan pendalaman lebih lanjut, dan (5) bacaan anjuran, yang merupakan bahan-bahan pustaka yang dianjurkan bagi pengayaan dan pendalaman lebih lanjut serta untuk verifikasi sajian. Tata sajian tersebut secara ajeg digunakan untuk setiap bab dari buku ini.

Sebagai kajian awal, buku ini baru bisa menyajikan beberapa bab yang antara lain: Berisi orientasi konsep dan fungsi pendidikan masa depan. Dalam bab ini juga disajikan tata sajian buku yang diharapkan merupakan pengantar bagi pengkajian bab-bab berikutnya.

Bagian berikut mengetengahkan analisis pendidikan dalam tinjauan filosofis yang dikembangkan sekarang dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, selain itu dikemukakan tentang lembaga keluarga sebagai lembaga pendidikan. Demikian pula pada bagian berikutnya dipaparkan tentang lembaga agama dijadikan sebagai sarana rekonstruksi kebudayaan, masyarakat bangsa.

Di dalam buku ini juga mengupas pandangan sosiologik pendidikan. Dalam bab ini disajikan kajian mengenai kenyataan dasar dan kaidah-kaidah sebagai pendidikan masa depan, yang disarikan dari mantra sosiologik manusia sebagai mahluk sosial. Juga di dalamnya uraian yang mengupas landasan antropologik pendidikan. Dalam bab ini disajikan kajian mengenai kenyataan dasar dan kaidah-kaidah sebagai pendidikan masa depan, yang disarikan dari mantra ekonomik setiap usaha manusia sebagai partisipan pendidikan. Tekanan diberikan pada

pendidikan sebagai upaya disengaja yang menghajatkan efisiensi sumberdaya dan optimalisasi hasil pendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Bab berikutnya berisi teori merencanakan pelaksanaan pendidikan. Bab ini membahas rambu-rambu pendidikan dan pembelajaran masa depan dalam rangka membangun mentalitas bangsa di era otonomi daerah. Pembahasan dimulai dengan mengungkapkan permasalahan, diikuti dengan konteks perubahan, fokus sasaran, kurikulum berbasis kompetensi, dan rambu-rambu sistem pendidikan masa depan meliputi keterkaitan antara ke-bijakan, pelaksanaan dan subtransi pendidikan. Sasaran yang diuraikan disini difokuskan pada peningkatan akses, pemberdayaan dan keberpihakan pada siswa dan guru, serta gagasan-gagasan inovatif dalam bidang pendidikan.

Bab lainnya mengulas pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan. Kajian ini dimulai dengan menjelaskan kondisi kesejahteraan guru, masalah yang dihadapi oleh guru saat ini serta solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula tentang pentingnya peningkatan mutu pendidikan prajabatan calon guru dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional guru dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kependidikan. Selanjutnya diuraikan tentang pola-pola yang dikembangkan pada rekrutmen dan penempatan calon guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah dan mengurangi ketidakmerataan persebaran guru yang parah. Bahkan persoalan tentang pembinaan mutu guru melalui pendidikan dalam jabatan dan pelatihan-pelatihan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sampai kepada persoalan langkah-langkah dalam mengembangkan karier guru dalam upaya membuat guru tampil secara bermutu dan bertanggung jawab pun dijelaskan di dalam bab ini.

Pada bab terakhir dari buku ini dikaji tentang pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). Kajian ini meliputi penjelasan tentang kondisi pendidikan nasional

menghadapi era globalisasi, empat pilar pembelajaran pada era globalisasi, makna keterampilan belajar, peningkatan mutu sumber daya manusia, serta dijelaskan pula arti hakekat life skills.

Masalah pada bab terakhir ini dalam pandangan penulis sangat penting sehingga diletakkan pada bagian akhir buku ini. Dasar pandangannya karena pendidikan adalah pengembangan sumber daya manusia. Tujuan pendidikan sebagai pengembangan sumber daya manusia adalah pengembangan potensi yang ada pada masing-masing individu yang diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup individu itu sebagai perorangan dalam hubungannya dengan hidup bermasyarakat. Setiap hidup bermasyarakat mempunyai tujuannya masing-masing, di dalam suatu lingkungan budaya dan lingkungan hidup tertentu, dan akhirnya yang terikat di dalam suatu kehidupan kemanusiaan.

Selain itu, pendidikan juga berfungsi mengembangkan dan memupuk tanggung jawab dalam setiap warga negara dan juga pendidikan berfungsi sebagai penggerak proses modernisasi dalam pembangunan nasional. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia.

Apalagi jika dicermati ternyata beberapa unsur kebudayaan serta warisan historis dalam sistem pendidikan, kita masih menjadi kendala-kendala dalam pengembangan sumber daya manusia. Namun demikian, usaha-usaha meningkatkan kualitas manusia Indonesia dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Rasa cinta terhadap pekerjaan, sikap kemandirian, perlu ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Olehnya itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat penting. Terlebih lagi tingkat pendidikan angkatan kerja kita masih rendah sehingga produktivitasnya pun rendah. Oleh sebab itu pendidikan nasional dan latihan kerja harus memperoleh prioritas

yang tinggi. Antara sistem pendidikan dengan dunia kerja masih terdapat kesenjangan yang mencolok.

Sistem pendidikan dan latihan kerja perlu diserasikan dengan kesempatan kerja yang terbuka berdasarkan suatu rencana tenaga kerja nasional, disamping pembinaan manusia Indonesia sebagai manusia pembangunan, sebagai aspek pembangunan yang menjadi penggerak bagi pembangunan itu sendiri.

Keseluruhan pendidikan ini hanya dapat dilakukan dengan baik, jika disertai manajemen pendidikan yang sesuai dengan teori-teori manajemen. Itulah sebabnya dalam buku ini disertakan pula masalah manajemen pendidikan yang menjadi dasar pengelolaan pendidikan.

Pendidikan pula tidak bisa jalan dengan baik dan tidak dapat diketahui hasilnya jika tidak dilakukan evaluasi pelaksanaannya. Untuk itu evaluasi pendidikan yang kini banyak dikenal dengan istilah Assesment Pembelajaran merupakan bagian yang dipaparkan dalam buku ini. Untuk itu agar buku ini dapat mengantarkan kepada para pembaca pada komprehensivitas pemahaman pelaksanaan pendidikan, maka Asesment pembelajaran menjadi bagian yang harus dipelajari oleh para pendidik profesional.

Itulah paparan singkat pembahasan dalam buku pendidikan masa depan. Model pendidikan masa depan, ini dengan sengaja memaparkan kerangka pemahaman yang komprehensif mengenai peristiwa pendidikan dan pengajaran serta variabel-variabel yang menentukan. Sajian ini memberikan gambaran kerumitan, dinamika dan keterkaitan berbagai mantra dalam peristiwa pengajaran. Sebagai kajian awal, buku ini masih memiliki peluang besar untuk dikaji dan dikembangkan. Keharusan untuk mengkaji dan mengembangkan buku ini dalam tahap awal sudah dipikirkan.

# **BAB II**

## **PENDIDIKAN DAN TINJAUAN FILOSOFINYA**

### **Pendahuluan**

Terdapat cukup alasan yang baik untuk belajar filsafat, khususnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan rasional yang tidak dapat atau seyogyanya tidak dijawab oleh ilmu atau cabang ilmu-ilmu. Misalnya: apakah yang dimaksud dengan pengetahuan, dan/atau ilmu? Dapatkah kita bergerak ke kiri dan kanan di dalam ruang tetapi tidak terikat oleh waktu? Masalah yang dibahas dalam bagian ini adalah sekitar pendidikan dan ilmu pendidikan. Kiranya kegiatan pendidikan bukanlah sekedar gejala sosial yang bersifat rasional semata mengingat kita mengharapkan pendidikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, lebih-lebih untuk anak-anak kita masing-masing; ilmu pendidikan secara umum tidak begitu maju ketimbang ilmu-ilmu sosial dan biologi tetapi tidak berarti bahwa ilmu pendidikan itu sekedar ilmu atau suatu studi terapan berdasarkan hasil-hasil yang dicapai oleh ilmu-ilmu sosial dan atau ilmu perilaku.

Pertanyaan yang timbul yaitu: apakah teori-teori pendidikan dapat atau telah tumbuh sebagai ilmu ataukah hanya sebagian dari cabang filsafat dalam arti filsafat sosial ataupun filsafat kemanusiaan?

### **Pendidikan Sebagai Kegiatan Ilmu dan Seni**

Masalah pendidikan mikro yang menjadi fokus di sini khususnya ialah dasar dan landasan pendidikan serta landasan ilmu pendidikan yaitu manusia atau sekelompok kecil manusia dalam fenomena pendidikan.

## **1. Pendidikan dalam Praktek Memerlukan Teori**

Alangkah pentingnya kita berteori dalam praktek di lapangan pendidikan karena pendidikan dalam praktek harus dipertanggungjawabkan. Tanpa teori dalam arti seperangkat alasan dan rasional yang konsisten dan saling berhubungan maka tindakan-tindakan dalam pendidikan hanya didasarkan atas alasan-alasan yang kebetulan, seketika dan aji mumpung. Hal itu tidak boleh terjadi karena setiap tindakan pendidikan bertujuan menunaikan nilai yang terbaik bagi peserta didik dan pendidik. Bahkan pengajaran yang baik sebagai bagian dari pendidikan selain memerlukan proses dan alasan rasional serta intelektual juga terjalin oleh alasan yang bersifat moral. Sebabnya ialah karena unsur manusia yang dididik dan memerlukan pendidikan adalah makhluk manusia yang harus menghayati nilai-nilai agar mampu mendalami nilai-nilai dan menata perilaku serta pribadi sesuai dengan harkat nilai-nilai yang dihayati itu.

Kita baru saja menyaksikan pendidikan di Indonesia gagal dalam praktek berskala makro dan mikro yaitu dalam upaya bersama mendalami, mengamalkan dan menghayati Pancasila. Lihatlah bagaimana usaha nasional besar-besaran selama 20 tahun (1978-1998) dalam P-7 (Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) berakhir kita nilai gagal menyatukan bangsa untuk memecahkan masalah nasional suksesi kepresidenan secara damai tahun 1998, setelah krisis multidimensional melanda dan memporakporandakan hukum dan perekonomian negara mulai pertengahan tahun 1997, bahkan sejak 27 Juli 1996 sebelum kampanye Pemilu berdarah tahun 1997. itu adalah contoh pendidikan dalam skala makro yang dalam teorinya tidak pas dengan Pancasila dalam praktek diluar ruang penataran. Mungkin penatar dan petatar dalam teorinya ber-Pancasila tetapi didalam praktek, sebagian besar telah cenderung menerapkan Pancasila Plus atau Pancasila Minus atau kedua-duanya. Itu sebabnya harus kita putuskan bahwa P-7 dan P-4 tidak dapat

dipertanggungjawabkan, setidaknya secara moral dan sosial. Mari kita kembali berprihatin sesuai ucapan Dr. Gunning yang dikutip Langeveld (1955).

“Praktek tanpa teori adalah untuk orang idiot dan gila, sedangkan teori praktek hanya untuk orang-orang jenius”. Ini berarti bahwa sebaiknya pendidikan tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab secara rasional, sosial dan moral. Sebaliknya apabila pendidikan dalam praktek dipaksakan tanpa teori dan alasan yang memadai maka hasilnya adalah bahwa semua pendidik dan peserta didik akan merugi. Kita merugi karena tidak mampu bertanggung jawab atas esensi perbuatan masing-masing dan bersama-sama dalam pengamalan Pancasila. Pancasila yang baik dan memadai, konsisten antara pengamalan (lahiriah) dan penghayatan (psikologis) dan penataan nilai secara internal. Dalam hal ini kita bukan menyaksikan kegiatan (praktek) pendidikan tanpa dasar teorinya tetapi suatu praktek pendidikan nasional tanpa suatu teori yang baik.

## ***2. Landasan Sosial dan Individual Pendidikan***

Pendidikan sebagai gejala sosial dalam kehidupan mempunyai landasan individual, sosial dan cultural. Pada skala mikro pendidikan bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala relatif terbatas seperti antara sesama sahabat, antara seorang guru dengan satu atau sekelompok kecil siswanya, serta dalam keluarga antara suami dan isteri, antara orang tua dan anak serta anak lainnya. Pendidikan dalam skala mikro diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensinya dalam arti perangkat pembawaanya yang baik dengan lengkap. Manusia berkembang sebagai individu menjadi pribadi yang unik yang bukan duplikat pribadi lain. Tidak ada manusia yang diharap mempunyai kepribadian yang sama sekalipun keterampilannya hampir serupa. Dengan adanya individu dan kelompok yang berbeda-beda diharapkan akan mendorong terjadinya perubahan

masyarakat dengan kebudayaannya secara progresif. Pada tingkat dan skala mikro pendidikan merupakan gejala sosial yang mengandalkan interaksi manusia sebagai sesama (subyek) yang masing-masing bernilai setara. Tidak ada perbedaan hakiki dalam nilai orang perorang karena interaksi antar pribadi (interpersonal) itu merupakan perluasan dari interaksi internal dari seseorang dengan dirinya sebagai orang lain, atau antara saya sebagai orang kesatu (yaitu aku) dan saya sebagai orang kedua atau ketiga (yaitu daku atau-ku; harap bandingkan dengan pandangan orang Inggris antara I dan me).

Pada skala makro pendidikan berlangsung dalam ruang lingkup yang besar seperti dalam masyarakat antar desa, antar sekolah, antar kecamatan, antar kota, masyarakat antar suku dan masyarakat antar bangsa. Dalam skala makro masyarakat melaksanakan pendidikan bagi regenerasi sosial yaitu pelimpahan harta budaya dan pelestarian nilai-nilai luhur dari suatu generasi kepada generasi muda dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan adanya pendidikan dalam arti luas dan skala makro maka perubahan sosial dan kestabilan masyarakat berangsur dengan baik dan bersama-sama. Pada skala makro ini pendidikan sebagai gejala sosial sering terwujud dalam bentuk komunikasi terutama komunikasi dua arah. Dilihat dari sisi makro, pendidikan meliputi kesamaan arah dalam pikiran dan perasaan yang berakhir dengan tercapainya kemandirian oleh peserta didik. Maka pendidikan dalam skala makro cenderung dinilai bersifat konservatif dan tradisional karena sering terbatas pada penyampaian bahan ajar kepada peserta didik dan bisa kehilangan ciri interaksi yang afektif.

### **3. Teori Pendidikan Memadu Jalinan Antara Ilmu dan Seni**

Adanya aspek-aspek lahiriah, psikologis dan rohaniah seperti disebut tadi mengisyaratkan bahwa manusia dalam fenomena (situasi) pendidikan adalah paduan antara manusia sebagai fakta dan manusia sebagai nilai. Tiap manusia bernilai tertentu yang bersifat luhur sehingga situasi pendidikan memiliki bobot nilai individual, sosial dan bobot moral. Itu sebabnya pendidikan dalam praktek adalah fakta empiris yang syarat nilai berhubung interaksi manusia dalam pendidikan tidak hanya timbal balik dalam arti komunikasi dua arah melainkan harus lebih tinggi mencapai tingkat manusiawi seperti saya atau siswa mendidik diri sendiri atas dasar hubungan pribadi dengan pribadi (higher order interactions) antar individu dan hubungan intrapersonal secara afektif antara saya (yaitu I) dan diriku (diri sendiri yaitu my self atau the self).

Adapun manusia sebagai fakta empiris tentu meliputi berbagai variabel dan hubungan variabel yang terbatas jumlahnya dalam telaah deskriptif ilmu-ilmu. Sedangkan jumlah variabelnya amat banyak dan hubungan-hubungan antara variabel amat kompleks sifatnya apabila pendidik memelihara kualitas interaksinya dengan peserta didik secara orang perorang (personal).

Seperti dikatakan tentang siswa belajar aktif oleh Phenix (1958:40), yaitu : *"It possible to conceive of teacher and student as one and same person and the self taught person as one who direct his own development through an internal interaction between the self as I and the self as me on the other hand, it is usual for one teacher to teach many students simultaneously. In that even the quality of the interaction may become generalized and impersonal, or it may, by appropriate means, retain its person to person character.*

Artinya sifit manusiawi dari pendidikan (manusia dalam pendidikan) harus terpelihara demi kualitas proses dan hasil pendidikan. Pemeliharaan itulah yang menuntut agar pendidik siap untuk bertindak sewaktu-waktu secara kreatif (berkiat menciptakan situasi yang pas, apabila perlu. Misalnya atas dasar diagnostik klinis) sekalipun tanpa prognosis yang lengkap namun utamanya berdasarkan sikap afektif bersahabat terhadap terdidik. Kreativitas itu didasarkan kecintaan pendidik terhadap tugas mendidik dan mengajar, itu sebabnya gejala atau fenomena pendidikan tidak dapat direduksi sebagai gejala sosial atau gejala komunikasi timbal balik belaka. Apabila ilmu-ilmu sosial atau behavioral mampu menerapkan pendekatan dan metode ilmiah (Pearson, 1900) secara termodifikasi dalam telaah manusia melalui gejala-gejala sosial, apakah ilmu pendidikan harus bertindak serupa untuk mengatasi ketertinggalannya khususnya di tanah air kita?

Atau seperti dikatakan secara ilmiah oleh NL. Gage (1978:20), *“Scientific method can contribute relationships between variables, taken two at a time and even in the form of interactions, three or perhaps four or more at a time. Beyond say four, the usefulness of what science can give the teacher begins to weaken, because teacher cannot apply, at least not without help and not on the run, the more complex interactions. At this point, the teacher as an artist must step in and make clinical, or artistic, judgement about the best ways to teach.”*

Pendidik memang harus bertindak pada latar mikro termasuk dalam kelas atau di sekolah kecil, mempengaruhi peserta didik dan itu diapresiasi oleh telaah pendidikan berskala mikro, yaitu oleh paedagogik (teoritis) dan andragogi (suatu pedagogik praktis). Itu sebabnya ilmu pendidikan harus lebih inklusif daripada pengajaran (yang makro) lebih utama daripada mengajar dan mendidik. Bahkan kegiatan pengajaran disekolah memerlukan perencanaan dalam arti penyusunan persiapan mengajar. Dalam pandangan ilmu pendidikan

yang otonom, ruang lingkup pengajaran tidak dengan sendirinya mencakup kegiatan mendidik dan mengajar.

Atas dasar pokok-pokok pikiran tentang aspek lahiriah, psikologis dan rohaniah dari manusia dalam fenomena pendidikan maka pendidikan dalam praktek haruslah secara lengkap mencakup bimbingan, mendidik, mengajar dan pengajaran. Dalam fenomena yang normal peserta didik dapat didorong agar belajar aktif melalui bimbingan dan mengajar. Tetapi adakalanya dalam situasi kritis siswa perlu meniru cara guru yang aktif belajar sendiri. Itu sebabnya perundang-undangan pendidikan kita sebenarnya perlu diluruskan, pada satu sisi agar upaya mendidik terjadi dalam keluarga secara wajar, disisi lain agar pengajaran disekolah meliputi dimensi mendidik dan mengajar. Lagi pula bahwa diferensiasi dan fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu ditentukan utamanya harus melakukan pengajaran dan mengelola kurikulum formal sebagai aspek spesialisasinya agar beroperasi efisien. Sedangkan konsep pendidikan yang juga mencakup program latihan (UU. No. 2/1989 Pasal 1 butir ke-1) adalah suatu konstruk yang amat luas dilihat dari perspektif sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

Maka konsep pendidikan yang memerlukan ilmu dan seni ialah proses atau upaya sadar antar manusia dengan sesama secara beradab, di mana pihak kesatu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan kepribadian pihak kedua secara manusiawi yaitu orang perorang. Atau bisa diperluas menjadi makro sebagai upaya sadar manusia dimana warga masyarakat yang lebih dewasa dan berbudaya membantu pihak-pihak yang kurang mampu dan kurang dewasa agar bersama-sama mencapai taraf kemampuan dan kedewasaan yang lebih baik (Phenix, 1958:13), Buller, 1968:10). Dalam arti ini juga sekolah laboratorium akan memerlukan jalinan praktek ilmu dan praktek seni. Sebaliknya butir 1 pasal 1, UU No. 2 /1989 kiranya kurang tepat sehingga tentu sulit menuntut siswa ber CBSA padahal guru belum tentu aktif

belajar, mengingat definisi pendidikan yang makro, yaitu: "Pendidikan ialah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang".

Kiranya konsep pendidikan yang demikian kurang mampu memberi isi kepada tujuan dan semangat Bab XIII UUD 1945 yang merujuk bidang pendidikan sebagai amanah untuk mewujudkan keterkaitan erat antara sistem pengajaran nasional dengan kebudayaan kebangsaan. Karena itu dalam lingkup pendidikan menurut skala mikro dan abstrak yang lebih makro, pendidik harus juga peduli dengan aspek etis (moral) dan estetis dari pengalamannya berinteraksi dengan peserta didik selain aspek pengetahuan, kebenaran dan perilaku yang disyaratkan oleh konsep pendidikan menurut undang-undang tadi. Hal ini sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara (1950) sebagai berikut :

"Taman Siswa mengembangkan suatu cara pendidikan yang tersebut di dalam Among dan bersemboyan 'Tut Wuri Handayani' (mengikuti sambil mempengaruhi). Arti Tut Wuri ialah mengikuti, namun maknanya ialah mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa, dan makna Handayani ialah mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, memberi teladan agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi".

Demikian bagi Ki Hajar Dewantara pendidikan pada skala mikro tidak terlepas dari pendidikan dalam arti makro, bahkan disiplin pribadi adalah tujuan dan cara dalam mencapai disiplin yang lebih luas. Ini berarti bahwa landasan pendidikan terdapat dalam pendidikan itu sendiri, yaitu faktor manusianya. Dengan demikian landasan-landasan pendidikan tidak mesti dicari di luar fenomena (gejala) pendidikan termasuk ilmu-ilmu lain dan atau filsafat tertentu dari budaya barat. Oleh karena itu data ilmu pendidikan tidak tergantung dari studi ilmu

psikologi., fisiologi, sosiologi, antropologi ataupun filsafat. Lagi pula konsep pengajaran (yang makro) berdasarkan kurikulum formal tidak dengan sendirinya bersifat inklusif dan atau sama dengan mengajar. Bahkan dalam banyak hal pengajaran itu tergantung hasilnya dari kualitas guru mengajar dalam kelas masing-masing. Sudah barang tentu asas Tut Wuri Handayani tidak akan menjadikan pengajaran identik dengan sekedar upaya sadar menyampaikan bahan ajar dikelas kepada rombongan siswa mengingat guru harus berhamba kepada kepentingan siswanya.

### *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*

Uraian di atas mengisyaratkan terhadap dasar-dasar pendidikan bahwa praktek pendidikan sebagai ilmu yang sekedar rangkaian fakta empiris dan eksperimental akan tidak lengkap dan tidak memadai. Fakta pendidikan sebagai gejala sosial tentu sebatas sosialisasi dan itu sering beraspirasi daya serap kognitif di bawah 100% (bahkan 60%). Sedangkan pendidikan nilai-nilai akan menuntut siswa menyerap dan meresapi penghayatan 100% melampaui tujuan-tujuan sosialisasi, mencapai internalisasi (mikro) dan hendaknya juga enkulturasi (makro). Itulah perbedaan esensial antara pendidikan (yang menjalin aspek kognitif dengan aspek afektif) dan kegiatan mengajar yang paling-paling menjalin aspek kognitif dan psikomotor. Dalam praktek evaluasinya kegiatan pengajaran sering terbatas targetnya pada aspek kognitif. Itu sebabnya diperlukan perbedaan ruang lingkup dalam teori antara pengajaran dengan mengajar dan mendidik.

Adapun ketercapaian untuk daya serap internal mencapai 100% diperlukn tolong menolong antara sesama manusia. Dalam hal ini tidak ada orang yang selalu sempurna melainkan bisa terjadi kemerosotan yang harus diimbangi dengan penyegaran dan kontrol sosial. Itulh segi interdependensi manusia dalam fenomena pendidikan yang memerlukan kontrol sosial apabila

hendak mencegah penurunan pengamalan nilai dan norma dibawah 100%.

### **1. *Pedagogik Sebagai Ilmu Murni Menelaah Fenomena Pendidikan***

Jelaslah bahwa telaah lengkap atas tindakan manusia dalam fenomena pendidikan melampaui kawasan ilmiah dan memerlukan analisis yang mandiri atas data pedagogik (pendidikan anak) dan data andragogi (Pendidikan orang dewasa). Adapun data itu mencakup fakta (*das sein*) dan nilai (*das sollen*) serta jalinan antara keduanya. Data faktual tidak berasal dari ilmu lain tetapi dari objek yang dihadapi (fenomena) yang ditelaah Ilmuwan itu (pedagogi dan andragogi) secara empiris. Begitu pula data nilai (yang *normative*) tidak berasal dari filsafat tertentu melainkan dari pengalaman atas manusia secara hakiki. Itu sebabnya pedagogi dan andragogi memerlukan jalinan antara telaah ilmiah dan telaah filsafat. Tetapi tidak berarti bahwa filsafat menjadi ilmu dasar karena ilmu pendidikan tidak menganut aliran atau suatu filsafat tertentu.

Sebaliknya ilmu pendidikan khususnya pedagogik (teoritis) adalah ilmu yang menyusun teori dan konsep yang praktis serta positif sebab setiap pendidik tidak boleh ragu-ragu atau menyerah kepada keragu-ruguan prinsipil. Hal ini serupa dengan ilmu praktis lainnya yang mikro dan makro. Seperti kedokteran, ekonomi, politik dan hukum. Oleh karena itu pedagogik (dan telaah pendidikan mikro) serta pedagogik praktis dan andragogi (dan telaah pendidikan makro) bukanlah filsafat pendidikan yang terbatas menggunakan atau menerapkan telaah aliran filsafat *normative* yang bersumber dari filsafat tertentu. Yang lebih diperlukan ialah penerapan metode filsafat yang radikal dalam menelaah hakikat peserta didik sebagai manusia seutuhnya.

Implikasinya jelas bahwa batang tubuh (*body of knowledge*) ilmu pendidikan haruslah sekurang-kurangnya secara mikro mencakup :

- Relasi sesama manusia sebagai pendidik dengan terdidik (*person to person relationship*)
- Pentingnya ilmu pendidikan memepergunakan metode fenomenologi secara kualitatif.
- Orang dewasa yang berpran sebagai pendidik (educator)
- Keberadaan anak manusia sebagai terdidik (learner, student)
- Tujaun pendidikan (educational aims and objectives)
- Tindakan dan proses pendidikan (educative process), dan
- Lingkungan dan lembaga pendidikan (educational institution)

Itulah lingkup pendidikan yang mikroskopis sebagai hasil telaah ilmu murni ilmu pendidikan dalam arti pedagogik (teoritis dan sistematis). Mengingat pendidikan juga dilakukan dalam arti luas dan makroskopis di berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal, tentu petugas tenaga pendidik di lapangan memerlukan masukan yang berlaku umum berupa rencana pelajaran atau konsep program kurikulum untuk lembaga yang sejenis. Oleh karena itu selain pedagogik praktis yang menelaah ragam pendidikan diberbagai lingkungan dan lembaga formal, informal dan non-formal (pendidikan luar sekolah dalam arti terbatas, dengan begitu, batang tubuh diatas tadi diperlukk lingkupnnya sehingga meliputi:

- Konteks sosial budaya (socio cultural contexts and education)
- Filsafat pendidikan (preskriptif) dan sejarah pendidikan (deskriptif)
- Teori, pengembangan dan pembinaan kurikulum, serta cabang ilmu pendidikan lainnya yang bersifat preskriptif.
- Berbagai studi empirik tentang fenomena pendidikan

- Berbagai studi pendidikan aplikatif (terapan) khususnya mengenai pengajaran termasuk pengembangan *specific content pedagogy*.

Sedangkan telaah lingkup yang makro dan meso dari pendidikan, merupakan bidang telaah utama yang membedakan antara objek formal dari pedagogik dari ilmu pendidikan lainnya. Karena pedagogik tidak langsung membicarakan perbedaan antara pendidikan informal dalam keluarga dan dalam kelompok kecil lainnya, dengan pendidikan formal (dan non formal) dalam masyarakat dan negara, maka hal itu menjadi tugas dari andragogi dan cabang-cabang lain yang relevan dari ilmu pendidikan. Itu sebabnya dalam pedagogik terdapat pembicaraan tentang factor pendidikan yang meliputi : (a) tujuan hidup, (b) landasan falsafah dan yuridis pendidikan, (c) pengelolaan pendidikan, (d) teori dan pengembangan kurikulum, (e) pengajaran dalam arti pembelajaran (instruction) yaitu pelaksanaan kurikulum dalam arti luas di lembaga formal dan non formal terkait.

## **2. Telaah Ilmiah Dan Kontribusi Ilmu Bantu**

Bidang masalah yang ditelaah oleh teori pendidikan sebagai ilmu ialah sekitar manusia dan sesamanya yang memiliki kesamaan dan keragaman di dalam fenomena pendidikan. Yang menjadi inti ilmu pendidikan teoritis ialah Pedagogik sebagai ilmu mendidik yaitu mengenai tealaah (atau studi) pendidikan anak oleh orang dewasa. Pedagogik teoritis selalu bersifat sistematis karena harus lengkap problematis dan pembahasannya. Tetapi pendidikan (atau pedagogik) diperlukan juga oleh semua orang termasuk orang dewasa dan lanjut usia. Karena itu selain cabang pedagogik teoritis sistematis juga terdapat cabang-cabang pedagogik praktis, di antaranya pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal dalam keluarga, andragogi (pendidikan orang dewasa) dan gerogogi (pendidikan orang lansia), serta pendidikan non-formal sebagai pelengkap pendidikan jenjang sekolah dan pendidikan orang dewasa.

Di dalam menelaah manusia yang berinteraksi di

dalam fenomena pendidikan, ilmu pendidikan khususnya pedagogik merupakan satu-satunya bidang ilmu yang menelaah interaksi itu secara utuh yang bersifat antar dan inter-pribadi. Untunglah ada ilmu lain yang melakukan telaah atas perilaku manusia sebagai individu. Begitu juga halnya atas telaah interaksi sosial, telaah perilaku kelompok dalam masyarakat, telaah nilai dan norma sebagai isi kebudayaan, dan seterusnya. Ilmu-ilmu yang melakukan telaah demikian dijadikan berfungsi sebagai ilmu bantu bagi ilmu pendidikan. Diantara ilmu bantu yang penting bagi pedagogik dan androgogi ialah : biologi, psikologi, sosiologi, antropologi budaya, sejarah dan fenomenologi (filsafah).

#### ***a. Pendekatan fenomenologi dalam menelaah gejala pendidikan***

Pedagogik tidak menggunakan metode deduktif spekulatif dalam investigasinya berdasarkan penjabaran pendirian dasar-dasar filosofis. Pedagogik adalah ilmu pendidikan yang bersifat teoritis dan bukan pedagogik yang filosofis. Pedagogik melakukan telaah fenomenologis atas fenomena yang bersifat empiris sekalipun bernuansa normative. Seperti dikatakan Langeveld (1955) Pedagogik mempergunakan pendekatan fenomenologis secara kualitatif dalam metode penelitiannya :

Pedagogik bersifat filosofis dan empiris. Berfikir filosofis pada satu sisi dan di pihak lain pengalaman dan penyelidikan empiris berjalan bersama-sama. Hubungan-hubungan dan gejala yang menunjukkan ciri-ciri pokok dari objeknya ada yang memaksa menunjuk ke konsekuensi yang filosofis, adapula yang memaksakan konsekuensi yang empiris karena data yang factual. Pedagogik mewujudkan teori tindakan yang didahului dan diikuti oleh berfikir filosofis. Dalam berfikir filosofis tentang data normative pedagogik didahului dan diikuti oleh pengalaman dan penyelesaian empiris atas fenomena pendidikan.

Itulah fenomena atau gejala pendidikan secara mikro yang menurut Langevald mengandung keenam komponen yang menjadi inti dari batang tubuh pedagogik.

### ***b. Kontribusi Ilmu-Ilmu Bantu Terhadap Pedagogik***

Ilmu pendidikan khususnya pedagogik dan androgogi tidak menggunakan metoda deskriptif-eksperimental karena manfaatnya terbatas pada pemahaman atas perubahan perilaku siswa. Sedangkan prediksi dan kontrol yang eksperimental diterapkan dan itupun manfaatnya terbatas sekali. Seperti ditulis oleh Deese, 1963 :

“Prediction and control, then are excellent criteria of understanding and they also provide us with some of the uses of understanding. They are not always easy to apply, however, and I think little is gained by pretending that they are. It is futile to issue promissory notes about the future applications of the scientific study of education.”

Jadi kurang bermanfaat apabila ilmu pendidikan mempergunakan metode deskriptif-eksperimental terhadap perubahan-perubahan didalam pendidikan secara kuantitatif. Sebaliknya pedagogik dan androgogi harus menjadi ilmu otonom yang menerapkan metode fenomenologi secara kualitatif. Maksudnya ialah agar dapat memperoleh data yang tidak normative (data faktual) dalam jumlah seperlunya dari ilmu biologi, psikologi dan ilmu-ilmu sosial. Tetapi ilmu pendidikan harus sedapat mungkin melakukan pengumpulan datanya sendiri langsung dari fenomena pendidikan, baik oleh partisipan-pengamat (ilmuwan) ataupun oleh pendidik sendiri yang juga biasa melakukan analisis apabila situasi itu memaksanya harus bertindak kreatif. Tentu saja untuk itu diperlukan prasyarat penguasaan atas sekurang-kurangnya satu ilmu Bantu dan/atau filsafat umum.

### *C. Dasar-dasar Filsafat Ilmu Pendidikan*

Baiklah sekarang kita lihat dasar-dasaar filsafah keilmuan terkait dalam arti dasar ontologis, dasar epistemologis, dan aksiologis, dan dasar antropologis ilmu pendidikan.

#### **1. Dasar Ontologis Ilmu Pendidikan**

Pertama-tama pada latar filsafat diperlukan dasar ontologis dari ilmu pendidikan. Adapun aspek realitas yang dijangkau teori dan ilmu pendidikan melalui pengalaman pancaindra ialah dunia pengalaman manusia secara empiris. Objek materil ilmu pendidikan ialah manusia seutuhnya, manusia yang lengkap aspek-aspek kepribadiannya, yaitu manusia yang berakhlak mulia dalam situasi pendidikan atau diharapkan melampaui manusia sebagai makhluk sosial mengingat sebagai warga masyarakat ia mempunyai ciri warga yang baik (*good citizenship* atau kewarganegaraan yang sebaik-baiknya).

Agar pendidikan dalam praktek terbebas dari keragu-raguan, maka objek formal ilmu pendidikan dibatasi pada manusia seutuhnya di dalam fenomena atau situasi pendidikan. Didalam situasi sosial manusia itu sering berperilaku tidak utuh, hanya menjadi makhluk berperilaku individual dan/atau makhluk sosial yang berperilaku kolektif. Hal itu boleh-boleh saja dan dapat diterima terbatas pada ruang lingkup pendidikan makro yang berskala besar mengingat adanya konteks sosio-budaya yang terstruktur oleh sistem nilai tertentu. Akan tetapi pada latar mikro, sistem nilai harus terwujud dalam hubungan inter dan antar pribadi yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terlaksananya mendidik dan mengajar, yaitu kegiatan pendidikan yang berskala mikro. Hal itu terjadi mengingat pihak pendidik yang berkepribadian sendiri secara utuh memperlakukan peserta didiknya secara terhormat sebagai pribadi pula, terlepas dari faktor umum, jenis kelamin ataupun pembawaanya. Jika pendidik tidak

bersikap afektif utuh demikian maka menurut Gordon (1975: Ch. I) akan terjadi mata rantai yang hilang (the missing link) atas factor hubungan serta didik-pendidik atau antara siswa-guru. Dengan egitu pendidikan hanya akan terjadi secara kuantitatif sekalipun bersifat optimal, misalnya hasil THB summatif, NEM atau pemerataan pendidikan yang kurang mengajarkan demokrasi jadi kurang berdemokrasi. Sedangkan kualitas manusianya belum tentu utuh.

## **2. Dasar Epistemologis Ilmu Pendidikan**

Dasar epistemologis diperlukan oleh pendidikan atau pakar ilmu pendidikan demi mengembangkan ilmunya secara produktif dan bertanggung jawab. Sekalipun pengumpulan data di lapangan sebagaimana dapat dilakukan oleh tenaga pemula namun telaah atas objek formal ilmu pendidikan memerlukan pendekatan fenomenologis yang akan menjalin studi empirik dengan studi kualitatif-fenomenologis. Pendekatan fenomenologis itu bersifat kualitatif, artinya melibatkan pribadi dan diri peneliti sebagai instrumen pengumpul data secara pasca positivisme. Karena itu penelaahan dan pengumpulan data di arahkan oleh pendidik atau ilmuwan sebagai pakar yang jujur dan menyatu dengan objeknya. Karena penelitian tertuju tidak hanya pemahaman dan pengertian (verstehen, Bodgan & Biklen, 1982) melainkan untuk mencapai kearifan (kebijaksanaan atau wisdom) tentang fenomena pendidikan maka validitas internal harus dijaga betul dalam berbagai bentuk penelitian dan penyelidikan seperti penelitian kuasi eksperimental, penelitian tindakan, penelitian etnografis dan penelitian ex post facto. Inti dasar epistemologis ini adalah agar dapat ditentukan bahwa dalam menjelaskan objek formalnya, telaah ilmu pendidikan tidak hanya mengembangkan ilmu terapan melainkan menuju kepada telaah teori dan ilmu pendidikan sebagai ilmu otonom yang mempunyai objek formal sendiri atau problematika sendiri sekalipun tidak dapat hanya menggunakan

pendekatan kuantitatif atau pun eksperimental (Campbell & Stanley, 1963). Dengan demikian uji kebenaran pengetahuan sangat diperlukan secara korespondensi, secara koheren dan sekaligus secara praktis dan atau pragmatis (Randall & Buchler, 1942).

### **3. Dasar Aksiologis Ilmu Pendidikan**

Kemanfaatan teori pendidikan tidak hanya perlu sebagai ilmu yang otonom tetapi juga diperlukan untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia secara beradab. Oleh karena itu nilai ilmu pendidikan tidak hanya bersifat intrinsik sebagai ilmu seperti seni untuk seni, melainkan juga nilai ekstrinsik dan ilmu untuk menelaah dasar-dasar kemungkinan bertindak dalam praktek melalui kontrol terhadap pengaruh yang negatif dan meningkatkan pengaruh yang positif dalam pendidikan. Dengan demikian ilmu pendidikan tidak bebas nilai mengingat hanya terdapat batas yang sangat tipis antar pekerjaan ilmu pendidikan dan tugas pendidik sebagai pedagogik. Dalam hal ini relevan sekali untuk memperhatikan pendidikan sebagai bidang yang sarat nilai seperti dijelaskan oleh Phenix (1966). Itu sebabnya pendidikan memerlukan teknologi pula tetapi pendidikan bukanlah bagian dari iptek. Namun harus diakui bahwa ilmu pendidikan belum jauh pertumbuhannya dibandingkan dengan kebanyakan ilmu sosial dan ilmu perilaku. Lebih-lebih di Indonesia.

Implikasinya ialah bahwa ilmu pendidikan lebih dekat kepada ilmu perilaku kepada ilmu-ilmu sosial, dan harus menolak pendirian lain bahwa di dalam kesatuan ilmu-ilmu terdapat unifikasi satu-satunya metode ilmiah (Kalr Perason, 1990).

### **4. Dasar Antropologis Ilmu Pendidikan**

Pendidikan yang intinya mendidik dan mengajar ialah pertemuan antara pendidik sebagai subjek dan peserta didik sebagai subjek pula di mana terjadi

pemberian bantuan kepada pihak yang belakangan dalam upayanya belajar mencapai kemandirian dalam batas-batas yang diberikan oleh dunia di sekitarnya. Atas dasar pandangan filsafah yang bersifat dialogis ini maka 3 dasar antropologis berlaku universal tidak hanya (1) sosialitas dan (2) individualitas, melainkan juga (3) moralitas. Kiranya khusus untuk Indonesia apabila dunia pendidikan nasional didasarkan atas kebudayaan nasional yang menjadi konteks dari sistem pengajaran nasional di sekolah, tentu akan diperlukan juga dasar antropologis pelengkap yaitu (4) religiusitas, yaitu pendidik dalam situasi pendidikan sekurang-kurangnya secara mikro berhamba kepada kepentingan terdidik sebagai bagian dari pengabdian lebih besar kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### D. Perangkat Asumsi Filosofis Pendidikan Guru

Program Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi (PGBK) dikembangkan bertolak dari perangkat kompetensi yang diperkirakan dipersyaratkan bagi pelaksanaan tugas-tugas keguruan dan kependidikan yang telah ditetapkan dan bermuara pada pendemonstrasian perangkat kompetensi tersebut oleh siswa calon guru setelah mengikuti sejumlah pengalaman belajar.

Perangkat kompetensi yang dimaksud, termasuk proses pencapaiannya, dilandasi oleh asumsi-asumsi filosofis, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dianggap benar, baik atas dasar bukti-bukti empirik, dugaan-dugaan maupun nilai-nilai masyarakat berdasarkan Pancasila. Asumsi-asumsi tersebut merupakan batu ujian di dalam menilai perancangan dan implementasi program dari penyimpangan-penyimpangan pragmatis ataupun dari serangan-serangan konseptual.

Asumsi-asumsi yang dimaksud mencakup 7 bidang yaitu yang berkenaan dengan hakekat-hakekat manusia, masyarakat, pendidikan, subjek didik, guru, belajar-mengajar dan kelembagaan. Tentu saja hasil kerja

tersebut di atas perlu dimantapkan dan diverifikasi lebih jauh melalui forum-forum yang sesuai seperti Komisi Kurikulum, Konsorsium Ilmu Kependidikan, LPTK bahkan kalangan yang lebih luas lagi. Hasil rumusan tim pembaharuan pendidikan (1984) dapat disimpulkan sebagai berikut :

### 1. Hakekat Manusia

- a. Manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai kebutuhan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Manusia membutuhkan lingkungan hidup berkelompok untuk mengembangkan dirinya.
- c. Manusia mempunyai potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan kebutuhan-kebutuhan materi serta spiritual yang harus dipenuhi.
- d. Manusia itu pada dasarnya dapat dan harus dididik serta dapat mendidik diri sendiri.

### 2. Hakekat Masyarakat

- a. Kehidupan masyarakat berlandaskan sistem nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya yang dianut warga masyarakat; sebagian daripada nilai-nilai tersebut bersifat lestari dan sebagian lagi terus berubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- b. Masyarakat merupakan sumber nilai-nilai yang memberikan arah normative kepada pendidikan.
- c. Kehidupan bermasyarakat ditingkatkan kualitasnya oleh insane-insan yang berhasil mengembangkan dirinya melalui pendidikan.

### 3. Hakekat Pendidikan

- a. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik.
- b. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat.
- c. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat.

- d. Pendidikan berlangsung seumur hidup.
- e. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya.

#### **4. Hakekat Subjek Didik**

- a. Subjek didik bertanggungjawab atas pendidikannya sendiri sesuai dengan wawasan pendidikan seumur hidup.
- b. Subjek didik memiliki potensi, baik fisik maupun psikologis yang berbeda-beda sehingga masing-masing subjek didik merupakan insane yang unik.
- c. Subjek didik merupakan pembinaan individual serta perlakuan yang manusiawi.
- d. Subjek didik pada dasarnya merupakan insane yang aktif menghadapi lingkungan hidupnya.

#### **5. Hakekat Guru dan Tenaga Kependidikan**

- a. Guru dan tenaga kependidikan merupakan agen pembaharuan.
- b. Guru dan tenaga kependidikan berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat.
- c. Guru dan tenaga kependidikan sebagai fasilitator memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek didik untuk belajar.
- d. Guru dan tenaga kependidikan bertanggungjawab atas tercapainya hasil belajar subjek didik.
- e. Guru dan tenaga kependidikan dituntut untuk menjadi conoh dalam pengelolaan proses belajar-mengajar bagi calon guru yang menjadi subjek didiknya.
- f. Guru dan tenaga kependidikan bertanggungjawab secara professional untuk terus-menerus meningkatkan kemampuannya.
- g. Guru dan tenaga kependidikan menjunjung tinggi kode etik profesional.

## **6. Hakekat Belajar Mengajar**

- a. Peristiwa belajar mengajar terjadi apabila subjek didik secara aktif berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur oleh guru.
- b. Proses belajar mengajar yang efektif memerlukan strategi dan media/teknologi pendidikan yang tepat.
- c. Program belajar mengajar dirancang dan diimplikasikan sebagai suatu sistem.
- d. Proses dan produk belajar perlu memperoleh perhatian seimbang didalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.
- e. Pembentukan kompetensi profesional memerlukan pengintegrasian fungsional antara teori dan praktek serta materi dan metodologi penyampaian.
- f. Pembentukan kompetensi professional memerlukan pengalaman lapangan yang bertahap, mulai dari pengenalan medan, latihan keterampilan terbatas sampai dengan pelaksanaan penghayatan tugas-tugas kependidikan secara lengkap aktual.
- g. Kriteria keberhasilan yang utama dalam pendidikan profesional adalah pendemonstrasian penguasaan kompetensi.
- h. Materi pengajaran dan sistem penyampiannya selalu berkembang.

## **7. Hakekat Kelembagaan**

- a. LPTK merupakan lembaga pendidikan profesional yang melaksanakan pendidikan tenaga kependidikan dan pengembangan ilmu teknologi kependidikan bagi peningkatan kualitas kehidupan.
- b. LPTK menyelenggarakan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat baik kualitatif maupun kuantitatif.
- c. LPTK dikelola dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu dalam rangka pengadaan tenaga kependidikan.

- d. LPTK memiliki mekanisme balikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat secara terus-menerus.
- e. Pendidikan pra-jabatan guru merupakan tanggungjawab bersama antara LPTK dan sekolah-sekolah pemakai (calon) lulusan.

# **BAB III**

## **TINJAUAN PENDIDIKAN DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGIS**

### **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung di dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak bisa dilepaskan dari upaya dan proses saling pengaruh-mempengaruhi antar individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi seperti ini, apa yang dinamakan pendidikan dan peserta didik adalah menunjuk pada dua istilah yang dilihat dari kedudukan dalam interaksi sosial. Artinya siapa yang bertanggung jawab atas perilaku, dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses pengubahannya. Karena itu, di dalam proses pendidikan seringkali sukar dikenali siapa yang menjadi pendidik dan siapa yang menjadi peserta didik secara permanen, karena keduanya dapat mengubah fungsinya.

Selanjutnya, pendidikan juga tidak akan dan tidak pernah terjadi di dalam kehampaan sosial (*social vacuum*). Artinya, pendidikan tidak akan terjadi tanpa ada interaksi antar individu. Namun, oleh karena pendidikan membawa misi normatif maka keluasan interaksi itu dibatasi oleh tata nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sosiologi sebagai disiplin ilmu memiliki kekuatan dalam menelaah dan menganalisis peristiwa pendidikan secara luas. Karena itu penting bagi pendidik untuk membekali diri pada kajian sosiologi.

## **Tujuan Kajian**

Setelah mempelajari material pembelajaran ini diharapkan anda dapat :

1. Menjelaskan pentingnya sosiologi dalam menelaah peristiwa pendidikan.
2. Menjelaskan fungsi pendidikan bagi masyarakat.
3. Menjelaskan interaksi antar sekolah, masyarakat dan keluarga sebagai lembaga pendidikan.
4. Menjelaskan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap praktek pendidikan.
5. Menjelaskan pengaruh pendidikan terhadap perubahan sosial.

### **A. Materi Kajian**

#### **1. Pendahuluan**

Lembaga pendidikan tidak pernah berada di dalam kehampaan sosial (social vacuum). Lembaga pendidikan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Jika lembaga pendidikan bergerak secara dinamik, maka masyarakat akan berkembang secara dinamik dan begitu pula sebaliknya. Itulah sebabnya ketelitian dalam memahami latar sosial, proses perubahan sosial dan dampak ikutannya akan menentukan keberhasilan pendidikan, dan begitu pula sebaliknya.

Pendekatan sosiologi merupakan suatu kajian yang berupaya menelaah dan menganalisis peristiwa-peristiwa tersebut dengan cara mengorganisir faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan dan kelembagaannya secara sistematis. Tekanan kajiannya terutama terletak pada bentuk dan fungsi lembaga di masyarakat dalam hubungannya dengan lembaga pendidikan.

Hasil telaah sosiologi biasanya bersifat diskriptif, yakni gambaran secara rinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Dinamika

interaksi sosial baik di dalam maupun di luar sekolah, struktur kelembagaan sekolah sebagai sistem sosial, kekuatan-kekuatan kelompok di masyarakat, dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pelaksanaan pendidikan, fungsi pendidikan di masyarakat, dan masalah-masalah sekolah sebagai agen inovasi sosial, itu semua terjadi bidang-bidang kajian sosiologi.

Dewasa ini masyarakat mengalami perubahan sangat cepat. Perubahan itu dapat diamati dari segi pemanfaatan teknologi, perubahan sistem nilai dan norma yang dianut, sifat dan dinamika kelompok di masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Perubahan itu tidak selalu mencerminkan keseragaman baik yang berkenaan dengan bentuk, isi atau karakteristik maupun dampak yang ditimbulkannya. Ini memberikan implikasi bahwa lembaga pendidikan dituntut untuk selalu tanggap terhadap perubahan sosial tersebut, dan memberikan implikasi pula bahwa setiap kelompok, masyarakat ataupun bangsa tidak akan memiliki karakteristik dan tujuan pendidikan yang sama.

## **2. Pendidikan dan Masyarakat**

Dilihat dari kepentingan masyarakat secara menyeluruh, fungsi utama pendidikan adalah sebagai alat pemelihara (pengembang) kebudayaan. Kemampuan seseorang untuk belajar, mengorganisir sesuatu dalam bentuk simbolik, mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain, dan berperilaku yang dihasilkan dari belajar ataupun berdasarkan pengetahuan merupakan sumber fenomena kebudayaan. Beberapa kebudayaan dan peradaban yang didasari oleh kebudayaan tentu bergantung pada kemampuan peradaban untuk mengartikulasikan dan mentransmisikan belajarnya secara semi-otomatis, sistem kognitif. Ini merepresentasikan pengetahuan yang terakumulasi di dalam setiap penelitian dan menjadi materi pembelajaran di setiap pendidikan.

Itulah yang dinamakan dengan tanggung jawab sekolah dalam mentransmisikan warisan budaya.

Kebudayaan sudah barang tentu, mencakup lebih dari pengetahuan yang terakumulasi di dalam setiap lapangan penelitian. Ia meliputi tata nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi, walaupun sering terjadi modifikasi di seluruh masyarakat.

Pendidikan mentransmisikan kebudayaan kepada generasi masa depan, dan dalam proses ini juga mengharapkan adanya tatanan kehidupan masa depan yang lebih baik. Transmisi dan akumulasi kebudayaan dari generasi ke generasi itu merupakan karakteristik manusia sejak permulaan sejarah. Peranan pendidikan formal dalam proses ini hanya menjadi bagian kecil saja. Sebagaimana dikemukakan oleh Burton Clark bahwa sistem pendidikan jaman dahulu tidak lebih dari pada seorang wanita mengajar anak-anaknya untuk berjalan, berbicara, dan bekerja bersama-sama. Pada jaman batu tidak ada sekolah yang digunakan untuk mengajar dan melatih anak-anak; mereka belajar dengan cara mengamati apa-apa yang dilakukan orang dewasa. Namun karena pengetahuan semakin berkembang dan kelompok dimana seseorang itu tinggal menjadi semakin lebih kompleks, perkembangan fasilitas yang terpesialisasi mulai mengambil peranan keluarga dalam mentransmisikan kebudayaan.

Dalam sejarah masa lampau terutama pada peradaban Yunani dan Romawi, pendidikan formalhanya dimanfaatkan oleh kalangan terbatas, yakni golongan elit yang berkuasa dan anggota kelompok agama. Namun dengan adanya revolusi industri, selain menghasilkan inovasi secara radikal ia juga mengubah struktur sosial masyarakat. Fungsi utama keluarga tidak lagi menjadi unit produksi, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat petani primitif. Akibatnya banyak anak-anak muda bekerja di pabrik dan di kantor-kantor. Perubahan ini juga

menyebabkan generasi muda semakin menuntut agar memperoleh peluang lebih banyak dalam dunia pendidikan.

Berkaitan dengan hal itu sekolah menjadi suatu kebutuhan, karena keluarga dan masyarakat menjadi kurang efektif dan kurang mampu dalam melatih anak-anak menjadi dewasa melalui hubungan informal. Kelompok agen kebudayaan-guru dan orang awam semakin berkembang. Perubahan jenis-jenis pengetahuan dan pekerjaan menyebabkan anak-anak masuk ke ruang sekolah, dan memberikan peranan yang lebih luas dan lebih dalam untuk melangsungkan dan mentransmisikan kebudayaan.

Luasnya kecenderungan sekarang untuk mengaksentuasikan pemisahan peranan keluarga dan pekerjaan itu akan memperkuat fungsi sekolah sebagai agen penting dalam mentransformasikan kebudayaan. Sungguhpun demikian, kita tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa keluarga tidak lagi penting sebagai agen sosialisasi, atau sekolah mengambil alih fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi. Walaupun tampak ada kecenderungan memasukkan anak-anak ke sekolah pada usia kanak-kanak, keluarga pada dasarnya masih bertindak sebagai agen sosialisasi selama kehidupan anak-anak usia antara empat sampai lima tahun. Selama periode ini anak-anak belajar berbicara dan membentuk hubungan sosial penting yang akan mempengaruhi proses adaptasi dan akomodasi terhadap lingkungannya di masa mendatang. Anak-anak juga mulai memperoleh nilai-nilai sosial dan resep serta larangan sehingga memungkinkan mereka berfungsi sebagai anggota masyarakat dewasa.

Keluarga juga tidak akan kehilangan kepentingannya dalam mendidik anak-anak ketika mereka menginjak usia sekolah. Dalam banyak hal, orang tua dan saudara-saudaranya terus mempengaruhi sosialisasinya selama usia sekolah, begitu pula sampai mereka mencapai usia dewasa. Itu

mungkin terjadi masalah khusus bagi sekolah atas pembagian tanggung jawab di bidang sosialisasi tersebut. Bukan saja sekolah harus mendidik anak-anak yang sudah memperoleh seperangkat nilai (barangkali hal ini akan menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang diterapkan di sekolah), tetapi sekolah juga harus menyelesaikan pengaruh paralel dan yang kadang-kadang berkompetisi dari bawaan keluarga, atau dari kelompok sebaya, selama anak-anak dalam masa pendidikan.

Seringkali diketahui bahwa stabilitas dan kontinuitas masyarakat itu bergantung bukan saja kemampuan mereka untuk membaca, menulis dan lainnya, tetapi juga ketaatan mereka pada politik, agama dan prinsip-prinsip sosial yang menjadi landasan masyarakat tersebut. Dalam hal ini sekolah diharapkan mengajarkan berbagai macam gagasan dan cita-cita seperti demokrasi, aturan-aturan hukum, dan bahkan perkawinan yang baik. Juga diharapkan sekolah meyakinkan masyarakat masa depan tentang pentingnya berperilaku seperti pada praktek dan prinsip-prinsip tersebut.

Sosialisasi, bahkan dalam latar sistem pendidikan formal seperti sekolah mencakup lebih dari belajar keterampilan dan perolehan informasi tentang bagaimana masyarakat berkarya dan harus berkarya. Hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal itu merupakan bagian dari persiapan anak-anak untuk berperan serta dalam masyarakat dewasa. Barangkali yang paling penting pada bagian proses sosialisasi ini adalah mencakup asimilasi dan adopsi kepercayaan, nilai-nilai, dan pola-pola perilaku orang tertentu dimana mereka akan bergaul. Anak-anak prasekolah segera mulai berusaha melampaui ataupun menyamai aspek-aspek perilaku orang tuanya, saudara-saudaranya dan anggota kelompok sebayanya. Kemungkinan terjadi konflik perilaku pada anak juga

meningkat, karena ia harus menghadapi faktor-faktor yang mempengaruhi peluangnya untuk berperilaku.

Karena anak-anak menghabiskan waktunya di sekolah, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah tidaklah mengejutkan bahwa lingkungan pergaulan di sekolah akan mempengaruhi perilakunya termasuk juga bentuk sistem nilai dan sikapnya terhadap norma-norma sosial. Karena itu hanya dengan memperluas lingkungan pergaulannya, anak-anak memperoleh peluang untuk mempersiapkan diri secara tepat pada berbagai peran yang harus dilakukan di dalam masyarakat dewasa. Untuk berfungsi sebagai orang dewasa, anak harus belajar bukan saja peranan orang tua tetapi juga peranan siswa, guru, pemimpin kelompok, dan akhirnya sebagai suami ataupun istri. Anak-anak harus mempelajari peran keluarga apakah sebagai usahawan atau karyawan perusahaan, sebagai sekretaris, sebagai wanita karier bersamaan dengan peranannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Walaupun hal ini jelas bahwa anak-anak tidak akan mempelajari seluruhnya sampai mereka mencapai usia dewasa, beberapa keputusan yang harus dia buat menuntut untuk mengetahui segala sesuatu berkenaan dengan apa yang diharapkan oleh seseorang di dalam masyarakat dewasa. Sebagai tambahan, anak mulai memperoleh kemampuan untuk mentaati peranan orang dewasa pada usia awal, sekolah memainkan peranan misalnya dalam membantu anak-anak mempelajari cara-cara mengendalikan emosinya, menjelaskan dan juga mengasumsikan posisi kekuasaan, dan mengenali keberadaan hirarki dan status di dalam kelompok atau masyarakat. Untuk bertindak sebagai kekuatan konservatif di dalam masyarakat, melalui peranannya sebagai agen transmisi kebudayaan, lembaga pendidikan secara paradoks diharapkan memainkan bagian penting dalam membantu perkembangan dan perubahan sosial dan kultural. Dalam kedudukannya sebagai pusat penelitian

dan tempat berkumpulnya para cendekiawan, perguruan tinggi memberikan dukungan penting dalam kegiatan-kegiatan inovatif dan bersamaan dengan itu mengurangi konflik yang ada di dalamnya, baik yang menyangkut masalah-masalah pengajaran maupun masalah-masalah keilmuan.

Pendidikan dasar dan menengah selama ini memiliki tugas mempersiapkan anak-anak untuk hidup di dalam masyarakat yang terus menerus berubah, dan mengajar keberadaan perubahan itu sendiri. Lebih lanjut, adanya komitmen tentang perubahan dan inovasi pada masyarakat, sekolah diharapkan menyampaikan pengalaman pendidikan kepada peserta didik bukan saja agar mereka mampu beradaptasi dengan perubahan tetapi juga mampu memberikan kontribusi secara aktif terhadap perubahan. Akhirnya sekolah sebagaimana bagian dari fungsi utamanya, juga mentransmisikan komitmen perubahan sebagai nilai-nilai sosial.

Fungsi selanjutnya lembaga pendidikan ini adalah membantu mengalokasikan seseorang pada posisi di dalam masyarakat. Setiap masyarakat selalu membagi tugas dalam memutuskan sesuatu berkenaan dengan kepentingan bersama, dan melaksanakan peranan penting bagi kelangsungan dan perkembangan masyarakat. Walaupun terdapat berbagai dan variasi posisi yang ada di dalam masyarakat, namun seringkali tanggung jawab pada posisi itu seringkali tidak seimbang dengan tuntutan pekerjaannya. Ada beberapa pekerjaan yang lebih sulit daripada yang lainnya, ada yang lebih berbahaya dan lebih tidak menyenangkan; beberapa pekerjaan ada yang memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus. Karena alasan ini, jelas bahwa keterampilan diperlukan pada posisi tertentu daripada yang lainnya dan pekerjaan itu tidak selamanya berkaitan dengan status dan penghargaan yang diberikan. Alhasil, ada persaingan antara anggota masyarakat karena suatu posisi yang ditempati oleh

orang tertentu memberikan penghargaan yang lebih besar dan memberikan pula prestise yang lebih besar pula.

Secara tradisional, kebanyakan masyarakat telah memanfaatkan karakteristik yang dianggap berasal dan diwariskan di dalam mengalokasikan individu pada posisi atau setidaknya-tidaknya dalam memutuskan kelompok individu yang mana yang akan memiliki peluang untuk berkompetisi pada beberapa posisi tertentu. Latar belakang keluarga, agama, suku bangsa dan jenis kelamin merupakan contoh-contoh karakteristik yang berasal dari masyarakat yang telah dan masih digunakan sebagai penentu posisi individu di masyarakat. Sungguhpun demikian, meluasnya teknologi modern masyarakat telah menciptakan suatu situasi sedemikian rupa sehingga posisi itu cocok bagi individu di masyarakat, sebagaimana Ralph Kinton nyatakan di dalam analisisnya tentang status dan peran di dalam masyarakat, semakin baik penyesuaian anggota masyarakat pada status dan perannya, semakin baik pula masyarakat itu berfungsi karena persyaratan untuk memenuhi berbagai posisi menjadi lebih kompleks dan memerlukan bukan saja pelatihan yang lebih lama tetapi juga kemampuan yang lebih besar, karakteristik individu yang berasal dari pengakuan masyarakat itu semakin kurang bermanfaat sebagai kriteria untuk mengalokasikan posisi secara lebih efisien daripada pengukuran prestasi dan kemampuannya.

Sebagaimana dinyatakan bahwa sekolah mengambil oper pembagian tanggung jawab dari bagi sosialisasi anak, ia juga menjadi pusat berbagai aktivitas anak. Kinerja anak di sekolah, karena itu bertindak sebagai salah satu ukuran kemampuannya yang lebih penting. Dengan meningkatkan pendidikan masa sekolah berfungsi sebagai bagian integral dari proses alokasi status dengan berbagai cara: menyediakan latar sehingga individu dapat mempertunjukkan

kemampuannya, menyalurkan individu ke dalam lintasan tertentu sehingga memandu mereka ke arah jabatan yang berbeda, dan memberikan keterampilan tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan berbagai posisi.

Secara teoritik, perkembangan fasilitas pendidikan umum, memungkinkan anak-anak memperoleh keterampilan penting untuk memenuhi berbagai posisi di masyarakat dengan berbagai keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Walaupun teori itu tidak terlalu benar, bagaimanapun juga ia adalah benar karena sekolah menawarkan peluang yang unik bagi anak-anak untuk menunjukkan apa yang dapat mereka kerjakan. Begitu pula, walaupun kita tidak mencapai titik dimana akses keseluruhan posisi yang berbeda di dalam masyarakat ditentukan oleh kemampuan individu atau bahkan oleh latar belakang pendidikan, kenyataan meliputi prestasi pendidikan sehingga membuat banyak perbedaan pada berbagai macam peluang secara terbuka bagi individu sebagai milik orang lain yang di distribusikan.

Dari semula, sekolah bertindak sebagai the arbiter of individual achievement. Karena perkembangan anak melalui sistem pendidikan, maka keputusan yang mereka buat berkenaan dengan jenis latihan yang dipilih dan peluang kemajuannya, sebagian besar terletak di sekolah. Anak-anak dan orang tuanya mungkin mempengaruhi keputusan tersebut, tetapi dalam banyak hal sekolah memainkan peranan banyak. Disini sekolah mungkin menggunakan pengaruhnya dalam menalokasikan status. Keputusan mengenai perguruan tinggi apakah yang akan dimasuki oleh anak-anak, itu semua banyak dipengaruhi oleh sekolah dimana mereka di didik.

Sebagai tambahan untuk mentransformasikan kebudayaan, membantu perkembangan inovasi, membantu mengalokasikan individu pada posisi di masyarakat, sekolah pada umumnya melakukan fungsi-

fungsi tambahan. Pertama, mereka memainkan bagian penting di dalam proses pemilihan calon pasangan kepentingan-kepentingan umum lainnya.

Pada dasarnya tidak ada konflik terhadap fungsi-fungsi yang dilakukan oleh sekolah, namun dalam prakteknya konflik-konflik itu kadang-kadang terjadi. Adalah mungkin, misalnya lembaga pendidikan mengemban fungsi konservatif dan fungsi inovatis sekaligus, tetapi kinerja yang efektif itu keduanya memerlukan perawatan keseimbangan dan ini seringkali sulit untuk dipenuhi. Misalnya lembaga pendidikan mengalami konflik untuk mengajarkan subyek militer ataukah kompetensi, ilmu budaya dasar ataukah sejarah, ilmu pengetahuan alam dan matematika ataukah bahasa, dan sebagainya.

Beberapa fungsi sekunder sekolah juga mungkin menyulitkan sekolah untuk mengembang fungsi utamanya. Aktivitas-aktivitas sosial yang dilaksanakan oleh peserta didik mungkin mengurangi fungsi lembaga pendidikan, jika orang tua ikut campur secara aktif agar anak-anaknya mengikuti kelompok-kelompok sosial yang ada hubungannya dengan kepentingan mereka di masa depan. Konflik antara kepentingan dan harapan orang tua dengan fungsi lembaga pendidikan (sekolah) pada akhirnya akan menurunkan motivasi anak dalam belajar.

Dengan demikian sekolah dipandang memiliki berbagai fungsi yang tidak selamanya cocok dengan lembaga-lembaga lain, namun ia tetap dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat. Dalam hal-hal tertentu, efektivitas sekolah diukur melalui beberapa baik ia berhasil melaksanakan beberapa fungsi tersebut tanpa kehilangan pencapaian tujuan utamanya. Karena itu analisis sosiologis terhadap pendidikan akan menunjukkan tuntutan-tuntutan masyarakat yang sangat kompleks, seringkali bertentangan dan benturan-benturan yang terjadi di dalam lembaga pendidikan itu sendiri.

### **3. Kebudayaan dan Pendidikan**

Sebagaimana telah di jelaskan bahwa kebudayaan itu mencakup tata nilai, kepercayaan dan norma-norma yang berlaku dan diwariskan oleh masyarakat dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Bagi masyarakat atau bangsa yang terdiri dari banyak suku, dan masing-masing memiliki kebudayaan sendiri-sendiri, mereka juga memiliki pola akulturasi dan enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses menjadikan individu agar sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedang akulturasi itu merupakan proses penerimaan unsur budaya asing tanpa menyebabkan hilangnya identitas budayanya sendiri.

Bila beberapa suku tersebut berkumpul di dalam satu lembaga pendidikan, seringkali kelompok minoritas dalam lembaga pendidikan tersebut mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap kelompok mayoritas. Akibatnya juga menjadi masalah tersendiri bagi pendidik terutama yang memanfaatkan proses enkulturasi dan akulturasi dalam waktu yang sama.

Secara yuridis kelompok kesukuan itu mendapatkan perlakuan yang sama dalam segala hal. Namun bila kelompok-kelompok itu di kumpulkan ke dalam satu lembaga pendidikan, mereka umumnya tidak mau segera saling membuka diri antara kelompok dari suku satu dengan suku lainnya. Kejadian seperti ini pada akhirnya akan dan dapat menghambat terjadinya proses enkulturasi dan akulturasi dalam proses pendidikan. Untuk mengatasi masalah seperti itu, kemudian dibuatlah program pendidikan yang berisikan kurikulum lokal yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Pelaksanaan kurikulum lokal itu bukan saja dapat mengembangkan budaya daerah, melainkan juga dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi peserta didik terhadap khasanah budaya di daerah lain, dan budaya

nasionalnya. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan proses asimilasi pada peserta didik harus diperhatikan untuk menghindari adanya pemisahan antara proses enkulturasi dan akulturasi pada berbagai suku tersebut. Kemudian untuk menghindari konflik budaya, pendidik harus mampu membuat keputusan secara adil dengan memperhatikan nilai-nilai dan sikap atau latar budaya peserta didiknya. Begitu pula sebaliknya, peserta didik dari golongan minoritas harus menyadari adanya kenyataan tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berarti.

Keinginan masyarakat pada umumnya mendukung adanya sekolah campuran, baik dilihat dari jenis kelamin maupun kesukuan karena hanya dengan pendidikan model campuranlah generasi muda dapat berbaaur secara damai meskipun terdapat perbedaan kesukuan, jenis kelamin, status ekonomi, status sosial, keyakinan dan sebagainya. Dengan cara itu pula tampak adanya kehidupan masyarakat yang demokratis sehingga menimbulkan rasa kebangsaan yang tinggi pada peserta didik.

Ada dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pendidikan, yaitu (1) ketidak cocokan antara nilai-nilai budaya yang diinternalisasikan pada anak dengan kenyataan atau dalam praktek kehidupan, dan (2) perbedaan atau adanya kesenjangan variasi nilai-nilai budaya yang lebih dominan dan nilai-nilai budaya yang kurang dominan. Pengembangan kebudayaan pada anak-anak itu akan berhasil apabila ditanamkan bersama-sama dengan norma-norma yang dijadikan sebagai patokan perilaku, dan begitu pula sebaliknya penanaman nilai-nilai dan norma tidak akan menjadi berarti apabila tidak didukung oleh pengembangan kebudayaan.

Budaya yang tidak memiliki norma luas dan fleksibel akan menjadi mati. Sebenarnya telah banyak cara yang ditempuh oleh berbagai bangsa dan negara untuk memperbaharui sistem pendidikan, salah satu

diantaranya adalah yang didasarkan pada pengenalan kekuatan nilai-nilai budaya yang tumbuh di masyarakat. Prinsip-prinsip ini umumnya diterapkan pada sekolah dasar sampai pada sekolah tingkat menengah sedangkan untuk perguruan tinggi agaknya kurang mendapat perhatian, namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Nilai-nilai budaya tersebut biasanya dimasukkan ke dalam kurikulum atau mata ajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, sejarah nasional dan lain-lainnya.

#### **4. Konflik Budaya Dalam Pendidikan**

Di negara-negara yang terdiri dari banyak suku atau ras, ketidak beruntungan itu biasanya menimpa penduduk minoritas yang sering tidak berhasil dalam memperoleh kehidupan di lingkungan masyarakat mayoritas. Ketidak beruntungan itu juga menimpa pad berbagai golongan, misalnya (1) masyarakat yang hidup di daerah tersaing, (2) kelompok-kelompok keagamaan yang menutup diri dari arus modernisasi, (3) kelompok-kelompok yang tidak mampu berkomunikasi dengan kelompok lain karena adanya masalah bahasa, (4) kelompok-kelompok yang mengalami kelainan fisik ataupun mental, dan (5) kelompok wanita yang karena naluri dan kondisi alamiahnya.

Kebudayaan manakah yang tidak menguntungkan bagi peserta didik dalam lembaga pendidikan? Biasanya adalah mereka yang berasal dari orang tua yang memiliki latar belakang akademik rendah, dan rendahnya latar belakang akademik itu sebagai konsekuensi dari kelas sosial yang lebih rendah. Walaupun orang tua mereka memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah, kenyataannya orang tua tidak mampu membantu belajar anaknya di rumah karena budaya di sekolah berbeda dengan budaya yang berlaku di rumah.

Ada kemungkinan besar bahwa anak-anak dari kelompok minoritas (biasanya dari kelas bawah)

mengalami kegagalan di sekolah, atau setidaknya tidaknya kurang mampu menyesuaikan diri dengan budaya yang berlaku di sekolah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keserasian antara nilai-nilai yang dimiliki dan dibawa oleh anak dari keluarganya dengan nilai-nilai yang berlaku di sekolah. Di samping itu, karena kebanyakan pendidiknya berasal dari golongan atau kelas menengah yang sudah barang tentu pelaksanaan pendidikannya sedikit banyak mengikuti dan menunjukkan nilai-nilai yang diperlukan oleh golongan atau kelas menengah dalam masyarakat. Dengan sendirinya, nilai-nilai guru itu mempengaruhi nilai-nilai yang seharusnya diajarkan sebagaimana yang terdapat di dalam kurikulum

Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai yang dipelajari oleh anak di sekolah tidak selamanya diikuti secara mutlak. Banyak faktor yang menentukan hal tersebut yakni tingkatan norma yang dianut, ketidak sukaan terhadap perilaku pendidiknya, mungkin juga ketidak pedulian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Karena itu tidak dapat dihindari lagi karena sekolah akan terlibat dalam konflik antara kebudayaan yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat atau kebudayaan tersebut.

Kenyataan-kenyataan seperti itu memberikan konsekuensi kepada pendidik agar: (1) memahami sikap bawaan anak di sekolah; banyak masalah yang timbul di kelas karena peserta didik tidak terbiasa dengan bahasa, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, (2) memahami secara kritis karakteristik peserta didik; biasanya pendidik tidak pernah mengenali sub-kultur dan sikap peserta didiknya, (3) meningkatkan kemampuan berbahasa; misalnya seorang pendidik yang ditugaskan untuk mengajar di sekolah-sekolah di Jawa Tengah mereka harus dapat memahami dan menggunakan bahasa daerah Jawa Tengah untuk berkomunikasi dengan peserta didiknya,

di samping juga penguasaan terhadap bahasa Indonesia, dan (4) mengevaluasi diri terhadap intervensi budayanya dengan profesi yang diemban; artinya apakah budaya yang telah dimiliki itu berpengaruh di dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, di samping juga meneliti apakah nilai-nilai yang dimilikisesuai dengan nilai-nilai ideal peserta didik dan masyarakat lingkungannya.

#### **a. Ketidaksinambungan Budaya**

Yang paling mempengaruhi terjadinya ketidak sinambungan budaya pada anak-anak karena terpisahnya keluarga dengan masyarakat luas. Anak-anak terutama yang hidup di pertokoan sampai masuk sekolah harus tinggal di dalam keluarganya karena lingkungan yang menuntut untuk itu. Dengan demikian perkembangan kedewasaannya terbentuk dari pengaruh orang tuanya atau saudara-saudara terdekat saja. Berbeda dengan masyarakat pedesaan, semenjak masih kanak-kanak sudah bergaul dengan masyarakat luas dari segala usia dan pengalaman. Di sini orang dewasa, bukan orang tuanya atau saudaranya sendiri saja ikut andil dalam mendewasakan anak. Di samping itu anak-anak yang hidup di perkotaan biasanya hanya di didik oleh orang tuanya saja atau pembantu rumah tangganya. Anak-anak semacam ini akibatnya akan mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena selama masa kanak-kanak hidupnya selalu bergantung pada lingkungan keluarganya saja. Sebaliknya bagi anak-anak yang hidup di pedesaan mereka diasuh oleh keluarga, saudara-saudara dan masyarakat sekelilingnya. Dalam kondisi seperti ini anak akan cepat matang dan semenjak kecil relatif sudah memiliki tanggung jawab cukup besar dan mereka sejak dini sudah di bekali tanggung jawab dan percaya diri dalam mencari nafkah, sehingga mereka lebih mudah untuk menghadapi masa kedewasaan.

Dalam kehidupan yang semakin kompleks dan perubahan kebudayaan yang sangat cepat, anak-anak di daerah perkotaan mengalami ketegangan lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang hidup di daerah pedesaan. Oleh karena yang mereka hadapi lebih rumit, maka mereka juga mempunyai resiko yang lebih besar pula. Mereka yang hidup di perkotaan mengalami banyak keragu-raguan dalam menentukan pilihannya karena semua keputusannya dipengaruhi oleh konflik moral, status sosial, dan tingkat tanggung jawab individu. Sumber ketegangan lain adalah anak-anak secara fisik matang sebelum waktunya, dan akibatnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tata nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Dalam sub-kultur seperti itu anak-anak merasa bahwa mereka sudah terlepas dari dunia orang tuanya, namun dalam perasaannya tidak bisa meninggalkan ketergantungan kepada orang tua sehingga berakibat pada kebencian-kebencian terhadap orang tua dan keluarganya. Ada beberapa sumber yang dapat menimbulkan konflik budaya antara anak dengan orang tua, diantaranya : (1) disuguhkannya model-model mutakhir melalui media masa, sehingga anak-anak menganggap orang tuanya sudah ketinggalan jaman, (2) pola pendidikan yang di terapkan oleh orang tua tidak sesuai dengan alam dan budaya anak-anak, dan (3) ketidak paduan keinginan dan cita-cita antara anak-anak dengan orang tua. Menghadapi gejala-gejala seperti itu ada dua pandangan yang terjadi di lembaga pendidikan, yaitu (a) pendidik menerima ketidak sinambungan kebudayaan itu asalkan budaya yang dimiliki oleh anak itu berguna di dalam kehidupannya kelak, dan (b) pendidik menghendaki perlu dihindarinya efek-efek samping dari ketidak sinambungan budaya tersebut. Mereka akan mendidik peserta didiknya seperti orang dewasa yang penuh potensi, bekerja sama secara lebih baik dengan mereka

bukan memberi komando atau interuksi dan konflik itu harus disembuhkan menurut alam dan budaya anak-anak itu sendiri.

Ketidak sinambungan budaya yang terjadi antara anak-anak dengan orang tua itu memberikan implikasi agar lembaga pendidikan (sekolah) melakukan tindakan : (1) mengajak peserta didik untuk mempelajari masalah-masalah yang masih hangat dan benar-benar terjadi di dalam masyarakat seperti misalnya tentang pengangguran, kejahatan, kemelaratan, masalah-masalah urbanisasi, lingkungan hidup dan lain sebagainya; itu semua buak sebagai masalah akademik melainkan sebagai masalah penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, (2) pendidik hendaknya mengajarkan masalah-masalah kemasyarakatan dengan cara mengajak peserta didik berdialog langsung dengan para tokoh masyarakat misalnya ustadz, kyai, petani yang berhasil, pekeja sosial dan lain sebagainya, (3) merangsang peserta didik untuk berani mengemukakan pendapatnya secara bertanggung jawab, dan mengajak kepentingan-kepentingan pendidiknya, dan (4) menganjurkan peserta didik untuk menjadi anggota kelompok-kelompok sosial sehingga akan memberi pengalaman yang kaya kepada peserta didik tentang kehidupan masyarakat.

## **b. Perubahan Kebudayaan**

Kebudayaan itu walaupun tampaknya konstan atau tidak berubah, namun pada hakikatnya kebudayaan selalu mengalami perubahan. Dalam arti, mungkin secara keseluruhan kelihatannya tetap seperti sedia kala namun unsur-unsur yang terkandung di dalamnya mengalami perubahan misalnya perubahan di bidang penggunaan teknologi, bahasa, ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Perubahan kebudayaan dapat terjadi setidak-tidaknya melalui tiga bentuk, yaitu (1) kebiasaan-

kebiasaan baru yang diciptakan atau diketemukan di dalam kebudayaan itu sendiri, (2) kebiasaan-kebiasaan yang ada mungkin dimodifikasi untuk disesuaikan dengan keadaan lingkungan baru, dan (3) kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dipinjam atau berasal dari kebudayaan lain. Kecuali kebudayaan itu sudah mencapai tingkat keutuhan, sebuah kebudayaan tidak akan beraksi secara menyeluruh terhadap satu perubahan saja walaupun bagaimana pentingnya perubahan itu. Penggantian beberapa aspek kebudayaan cepat atau lambat akan mempengaruhi hampir seluruh aspek lainnya, namun hal itu tidak akan mempengaruhi secara merata dan seketika. Misalnya penemuan reaktor nuklir yang mengakibatkan timbulnya sikap yang mempopulerkan perang hanya dalam waktu semalam, namun hal itupun harus mempengaruhi dahulu kebijakan negara terhadap kekuasaan politik dan kebijakan minyak dan gas bumi.

Konsep mengenai hambatan budaya itu merupakan penanda akan adanya kecenderungan perubahan satu kebudayaan lebih lambat dibanding dengan kebudayaan lain pada suatu daerah. Misalnya perubahan kebudayaan di bidang teknologi dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bertambah utuhnya suatu kebudayaan, semakin memperbesar peluang untuk saling mempengaruhi antara teknologi dengan norma-norma yang berlaku. Bagi masyarakat yang budayanya beraneka ragam, teknologi dapat melepaskan diri dari belenggu tata nilai yang sudah mapan. Seperti halnya kebudayaan yang berubah dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, beberapa atau keseluruhan tata nilainya akan mengalami perubahan atau minimal mengalami tafsir ulang meskipun tidak semua unsur-unsur kebudayaannya.

Dewasa ini nilai-nilai yang berasal dari kaum puritan (orang-orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan dan tata susila) cenderung mengalah dengan nilai-nilai masyarakat industri.

Konflik nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai baru yang lebih progresif secara alamiah akan berakibat pada pendidikan.

Dapatkah lembaga pendidikan (sekolah) melakukan perubahan kebudayaan? Tidak dapat disangkal lagi bahwa sekolah merupakan lembaga yang tentu saja dapat mengubah tatanan sosial. Menurut Kneller, semua itu tergantung pada siapa yang mengendalikan sekolah dan siapa yang memiliki pengaruh di masyarakat. Sebagaimana dalam ideologi politik di dalam suatu masyarakat yang diatur oleh seorang penguasa tunggal atau oleh sebuah partai tunggal, sekolah mungkin akan digunakan untuk menciptakan manusia baru dengan kadar kepercayaan dan kepekaan yang dibutuhkan untuk membangun atau melestarikan tatanan baru. Dalam kasus yang sama, keputusan politik itu menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mengadakan transformasi budaya namun sekolah itu bukan satu-satunya alat untuk mengadakan transformasi tersebut karena masih banyak alat lain yang digunakan untuk tujuan yang sama. Sekolah dapat menyumbangkan perubahan-perubahan yang bermakna seperti perencanaan ekonomi, perencanaan regional dan lain-lain sebagainya.

Perubahan kebudayaan memerlukan perubahan pikiran dan tindakan setiap orang. Apabila negara mengubah kebudayaan, itu berarti kehidupan warganya harus diubah sesuai dengan kehirupan negara. Peran serta individu sebuah kebudayaan yang diilhami dan diarahkan oleh negara berarti pula bahwa partai atau kelompok yang mengendalikan negara, pada gilirannya dituntut menghasilkan proses internasionalisasi sedemikian rupa sehingga perilaku dan pikiran individu sesuai dengan tujuan negara. Dalam bab ini kehidupan seseorang tidak dimusnahkan melainkan diubah sedemikian rupa sehingga menjadi pribadi baru seperti yang diharapkan.

Untuk mengubah kebudayaan secara menyeluruh adalah hanya dengan menggunakan kekuatan satu partai yang memiliki kekuatan absolut. Dengan demokrasi tampaknya perubahan kebudayaan secara menyeluruh itu tidak mungkin. Sebab demokrasi mengandung makna secara tidak langsung menyatakan berfungsinya mitra kerja, atau kalau lebih baik disebut opsi secara resmi. Menurut demokrasi, mungkin kebudayaan dibentuk oleh pemerintah namun ditempuh dengan cara penggantian-penggantian secara kaku.

Secara demokratis, sistem pendidikan biasanya akan memperkuat nilai-nilai dan praktek-praktek seperti itu, yakni masyarakat secara keseluruhan dapat mencapai keinginannya. Ini meliputi kegiatan pemahaman dan sikap-sikap tertentu yang mungkin diinginkan pada saat-saat tertentu. Seperti misalnya sikap-sikap patriotisme dan cinta tanah air mungkin sangat dirasakan penting selama masa-masa awal kemerdekaan, sedang penghargaan terhadap lingkungan akan dirasakan sangat diperlukan sekali pada masa-masa pembangunan. Itulah makna pendidikan segala upaya refleksikan, lebih dari sekedar merasakan sikap-sikap masyarakat secara menyeluruh.

Meskipun disini membicarakan pendidikan atau sekolah sebagai agen, ada satu pertanyaan penting untuk diperhatikan yaitu apakah para pendidik dapat bertindak sebagai katalisator perubahan-perubahan kebudayaan tertentu sebagaimana yang diharapkan oleh negara dan oleh masyarakat? Dalam hal ini sulit untuk dijawab dengan jelas.

Pada dasarnya pendidik tidak mengembalikan pendidikan, sebab negara dan masyarakatlah yang melakukan sedang pendidik lebih banyak bertindak sebagai pelaksana pendidikan. Karena itu, meskipun pendidikan secara terang-terangan tidak mungkin menyetujui terhadap program-program pembaharuan kebudayaan, namun ia hanya dapat membawa

pengaruh sedikit dalam menunjang pendapat pemerintah atau pendapat masyarakat luas. Baginya mereka tidak memiliki pengaruh sosial, politik ataupun ekonomi secara memadai atau kalau mau agak radikal suara pendidik kurang diperhatikan oleh pemerintah dalam mengatur tata kenegaraan.

Namun demikian, apakah itu berarti pendidik tidak dapat melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat? Dan mereka hanya sekedar merefleksikan sikap-sikap dan budaya masyarakat saja? Tidak seluruhnya pertanyaan itu dibenarkan. Alasannya, pendidik adalah seorang yang dapat membawa perubahan-perubahan budaya tertentu di dalam masyarakat. Pendidik secara individual dapat melakukan banyak hal untuk membuka pikiran-pikiran peserta didiknya, sehingga peserta didik itu akan membawa perubahan di lingkungan masyarakatnya. Dengan keyakinan dan contoh-contoh keteladanan pendidik yang baik, pada gilirannya dapat mengarahkan peserta didiknya untuk mengadopsi sikap-sikap yang lebih jelas dibandingkan dengan orang-orang yang ada di masyarakat.

Tentu saja, adalah kewajiban pendidik untuk membebaskan peserta didiknya dari prasangka sosial yang menyatakan bekerja semampunya saja tanpa usaha yang keras untuk mencapai hasil. Di samping juga berkewajiban untuk membekali peserta didiknya dengan cita-cita dan etos kerja yang mereka butuhkan untuk menilai ataupun memperbaiki lingkungannya.

## **B. Penutup**

1. Aktivitas pendidikan merupakan hasil dari proses interaksi antara individu dengan individu lainnya yang mempengaruhi pola tingkah lakunya sehari-hari. Untuk itu dalam melakukan atau menjalin interaksi sosial di suatu komunitas tertentu maka harus memahami karakteristik individu dan perubahan sosial yang sedang terjadi karena dampak dari hal tersebut akan turut mempengaruhi keberhasilan pendidikan dan begitu pula sebaliknya.
2. Untuk mengatasi perubahan sosial yang sedang terjadi, sangat dibutuhkan suatu metode-metode yang praktis. Salah satunya adalah metode pendekatan sosiologi dimana pendekatan ini merupakan kajian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut melahirkan suatu pendekatan sosiologi yang dapat ditinjau dari aspek hubungan pendidikan-masyarakat dan kebudayaan-pendidikan.
3. Seorang pendidik sebaiknya mengetahui faktor sosiologi peserta didik sehingga secara tidak langsung dapat memahami pengaruh interaksi sosial yang dapat mempengaruhi proses pendidikan
4. Pendekatan sosiologi pendidikan dalam pembelajaran anak didik diupayakan tidak terlalu berlebihan. Sebab adanya pengaruh sosiologi yang berlebihan antara pendidik dengan peserta didik sehingga berdampak pada penerapan metode lebih santai sehingga peserta didik kurang perhatian terhadap apa yang diajarkan.

# **BAB IV**

## **MERENCANAKAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

### **Pendahuluan**

Bab ini membahas rambu-rambu pendidikan dan pembelajaran masa depan dalam rangka membangun mentalitas bangsa di era otonomi daerah. Pembahasan dimulai dengan mengungkapkan permasalahan, diikuti dengan konteks perubahan, fokus sasaran, kurikulum berbasis kompetensi, dan rambu-rambu sistem pendidikan masa depan meliputi keterkaitan antara ke-bijakan, pelaksanaan dan sub-tansi pendidikan. Sasaran yang diuraikan disini difokuskan pada peningkatan akses, pemberdayaan dan keberpihakan pada siswa dan guru, serta gagasan-gagasan inovatif dalam bidang pendidikan.

### **Ada Masalah Apa dengan Pendidikan Kita?**

Banyak sekali permasalahan dalam pendidikan berkaitan dengan pemerataan serta input pendidikan yang kurang memadai, proses pendidikan yang kurang efektif, dan mutu keluaran (output) yang kurang memuaskan. Pemerataan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) telah mencapai angka yang lebih menggembirakan, sedangkan pada jenjang lainnya masih rendah. Pada tahun 1999, Angka Partisipasi Murni (APM) 80 adalah 94,4%, SLTP (54,8%), Sekolah Menengah termasuk di dalamnya SMU, SMK, dan MA-Madrasah Aliyah (31,5%) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi 11,6% (Balitbang, 2000). Layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas, yaitu 1% (usia 0-5 tahun), dan 12,65% (usia 5-6 tahun). Kurangnya layanan pendidikan usia dini baik melalui pra-sekolah maupun pendidikan keluarga dapat menunda kecepatan

pengembangan kualitas siswa di sekolah. Saat ini terdapat 885 juta penduduk dunia yang buta huruf, 64% diantaranya adalah wanita dan sebagian besar merupakan penduduk Asia termasuk 17 juta lebih berada di Indonesia. Di dunia terdapat 145 juta anak usia 7-11 yang drop out kebanyakan di Asia serta 66% dari anak yang drop out adalah wanita. Data di Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat 3 juta anak SD/MI yang putus sekolah (3,4%), SLTP/MTs (4,04%), SMU/MA (2,1%), SMK (3,5%), dan PT (1,4%).

Terbatasnya peluang bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidik-annya terlihat dari data berikut. Hanya 13,8% dari 1,2 juta guru SD/MI yang berpen-didikan D2-Kependidikan, 38,8% dari 680.000 guru SLTP/MTs berpendidikan D3-Ke- pendidikan, 57,8% dari 337.503 guru SM berpendidikan S1 ke atas, serta 18,86% dari 181.544 dosen PT berpendidikan 82 ke atas dengan 3,48% (83) (Balitbang, 2001).

Permasalahan lainnya adalah kurang memadainya input pendidikan (guru, kurikulum, buku, alat dan sumber belajar) berkaitan dengan mutu dan distribusinya. Ditambah pula dengan rendahnya kesiapan siswa karena pengaruh gizi buruk atau faktor kesehatan, proses pendidikan (pembelajaran dan pengajaran di kelas, pengelolaan sekolah, kepemimpinan) masih kurang efektif yang berakibat pada rendahnya kualitas output. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya skor membaca siswa SD, dimana Hongkong mempunyai skor 75, Singapura (74), Thailand (65), Filipina (52,6), sedangkan Indonesia hanya memperoleh skor 51,7 (IAEA, 1992). Prestasi siswa SLTP menempati urutan ke-32 (IPA), dan ke-34 (Matematika) dari 38 negara (TIMMS, 1999). Walau demikian di SMU ada prestasi yang menggembirakan yaitu perolehan medali emas pada Olimpiade Fisika di Asia pada tahun 2002.

## **Pendidikan dan Pembelajaran Kita Ada yang Perlu dirubah**

Permasalahan dilatari dengan konteks perubahan sosial dan moral yang ditunjukkan dengan peningkatan kesenjangan kaya - miskin, kelabilan sosial dan peradaban bangsa Indonesia. Kemerosotan akhlak dan moral masyarakat ditunjukkan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi yang secara populer disebut korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), ke-sadaran hukum yang masih rendah, kekejaman domestik, ketidaksetaraan jender, penyalahgunaan narkoba, penyebaran HIV/AIDS, tawuran dan disintegrasi bangsa.

Konteks *kedua* adalah belum memadainya pelayanan kesehatan dan gizi buruk, serta permasalahan lingkungan yang berpengaruh pada persoalan kesehatan. Akibat dari kua-litas air yang kurang baik misalnya mengandung polutan-polutan, ada anak yang mening-gal karena infeksi penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, patogen lainnya seperti diare dan disentri. Ditambah pula dengan faktor penyakit dimana habitat sebagai pembawa seperti dengue, malaria, limpatik, filiarises, dll.

*Ketiga*, adalah konteks yang lebih luas menyangkut konteks Dunia dan Asia yang berkaitan dengan kecepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keadaan Teknologi Informasi di dunia menunjukkan bahwa: kebudayaan telah di transfer melalui inter-net dan kabel telepon. Prospeknya pengguna internet akan meningkat dari 228 juta menjadi 765 juta pada tahun 2005. Penggunaan telepon seluler akan meningkat dari 250 juta menjadi 600 juta pada tahun 2005. Diperkirakan seperempat transaksi dunia akan menggunakan ecommerce (Bangkok Post, 15 Agustus 2001). Di Asia, India, mempunyai 'e-hub' dan mulai menjadi powerhouse software yang utama. Korea Selatan telah memimpin pasar internet (broadband), Singapore telah mempunyai e-hub dan menjadi 'kota global', dan Cina akan menjadi 'superpower' dalam teknologi informasi. Bagaimana

dengan Indonesia? Akses terhadap kabel telepon masih terbatas, apalagi dengan internet karena komputer dan perangkatnya masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Konteks di atas menyebabkan Indonesia kurang cepat berpacu dengan perubahan standar global di dunia yang ditandai dengan dunia digital. Terdapat kesenjangan besar dalam akses terhadap dunia digital, kesenjangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi pangan, sandang, papan, dan kesehatan (sanitasi dan nutrisi). Ditambah lagi dengan kesenjangan kebutuhan sosial, budaya, fisik, moral, dan agama. Padahal pengurangan kesenjangan dunia digital, sosial, budaya; keimanan, akhlak mulia dan budi pekerti luhur, kesehatan fisik dan moral sangat menentukan perkembangan ekonomi karena lebih baiknya pemikiran saintifik, kreativitas, dan inovasi serta perubahan melalui kekuatan individu dan masyarakat belajar sepanjang hayat.

### **Agenda Pendidikan Pembelajaran Masa depan**

Berdasarkan permasalahan dan konteks di atas, aspek apa dalam pendidikan yang mampu menjadikan masa depan yang lebih baik? Pertama pendidikan perlu menjamin pemerataan akses sehingga dapat memberdayakan keunggulan siswa yang pada gilirannya dapat membentuk keunggulan sebagai pribadi, masyarakat, bangsa, dan makhluk Tuhan yang beriman, beradab dan mampu belajar sepanjang hayat.

*Kedua*, mengembangkan dan memantapkan keunggulan penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kompetensi memutakhirkannya (to update) secara berkesinambungan di abad kesejagatan sehingga kita dapat berperan dalam ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).

Kemajuan dalam bidang informasi, komunikasi dan teknologi menyebabkan; informasi melimpah ruah melampaui batas-batas negara. Pengaruh nyata terlihat pada kehidupan berekonomi. Pasar bebas, kemampuan bersaing dan penguasaan pengetahuan dan teknologi, menjadi makin penting untuk kemajuan suatu bangsa. Sumber daya alam Indonesia yang makin terbatas ini tidak lagi dapat menjadi tumpuan modal, karena sumber kesejahteraan suatu bangsa telah bergeser dari modal fisik ke modal intelektual, pengetahuan, sosial dan kredibilitas. Dengan demikian keunggulan dalam pemutakhiran pengetahuan dan kompetensi secara mantap dan berkelanjutan menjadi suatu keharusan. Terlebih lagi, Industri baru dikembangkan dengan berbasis pengetahuan dan kemampuan tingkat tinggi, maka bangsa yang berhasil adalah bangsa yang berpendidikan dengan standar hasil belajar yang tinggi.

Memasuki abad ke-21 ini, banyak perubahan besar di dunia, yang kurang diimbangi dengan perubahan serupa di Indonesia. Pengetahuan manusia maju dengan cepat dan makin lama makin cepat. Hal ini membawa implikasi yang sangat besar dalam bidang pendidikan. Pengetahuan seseorang akan lebih cepat usang, tidak relevan, dan kehilangan nilai. Kalau ingin tetap mutakhir pengetahuan seseorang harus terus menerus diperbaharui dengan cara-cara belajar baru. Hal ini berpengaruh pada substansi pendidikan yaitu kurikulum dan penilaian. Kemudahan belajar secara maya atau belajar dengan kabel on-line (e-learning) dan penilaian secara on-line makin membuat kurikulum dan penilaian yang berorientasi isi (content oriented) akan makin kehilangan makna.

*Ketiga*, diperlukan cara-cara yang inovatif dalam kebijakan, substansi dan pelaksanaan pendidikan, sehingga investasi pendidikan menjadi lebih terarah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1998 tentang Otonomi Daerah sistem pemerintahan beralih dari sistem sentralistik ke desentralisasi dimana Daerah Tk. 1 merupakan unit pelaksana utama. Kemudian dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan perlunya:

- penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar,
- pengaturan kurikulum nasional,
- penilaian hasil belajar secara nasional,
- penyusunan pedoman pelaksanaan,
- penetapan standar materi pelajaran pokok, dan
- penetapan kalender pendidikan dan jumlah belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.

Kompetensi yang dituntut oleh *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000* tersebut sejalan dengan tuntutan abad pengetahuan (knowledge age). Pada abad pengetahuan ini zaman ekonomi berbasis pengetahuan diperlukan masyarakat berpengetahuan yang belajar sepanjang hayat. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh masyarakat sangat beragam dan berkualitas. Menurut Hargeaves (2001), pada saat ini tidak seorang pun *dibolehkan* untuk *tidak* memperoleh pengetahuan dengan standar yang tinggi. Dalam pengajaran tetap diperlukan kurikulum biasa tetapi juga kemampuan metakognitif dan kompetensi untuk:

- berpikir bagaimana berpikir dan belajar bagaimana belajar;
- keterpaduan belajar formal dan tidak formal;
- mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan dalam dunia informasi; dan
- mampu mengatasi situasi yang ambigu, permasalahan yang tidak dapat diramalkan; dan keadaan-keadaan yang tak terlihat secara kasat mata.

Untuk memenuhi kemampuan *meta-kognitif* dan kompetensi dengan standar yang tinggi diperlukan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi seperti dijelaskan pada bagian berikut ini.

## **Benar Kembali Ke Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Kerangka dasar kurikulum berbasis kompetensi merupakan suatu format yang menetapkan penyusunan silabus dilakukan pada tingkat sekolah atau daerah, kompetensi dan hasil belajar yang dapat dicapai siswa dalam setiap tingkatan, kegiatan belajar mengajar yang menjamin pengalaman siswa untuk secara langsung mengalami dan memperoleh proses, produk, kompetensi dan nilai yang diharapkan serta penilaian yang lebih otentik, akurat dan berkelanjutan.

Pengertian kompetensi menurut kerangka dasar ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Suatu kompetensi dapat berupa pernyataan tentang apa yang dapat dilakukan siswa secara terus menerus (menetap) dalam suatu rumpun pelajaran atau mata pelajaran pada suatu tingkat tertentu. Dengan demikian kurikulum berbasis kompetensi merupakan pergeseran penekanan dalam kurikulum dari isi (Apa yang tertuang) ke *kompetensi* (Bagaimana) harus berpikir, belajar, bersikap dan melakukan). Oleh karena itu guru dan siswa diharapkan dapat mengetahui *apa* yang harus dicapai dan *sejauhmana* efektivitas belajar telah dicapai.

Kompetensi dalam kerangka kurikulum ini meliputi:

- kompetensi tamatan
- kompetensi lintas kurikulum
- kompetensi rumpun pelajaran, dan
- kompetensi dasar mata pelajaran.

Kompetensi *tamatan* merupakan kompetensi yang harus dicapai siswa ketika siswa tamat dari suatu jenjang

pendidikan. Kompetensi lintas kurikulum merupakan kecakapan untuk belajar sepanjang hayat, dan keterampilan hidup yang diperlukan siswa untuk mencapai seluruh potensinya dalam kehidupan dan dunia kerja. Kompetensi rumpun pelajaran adalah kinerja yang harus dicapai ketika siswa menyelesaikan suatu rumpun pelajaran yang terdiri dari suatu mata pelajaran atau lebih. Kompetensi dasar merupakan pernyataan ukuran minimal memadai yang ditetapkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dasar ini harus dikembangkan, dilatihkan dan dialami siswa secara maju dan berkelanjutan seiring dengan perkembangannya untuk menjadi mahir berkinerja dalam memecahkan masalah.

Kerangka dasar ini terdiri atas empat komponen yaitu *framework* kurikulum dan hasil belajar, *framework* pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, *framework* kegiatan belajar mengajar dan *framework* penilaian berbasis kelas.

*Framework* Kurikulum dan Hasil Belajar (FKHB) merupakan tuntutan penguasaan siswa di Indonesia di sekolah negeri atau swasta agar dapat menggali, memahami, menghargai dan melakukan sesuatu sebagai hasil belajar yang dilaksanakan di sekolah. *Framework* ini memuat pengembangan kompetensi siswa yang perlu dicapai secara keseluruhan sejak lahir sampai 18 tahun. FKHB memuat kompetensi, materi pokok dan hasil belajar dari TK sampai dengan kelas 12 (TK-12). Kurikulum dan Hasil Belajar mempunyai dua keistimewaan yaitu yaitu berbasis kompetensi dan pendekatan menyeluruh dari TK sampai dengan kelas 12 (TK-12).

*Framework* ini lebih ditujukan kepada para pengambil keputusan di daerah dan sekolah dengan memuat gagasan dan cara-cara dalam:

- Pengembangan perangkat kurikulum (*a.l. silabus*)

- ☐ Pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan mutu hasil belajar.
- ☐ Pengembangan sistem informasi kurikulum (*website*)
- ☐ Pembentukan jaringan kurikulum (*curriculum council*)

### *Framework Kegiatan Belajar Mengajar*

*Framework* Kegiatan Belajar Mengajar merupakan acuan yang memberikan muatan paedagogis (suasana didaktik, metodik, dan psikologis) dan andragogis (suasana belajar yang kondusif sesuai dengan situasi) dan cara-cara pencapaian kompetensi sesuai dengan perkembangan kemampuan siswa.

### **Framework Penilaian Berbasis Kelas**

Memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik yang disertai dengan pernyataan yang jelas tentang standar yang harus/telah dicapai, serta peta kemajuan dan pelaporan siswa. Penilaian ini dipadukan dalam program belajar mengajar a.l. melalui portfolios (kumpulan kerja siswa), products (hasil karya), projects (penugasan), performances (unjuk kerja), dan paper & pencil (tes tulis).

Kurikulum berbasis kompetensi mempunyai dua keuntungan yaitu menekankan pada belajar esensial dan bersifat lentur. Kompetensi yang ditetapkan dinyatakan secara umum/minimal/ memadai dan generik untuk memberikan peluang/ kesempatan dalam mengakomodasikan perbedaan-perbedaan kebutuhan, prioritas, fasilitas dan kemampuan siswa. Tetapi format ini sekaligus dapat digunakan untuk membandingkan pencapaian hasil belajar siswa

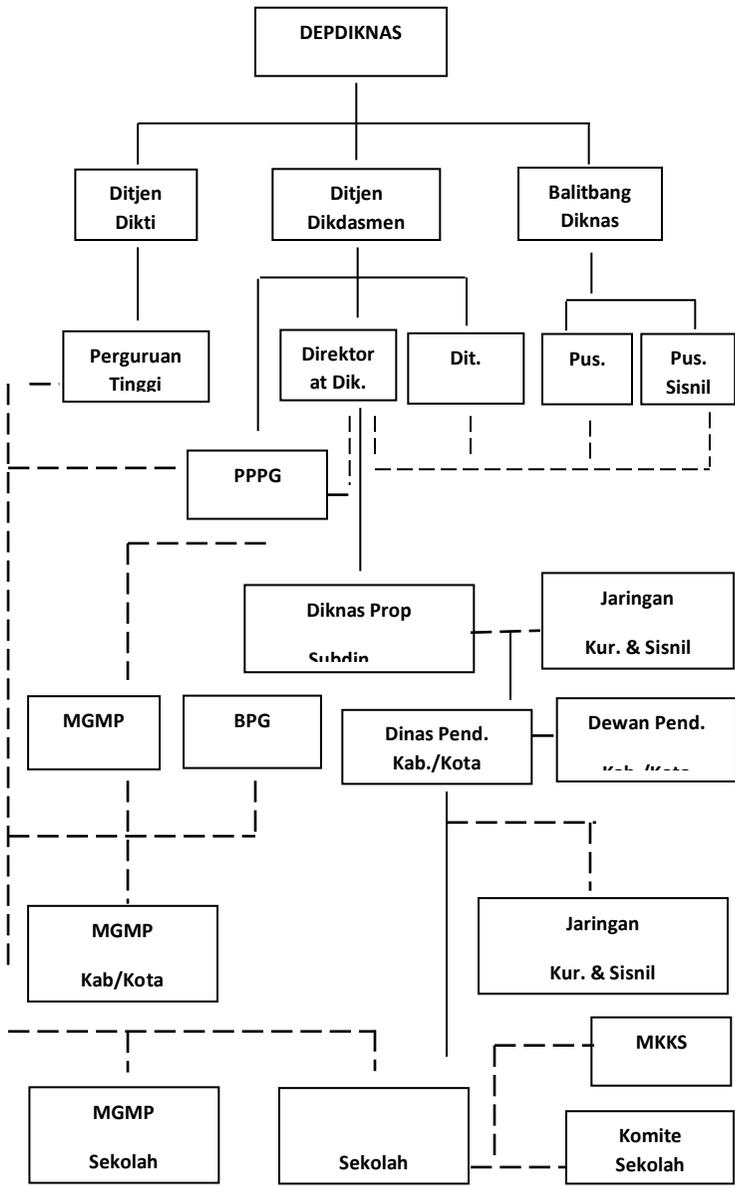
## **Jaringan Kerja Dalam Pelaksanaan Pendidikan**

Jaringan kerja dimanfaatkan oleh dunia usaha pada era global untuk beberapa kepentingan, antara lain meningkatkan budaya kerja, daya saing, baku mutu dan pengakuan pelanggan. Jaringan kerja merupakan wahana saling tukar informasi tentang manajemen dan budaya kerja. Sebagai contoh, industri di Amerika Serikat tidak lagi mempertahankan budaya kerja berdasarkan Teori X dan Teori Y dari McGregor tetapi sudah diwarnai dengan teori manajemen partisipatif dari Jepang yang kemudian disebut teori Z. Dalam hal desain, mobil Amerika Serikat juga mengikuti model Jepang yang menjadi trend dunia, yaitu kecil dan nyaman. Dalam hal baku mutu proses dan hasil, perusahaan di berbagai negara juga sudah mengadopsi standar ISO. Jaringan kerja juga digunakan perusahaan untuk menjangkau masukan tentang harapan pelanggan sehingga produknya diakui dan diterima oleh pelanggan.

Sektor pendidikan memang merupakan lembaga nirlaba, namun keberadaannya juga memerlukan dukungan dan pengakuan pelanggan dan tidak bisa lepas dari pengaruh sektor lain, termasuk sektor industri. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan juga harus mengikuti standarisasi, baik manajemen maupun hasil. Standarisasi pada hakekatnya merupakan kesepakatan bersama berbagai pihak terkait yang terjalin dalam suatu jaringan kerja, vertikal maupun horizontal. Melalui jaringan kerja tersebut penyelenggara lembaga pendidikan membangun komunikasi secara baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholders*) sehingga mutu keluarannya diakui dan diterima pelanggan.

## Jaringan Kerja Depdiknas dalam Pelaksanaan KBK

Salah satu karakteristik KBK adalah kurikulum dikembangkan dari standar kompetensi. Suatu kompetensi dikatakan standar bila secara substansi diakui dan diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Kejelasan hubungan jaringan kerja antar lembaga dan pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan KBK. Jaringan kerja antar lembaga pada pelaksanaan KBK untuk SLTP, secara makro, sudah dikembangkan oleh Direktorat SLTA Ditjen Dikdasmen, seperti nampak pada Gambar 1, namun secara mikro menjadi tugas lembaga di daerah untuk mengembangkannya. Jaringan kerja makro tersebut meliputi empat tingkat, yaitu tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat sekolah. Masing-masing institusi atau lembaga memiliki garis hubungan perintah, hubungan koordinatif ( ——— ), atau hubungan konsultatif ( - - - ).



Gambar : Jaringan Kerja Depdiknas

1. Jaringan Kerja Tingkat Pusat

Jaringan kerja di tingkat pusat terdiri dari:

- a. Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini adalah Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP), berperan menyediakan pedoman pelaksanaan KBK serta melakukan evaluasi dan pembinaan.
- b. Perguruan tinggi, sebagai institusi yang memiliki tenaga ahli, berkewajiban membantu Direktorat di lingkungan Ditjen Dikdasmen, apabila diperlukan.
- c. Direktorat Tenaga Kependidikan, sebagai Direktorat yang memiliki tugas fungsi mengembangkan kemampuan/ kompetensi tenaga kependidikan, membantu dalam merencanakan pelatihan guru melalui unit kerja yang berada di bawah wewenangnya yaitu PPPG dan BPG (LPMP).
- d. Pusat Pelatihan Pengembangan Guru (PPPUG), sebagai institusi pengembang kegiatan pelatihan guru di tingkat nasional, berperan dalam penyiapan bahan pada setiap jenis dan tahapan pelatihan.
- e. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), sebagai organisasi profesi, mempunyai peran membantu Direktorat PLP dalam memberikan masukan terhadap setiap rancangan kebijakan yang dipandang dari sudut fisibilitas pelaksanaan di lapangan. MGMP tingkat nasional, jika belum terbentuk maka MGMP yang berada di Ibu Kota Jakarta, dapat menjalankan peran tersebut.
- f. Pusat Kurikulum, sebagai unit kerja di bawah Balitbang Diknas yang memiliki wewenang mengembangkan kurikulum Nasional, berperan selalu melakukan kerjasama dengan PUSISJIAN, dan Dit. PLP untuk saling memberi masukan guna penyempurnaan Kurikulum.
- g. Pusat Sistem Penilaian, sebagai unit kerja di bawah Balitbang Diknas yang berwenang mengembangkan sistem penilaian, berperan menyempurnakan sistem penilaian, bekerjasama dengan PUSKUR dan Direktorat di lingkungan Ditjen Dikdasmen.

## 1) Tingkat Propinsi

Jaringan di tingkat propinsi terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan Propinsi, sesuai dengan tugas dan fungsinya, diharapkan berperan melakukan evaluasi serta pembinaan SLTP serta melakukan konsultasi dengan Dit. PLP di tingkat pusat serta Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- b. Perguruan Tinggi, sebagai institusi yang memiliki tenaga ahli, apabila diperlukan berkewajiban membantu Dinas Pendidikan Propinsi
- c. Lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP, dulu BPG) diharapkan berperan sebagai lembaga penjamin mutu pelaksanaan KBK di sekolah. Jika tenaga widyaiswara tidak mencukupi maka LPMP dapat melibatkan pengurus/anggota MGMP yang kompeten untuk melatih guru.
- d. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Propinsi, sebagai organisasi profesi, mempunyai peran dalam memberikan masukan kepada Kantor Dinas Pendidikan Propinsi dalam setiap rancangan kebijakan dipandang dari sudut fisibilitas pelaksanaan di lapangan. Jika MGMP tingkat propinsi belum terbentuk, dimungkinkan MGMP tingkat kota di Ibu Kota Propinsi dapat menjalankan peran tersebut. MGMP dapat pula berperan sebagai fasilitator dalam pelatihan guru.
- e. Jaringan Pengembang Kurikulum tingkat Propinsi, yaitu kelompok guru yang pernah dibentuk di propinsi, sebagai perpanjangan tangan Puskur, dapat membantu Kantor Dinas Pendidikan Propinsi atau BGP sebagai fasilitator dalam pelatihan pengembangan kurikulum bagi guru.
- f. Jaringan Sistem Penilaian Propinsi adalah kelompok guru yang menjadi perpanjangan tangan PUSISJIAN yang dibentuk di propinsi membantu Kantor Dinas Pendidikan Propinsi atau BPG sebagai fasilitator dalam pelatihan guru.

## 2) Tingkat Kabupaten/Kota

Jaringan di tingkat kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melakukan evaluasi dan pembinaan SLTP serta melakukan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi.
- b. Perguruan Tinggi, sebagai institusi yang memiliki tenaga ahli, apabila diperlukan berkewajiban membantu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- c. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kabupaten/Kota, sebagai organisasi profesi, mempunyai peran membantu atau memberikan masukan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menyusun rancangan kebijakan, dipandang dari sudut fisibilitas pelaksanaan di lapangan. MGMP dapat pula sebagai fasilitator dalam pelatihan guru. Tempat pelatihan bisa memanfaatkan gedung Sanggar PGK.
- d. Dewan Pendidikan berperan memberikan masukan kepada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota baik dalam pelaksanaan ujicoba, penyempurnaan Kurikulum, dan atau penyempurnaan arah kebijakan pendidikan di SLTP di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- e. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dapat membantu Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam melancarkan komunikasi dengan sekolah serta dapat berperan membantu merumuskan arah kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah yang bersangkutan.
- f. Jaringan pengembang kurikulum kabupaten/kota, yang dibentuk dengan melibatkan guru, dosen, dan atau praktisi pendidikan, berfungsi sebagai perpanjangan tangan Puskur dan membantu Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai fasilitator dalam pelatihan guru.

- g. Jaringan Sistem Pengujian Kabupaten/Kota, perlu dibentuk, terdiri dari guru, dosen, dan atau praktisi pendidikan yang dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan PUSISJIAN dan membantu Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai fasilitator dalam pelatihan guru.

### **3) Tingkat Sekolah**

Sekolah, sebagai unit kerja paling ujung, bertanggungjawab atas pelaksanaan dan mungkin juga ujicoba pengembangan kurikulum, diharapkan selalu berkonsultasi dengan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola sekolah dan guru dapat melakukan konsultasi dengan:

- a. Perguruan Tinggi, sebagai institusi yang memiliki tenaga ahli, apabila diperlukan berkewajiban membantu sekolah.
- b. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sekolah, sebagai organisasi profesi yang mempunyai peran memberikan masukan terhadap setiap rancangan kebijakan sekolah dipandang dari sudut fisibilitas pelaksanaan di lapangan, selain itu juga dapat pula berperan sebagai fasilitator dalam pelatihan guru.
- c. Komite Sekolah. Komite ini berperan memberikan masukan kepada Sekolah baik dalam rangka pelaksanaan ujicoba, modifikasi Kurikulum itu sendiri, maupun dalam hal penyempurnaan arah kebijakan pendidikan di SLTP tersebut.
- d. Dunia Usaha serta Lembaga Pendidikan dan Latihan. Lembaga tersebut berperan sebagai penyedia latihan, pendidikan, atau latihan kerja bagi siswa SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

#### **A. Tugas dan Fungsi Lembaga/Unit Terkait**

Mengacu pada tugas dan fungsi lembaga/unit terkait pada ujicoba pelaksanaan KBK di SLTA maka

tugas dan fungsi lembaga/unit terkait pada pelaksanaan KBK di SLTP dapat dibagi menjadi empat tingkat, yaitu tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan tingkat sekolah.

### **1. Tingkat Pusat**

Lembaga di tingkat pusat adalah Departemen Pendidikan Nasional, dalam manajemen pelaksanaan KBK, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi KBK.
- b. Memberikan saran kebijakan.
- c. Memberikan pelayanan yang berkaitan dengan konsep dan filosofi pengembangan dan pelaksanaan KBK.
- d. Menyempurnaan KBK berdasarkan masukan dari hasil pelaksanaan piloting, monitoring, dan evaluasi.
- e. Memberikan pelayanan kepada TIM Pengembang kurikulum di daerah.
- f. Menyelenggarakan seminar dan lokakarya peningkatan mutu pelaksanaan kurikulum.

### **2. Tingkat Propinsi**

Lembaga di tingkat propinsi, yaitu Dinas Pendidikan Propinsi, dalam manajemen pelaksanaan KBK, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menjadi fasilitator pembentukan, pelatihan, dan pembinaan Tim pengembang silabus pada tingkat kabupaten/kota.
- b. Memberikan layanan operasional pelaksanaan KBK dan penyusunan silabus bagi seluruh kabupaten/kota.
- c. Memantau penyusunan dan implementasi silabus pada tingkat kabupaten/kota
- d. Memberikan dukungan sumber-sumber daya pendidikan yang diperlukan bagi penyusunan silabus.

- e. Mengusahakan dana secara rutin untuk kegiatan penyusunan silabus, penilaian, dan monitoring silabus.
- f. Melakukan supervisi, penilaian, dan monitoring untuk kepentingan informasi pendidikan tingkat propinsi.
- g. Melakukan koordinasi vertikal dengan unit kerja terkait di lingkungan Depdiknas.

### **3. Lembaga Pelaksana KBK di Tingkat Kabupaten/Kota**

Lembaga Pelaksana KBK di tingkat kabupaten/kota terdiri dari Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota.

#### **a. Dewan Pendidikan**

Keberadaan Dewan Pendidikan merupakan landasan formal partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan berperan sebagai:

- 1) Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- 2) Pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- 4) Sebagai mitra antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Untuk menjalankan perannya, Dewan Pendidikan memiliki fungsi sbb:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
  - 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
  - 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai :
    - a) kebijakan dan program pendidikan,
    - b) kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan,
    - c) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru dan kepala sekolah,
    - d) kriteria fasilitas dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
  - 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan
  - 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota
- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggungjawab dalam:
- 1) Melakukan sosialisasi KBK dan implikasinya penyelenggaraannya.
  - 2) Mengusahakan adanya sumber dana di tingkat kabupaten/kota yang dialokasikan untuk penyusunan, evaluasi, dan perbaikan silabus.
  - 3) Membentuk tim pengembang silabus pada tingkat kabupaten/kota.
  - 4) Merumuskan kompetensi sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - 5) menyusun silabus yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - 6) Mendistribusikan silabus ke sekolah-sekolah.

- 7) Mengkaji kelayakan sekolah yang akan memulai menggunakan KBK,
- 8) Memberikan persetujuan, jika sekolah sanggup melaksanakannya.
- 9) Melakukan supervisi, penilaian, dan monitoring terhadap penyusunan rencana kegiatan, termasuk perangkat silabus yang disusun berdasar kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah, dan pelaksanaannya.

#### **4. Lembaga Pelaksana di Tingkat Sekolah**

Lembaga pelaksana di tingkat sekolah terdiri dari Komite Sekolah dan Sekolah, masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda.

- a. Peran Komite Sekolah, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah, adalah sebagai berikut:
  - 1) Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
  - 2) Pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  - 3) Pengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  - 4) Mediator antara pemerintah dan masyarakat di sekitar sekolah.
- b. Fungsi Komite Sekolah adalah sebagai berikut:
  - 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,
  - 2) Melakukan kerjasama dengan warga masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,

- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat,
- 4) Memberikan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah,
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan,
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

c. Peran Sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan komunikasi dengan semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, warga masyarakat sekitar sekolah, dan komite sekolah) untuk mensosialisasikan konsep dan pelaksanaan KBK serta implikasinya terhadap siswa dan sekolah, dan
- 2) Menetapkan tahap dan administrasi pelaksanaan KBK, antara lain:
  - a) memahami standar kompetensi serta silabi yang telah ditetapkan secara nasional dan daerah,
  - b) merumuskan kompetensi dan menyusun silabus sesuai kebutuhan masyarakat sekitar sekolah,
  - c) memohon bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau pakar dari perguruan tinggi dalam rangka menyusun silabus,
  - d) melakukan *benchmarking*, yaitu membandingkan silabus yang disusun sekolah dengan silabus dari sekolah atau

pihak lain yang dipandang sebagai yang terbaik,

- e) mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kurikulum,
  - f) menata ulang penugasan guru pada kelas-kelas yang lebih sesuai, tanpa mengurangi kesejahteraan guru yang telah ditetapkan sebelumnya,
  - g) meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan, antara lain melalui penempatan berdasarkan kompetensi dan pelatihan secara berkala, dan
  - h) memberdayakan semua sumber daya dan dana sekolah termasuk melibatkan dewan pendidikan dan komite sekolah untuk meningkatkan mutu pelaksanaan kurikulum.
- d. Tugas unsur-unsur yang ada di sekolah

Untuk melaksanakan peran tersebut, unsur-unsur yang berada di sekolah mempunyai tugas sebagai berikut.

1) Kepala Sekolah

- a) menjamin tersedianya dokumen kurikulum,
- b) membantu dan memberikan arahan kepada guru dalam memahami dan melaksanakan kurikulum,
- c) mengatur jadwal pertemuan guru dengan orang tua siswa,
- d) menjalin hubungan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dan perguruan tinggi, dan
- e) menyusun laporan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan KBK di sekolah dan menyampaikannya pada pihak yang terkait.

2) Guru

- a) mempelajari dan memahami kurikulum,
- b) menyusun silabus dan mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa dan sekolah,

- c) melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan,
- d) mengumpulkan dan berbagi gagasan dengan sesama guru mengenai perencanaan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan prinsip KBK,
- e) menghadiri pertemuan-pertemuan di tingkat sekolah KKG/MGMP, tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, dan propinsi, dan
- f) menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

## B. Jaringan Kerja Antar Jenjang Pendidikan

Hubungan kerja lembaga pendidikan antar jenjang merupakan suatu kebutuhan. Lembaga pendidikan pada jenjang tertentu merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dengan mutu lulusan suatu lembaga pendidikan di bawahnya. Di sisi lain, lembaga tersebut menjadi pemasok lembaga pendidikan jenjang berikutnya. Namun, sampai saat ini, hubungan tersebut belum terjalin dengan baik.

Mengacu pada pola jaringan kerja makro tersebut di atas, peserta pelatihan ini diminta berpartisipasi dalam diskusi pengembangan jaringan kerja antar jenjang pendidikan, tugas, dan fungsinya guna menunjang pelaksanaan KBK tingkat daerah kabupaten/kota. Diskusi dilakukan dalam kegiatan kelompok, 6 sampai 8 orang per kelompok.

Diskusi kelompok, pengembangan jaringan kerja mikro SLTP dengan lembaga lain, misal SD, SLTP, dan *stakeholders* lain. Format bisa (tidak harus) menggunakan contoh seperti tabel berikut. Waktu yang disediakan sekitar 30 menit untuk diskusi dan 15 menit penyajian, total 45 menit,

No	Aspek	Jaringan SLTP dengan Lembaga lain		
		SD	SLTA	Stakeholders lain
1	Peran			
2	Fungsi			
3	Pola komunikasi			

Fenomena lain yang bisa ditingkatkan melalui pengembangan jaringan kerja adalah keberadaan dan peran komite sekolah yang belum ideal. Secara ideal, Komite Sekolah mewakili masyarakat untuk merumuskan harapan masyarakat yang harus dipenuhi oleh sekolah dan minta pertanggungjawaban sekolah tentang pencapaiannya. Format penembangan jaringan bisa menggunakan contoh sebagai berikut.

No	Aspek	Jaringan Komite Sekolah SLTP	
		Pengurus	Anggota
1	Peran		
2	Fungsi		
3	Pola komunikasi		
4	Prosedur penetapan		

## Penutup

Seperti telah dikemukakan pada pendahuluan, keberadaan jaringan kerja merupakan konsekuensi dari upaya peningkatan peran suatu lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Dalam KBK, standar kompetensi merupakan acuan utama. Mengingat tuntutan masyarakat terhadap mutu tidak pernah berhenti maka lembaga pendidikan harus selalu mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu media komunikasi lembaga pendidikan dengan masyarakat adalah jaringan kerja. Oleh karena itu, sekolah dan lembaga terkait perlu membangun jaringan kerja yang efektif.

## **BAB VI**

# **PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **Pengantar**

Sektor pendidikan menjadi penting bagi pembangunan suatu bangsa sebab pendidikan akan membawa perubahan. Itulah sebabnya pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat dewasa ini guna memenuhi panggilan hidup. Pendidikan menjadi investasi bangsa dalam membangun perubahan dan peradaban manusia. Suatu bangsa yang maju tentu tidak lepas dari peran pendidikan. Asumsi yang muncul adalah kemajuan bangsa hanya dapat dipacu jika manusia yang mengisi pembangunan itu memiliki sumber daya yang memadai. Persoalannya kemudian adalah seperti apa sumber daya manusia yang ingin dibangun?

Banyak tesis yang dilontarkan bahwa ukuran sumber daya manusia dapat dilihat dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi persoalan yang muncul lagi adalah apakah teknologi yang berkembang dewasa ini dapat menjamin kesejahteraan umat manusia? Jika dilihat dari berbagai perkembangan dunia, ternyata akibat perkembangan teknologi tidak jarang menimbulkan penghancuran peradaban dunia. Lihat saja kerusakan lingkungan hutan yang dulunya dieksploitasi manusia dengan peralatan sederhana beratus-ratus tahun ternyata hutan masih lestari. Tetapi munculnya teknologi penebang kayu yang serba modern menjadikan manusia mengeksploitasi isi hutan secara membabi buta dari pohon kecil hingga besar. Akibatnya erosi menjadi ancaman umat manusia. Akibat lain menipisnya lapisan ozon yang membuat bumi tempat tinggal umat manusia menjadi panas dan diprediksi 100 tahun yang akan datang terjadi pencairan es di belahan kutub dan ini berarti dataran

rendah dari bumi akan ditenggelamkan oleh leburan es kutup. Dapatkah pendidikan menyikapi hal ini?

Jika sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan yang mengesampingkan afek negatif dari perkembangan teknologi seperti yang disebutkan di atas, maka perlu ada redefinisi tentang sumber daya manusia yang sebenarnya.

## **Tujuan**

Setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu:

1. Mendeskripsikan sumber daya manusia yang seimbang
2. Menjelaskan kondisi pendidikan nasional menghadapi era globalisasi
3. Mengemukakan empat pilar pembelajaran pada era globalisasi
4. Menjelaskan makna keterampilan belajar
5. Menjelaskan peningkatan mutu sumber daya manusia
6. Menjelaskan arti hakekat life skills

## **Lingkup Kajian**

### **Sumber Daya Manusia yang Ideal**

Ada dua masalah pokok yang menjadi inti pembahasan dalam kajian ini yakni (1) manusia, dan (2) sumber daya. Manusia pada hakekatnya dapat dilihat dalam dua prespektif pendekatan yakni hakekat manusia dalam pendekatan ilmiah, dan hakekat manusia dalam pendekatan Ilahiyah.

Hakekat manusia dalam pendekatan ilmiah dikaji melalui teori biogenesis yang memposisikan manusia hidup karena ada kehidupan sebelumnya. Pandangan yang sangat kontroversi adalah teori evolusi Charles Darwin yang memandang bahwa manusia berasal dari kera. Pendekatan ilmiah sering membawa manusia pada sekularisme berpikir yang justru melahirkan sumber daya manusia yang kerdil dari pemahaman hakekat manusia yang ideal. Untuk

itu muncul pendekatan ilahiyah yang memposisikan bahwa hakekat manusia selain jasmani, juga memiliki rohani yang sifatnya gaib dan merupakan amanah Tuhan agar manusia berbuat tidak melampaui batas kemanusiaan. Unsur rohani manusia inilah yang sifatnya mampu mengendalikan perbuatan yang tercela. Menyatunya jasmani dan rohani ini dapat melahirkan sumber daya yang mampu membangun peradaban manusia yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Penyatuan ini melahirkan manusia yang memiliki rasa bukan rasa memiliki. Karakter manusia seperti ini adalah “pintar merasa bukan merasa pintar” atau “hebat merasa bukan merasa hebat” ciptakan karakter manusia seperti yang dicontohkan di atas? Merupakan tugas yang diemban s menjadi misi pendidikan.

## **Kondisi Pendidikan Nasional Menghadapi Era Globalisasi**

Era globalisasi harus dilalui oleh siapapun yang hidup di abad XXI ini, didalamnya syarat dengan kompetisi yang pemenangnya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bagi bangsa Indonesia, siap atau tidak siap harus masuk didalamnya.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama untuk memetik kemenangan dalam persaingan era globalisasi. Hanya saja persaingan bangsa Indonesia kearah itu masih jauh dari harapan. Tetapi masih ada secercah harapan untuk melangkah cerdas kedepan jika kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah bangsa yang penuh semangat patriotik dan pantang menyerah untuk dijadikan daya dorong dalam upaya memajukan pendidikan dalam arti luas memajukan bangsa dalam berbagai sektor kehidupan.

Secara empiris dalam negeri sendiri dirasakan masih belum meningkatnya mutu pendidikan secara signifikan. Data empiris menunjukkan bahwa nem SD sampai SMA relatif rendah dan belum mengalami peningkatan yang

berarti. Dari dunia usaha atau industri muncul keluhan bahwa lulusan yang memasuki dunia kerja belum memiliki kesiapan yang baik. Kesiapan berjenjang juga terjadi, kalangan SLTP merasa bekal lulusan SD kurang baik memasuki SLTP, kalangan SMA merasa bekal lulusan SLTP tidak siap mengikuti pelajaran di SMA. Sekarang mungkin kalangan SD juga mengeluh karena anak yang memasuki SD dianggap serba kurang disebabkan kurangnya pendidikan dari lingkungan keluarga, mungkin tidak melalui TK, kekurangan gizi, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dan kesehatan anaknya.

Pada awal abad XXI, dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar yaitu:

1. Sebagai akibat krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai.
2. Mengantisipasi era global dunia, pendidikan dituntut menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global.
3. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Secara khusus Propens 2000-2004 menyoroti yaitu :

1. Rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan
2. Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan
3. Lemahnya manajemen pendidikan
4. Belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan akademisi
5. Ketimpangan pemerataan pendidikan antara wilayah geografis, antara perkotaan dan pedesaan.

Peran pendidikan dalam masyarakat senantiasa mengalami pergeseran. Sistem politik, sosial, ekonomi, bangsa menjadi penentu dalam penetapan dan pengembangan peran pendidikan. Masuknya sistem

persekolahan sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pendidikan.

Sementara pendidikan tradisional seperti padepokan dan pesantren tetap berlangsung, sistem pendidikan persekolahan barat dapat membuktikan diri sebagai model pendidikan yang efektif dengan hasil yang nyata, antara lain dengan lahirnya kelompok perintis kemerdekaan yang mampu menggunakan organisasi sebagai perjuangan alat politik. Namun karena ketidaksiapan secara kultural, pendidikan barat juga menimbulkan eksese berupa pudarnya karakter bangsa.

Kalau diperhatikan dengan seksama dan dilihat dari perspektif pendidikan, dalam masyarakat dewasa ini, ada empat sumber masalah yang semuanya masih lemah yaitu:

1. Rendahnya kesadaran multicultural
2. Penafsiran otonomi daerah yang masih belum tepat
3. Kurangnya sikap kreatif dan produktif
4. Rendahnya kesadaran moral dan hukum

Di pihak lain, konstruk masyarakat masa depan ditandai secara kuat oleh semangat bhineka tunggal ika yang benar, sistem sosial yang mengakar pada masyarakat, ekonomi berorientasi pasar dengan perspektif global, serta moralitas hukum. Keempat hal tersebut mengindikasikan orientasi pembangunan yang mengutamakan kepentingan mayoritas yang berimplikasi pada perlunya diusahakan peningkatan mutu sumber daya manusia, peningkatan aktivitas sektor ekonomi riil, pengembangan kreativitas dan produktivitas, dan pengembangan hati nurani.

Masyarakat Indonesia baru adalah masyarakat yang memiliki karakteristik tersebut yang ditandai dengan menyatunya kepentingan masyarakat yang memiliki karakteristik tersebut yang ditandai dengan menyatunya kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara.

Tentu saja, untuk mewujudkan masyarakat baru yang demikian diperlukan strategi yang tepat untuk menyentuh aspek kultural (tatanan infrastruktur sosial), aspek kultural (nilai-nilai budaya yang cocok), dan dinamika proses kemasyarakatan. Dalam konteks strategi

perubahan menuju masyarakat baru tersebut, pendidikan menjadi bagian esensial dari strategi kebudayaan karena kebudayaan hanya dapat hidup apabila ada manusia dan masyarakat pendukungnya. Suatu peradaban setinggi apa pun tidak akan hidup tanpa masyarakat pendukungnya.

Peran pendidikan mesti dipahami bukan saja dalam konteks mikro (kepentingan anak didik yang dilayani melalui proses interaksi pendidikan), melainkan juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat bangsa, negara dan bahkan juga kemanusiaan pada umumnya.

Oleh karena pendidikan itu terjadi di masyarakat, dengan sumber daya masyarakat, dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kenegaraan secara simultan. Di samping itu, secara mikro, pendidikan juga senantiasa harus memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antarindividu peserta didik.

Berdasarkan refleksi tentang terjadinya pergeseran peran pendidikan yang didukung dengan abstraksi terhadap acuan idiil (hukum) dan kajian empiris atas kondisi sekarang serta idealisasi masa depan, maka secara mendasar pendidikan perlu memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban
- b. Mendukung diseminasi nilai keunggulan
- c. Mengembangkan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan keagamaan, dan
- d. Mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai-nilai moral.

Berkaitan dengan kebijakan pendidikan ini, Yusuf Kalla mengkampanyekan peningkatan kualitas pendidikan dengan pernyataannya antara lain menyatakan:

“Agar sekolah tidak meluluskan siswanya 100%, percuma ganti-ganti kurikulum jika setiap tahun siswa-siswa sekolah dibiarkan lulus 100%. Karena pasti lulus, sehingga siswa tidak termotivasi untuk giat belajar dan membaca. Parahnya, orang tua juga tidak terima dan marah-marah jika anaknya tidak lulus di sekolah. Begitu pula Kepala Sekolah merasa bangga jika siswanya lulus semua. Sekarang kita tertawakan jika ada sekolah yang meluluskan siswanya 100%. Pada tahap awal, mungkin orang tua akan marah-marah dan siswa akan berdemonstrasi ke sekolah, bahkan bisa jadi kaca-kaca sekolah akan dipecahkan dan dihancurkan. Tidak apa-apa, kita tidak boleh mundur, kaca yang pecah kita ganti, lebih murah mengganti kaca dibandingkan dengan memperbaiki lulusan sekolah yang terlanjur bermutu rendah” (Kompas, 28 April 2003). Beliau merasa yakin bahwa dengan kebiasaan tidak meluluskan seluruh peserta didik, maka mereka akan terpacu untuk belajar dan sekolah pun akan lebih objektif dalam memberikan penilaian.

Dalam rangka memajukan pendidikan nasional diperlukan suatu paradigma yang jelas melalui tatanan normatif dalam bentuk undang-undang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah yang akan memberikan arahan makro terhadap pendidikan nasional, dan selanjutnya peraturan daerah yang akan mengembangkan potensi keunggulan lokal yang dapat memperkaya potensi nasional. Bagi para praktisi pendidikan dalam upayanya memajukan pendidikan maka minimal ia harus berangkat dari dua paradigma:

1. Paradigma normatif, dan
2. Paradigma empiris

Paradigma normatif adalah perangkat perundang-undangan dan peraturan dibidang pendidikan yang merupakan pedoman dalam pengelolaan pendidikan. Visi pendidikan nasional adalah pendidikan yang mengutamakan kemandirian menuju keunggulan untuk meraih kemajuan dan kemakmuran berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan nasional diharapkan mampu menghasilkan manusia dan masyarakat Indonesia yang demokratis-religius yang berjiwa mandiri, bermartabat, menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, dan menekankan keunggulan sehingga tercapai kemajuan dan kemakmuran. Tujuan yang demikian mulia ini mempersyaratkan kepedulian keluarga, masyarakat, bersama-sama dengan organisasi dan institusi pendidikan nasional yang mandiri, mampu untuk selalu melakukan inovasi menuju ke suatu sistem pendidikan nasional yang unggul.

Satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwa sistem pendidikan nasional (tetap) mengacu kepada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemandirian, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Pendidikan nasional memberikan perhatian terhadap kelompok-kelompok khusus yang apabila tidak diperhatikan akan mengalami ketelantaran dan merugikan bangsa.

Kelompok khusus yang bila diabaikan akan menimbulkan kerugian pada bangsa adalah kelompok anak-anak berkemampuan luar biasa (anak berbakat), wanita, dan kelompok usia produktif. Kelompok khusus lain yang bisa semakin terlantar bila diabaikan meliputi mereka yang secara ekonomi tertinggal, hidup di daerah terpencil, dan penyandang cacat dan kelainan fisik atau mental. Terhadap kelompok-kelompok khusus ini, dibutuhkan perlakuan khusus secara kelembagaan sehingga terjamin keberlanjutannya.

Misi pendidikan nasional dibedakan ke dalam tiga misi, yaitu misi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Misi jangka pendek pendidikan nasional adalah:

1. Melakukan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu
2. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pendidikan sesuai dengan asas desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah, dan
3. Melakukan perintisan program-program pengayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi jangka menengah pendidikan nasional adalah menciptakan sistem, iklim dan proses pendidikan yang demokratis dan mengutamakan mutu, mampu mengembangkan manusia dan kehidupan masyarakat Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, kreatif, inovatif, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi jangka panjang pendidikan nasional adalah melakukan pembudayaan dan pemberdayaan sistem, iklim, dan proses pendidikan nasional yang demokratis dan mengutamakan mutu dalam perspektif nasional dan global.

Tujuan pendidikan harus mencerminkan kemampuan sistem pendidikan nasional untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan peran yang multidimensional. Secara umum, pendidikan harus mampu menghasilkan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat yang sehat dan cerdas dengan:

1. Kepribadian kuat, religius, dan menjunjung tinggi budaya luhur bangsa
2. Kesadaran demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3. Kesadaran moral-hukum yang tinggi, dan
4. Kehidupan yang makmur dan sejahtera.

### **Empat Pilar Pembelajaran pada Era Globalisasi**

Memasuki era globalisasi di abad XXI diperlukan suatu paradigma baru dalam sistem pendidikan dunia, dalam rangka mencerdaskan umat manusia dan memelihara persaudaraan. Pemikiran tersebut telah disadari oleh UNESCO yang merekomendasikan “empat pilar pembelajaran” untuk memasuki era globalisasi, yaitu program pembelajaran yang diberikan hendaknya mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat sehingga mau dan mampu belajar (*learning know or learning to learn*). Bahan belajar yang dipilih hendaknya mampu memberikan suatu pekerjaan alternatif kepada peserta didiknya

(learning to do), dan mampu memberikan motivasi untuk hidup dalam era sekarang dan memiliki orientasi hidup ke masa depan (learning to be). Pembelajaran tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk keterampilan untuk dirinya sendiri, tetapi juga keterampilan untuk hidup bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan hidup dalam pergaulan antar bangsa-bangsa dengan semangat kesamaan dan kesejajaran (learning to live together).

Empat pilar pembelajaran pada era globalisasi yaitu:

1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Kemandirian
4. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bekerja sama

Keempat pilar tersebut, merupakan pilar-pilar belajar yang harus menjadi basis dari setiap lembaga pendidikan baik Pendidikan Formal (PF) maupun Pendidikan Non-Formal (PNF) dan Pendidikan Informal (PI) dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bertujuan pada hasil belajar aktual yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Hasil belajar aktual merupakan akumulasi kemampuan konkrit dan abstrak untuk memecahkan persoalan hidup.

Oleh karena itu, empat pilar belajar tersebut tidak bisa dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan keempatnya merupakan suatu garis kontinum dalam proses pencapaiannya, tetapi disisi lain dapat berbentuk hirarki karena kemampuan di bawahnya merupakan prasyarat bagi kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan tertinggi dan terakhir merupakan akumulasi dari kemampuan-kemampuan dibawahnya.

Belajar berarti melibatkan proses perubahan. Perubahan tersebut berhubungan dengan penguasaan kebiasaan, pengetahuan, dan sikap. Belajar membuat seseorang mampu mengadakan penyesuaian diri dengan atau mengendalikan lingkungan atau masyarakat. Karena konsep perubahan tidak berhubungan langsung dengan

konsep belajar, maka perubahan apapun dalam tingkah laku sebenarnya merupakan proses belajar sedang terjadi atau telah terjadi. Jadi, sebenarnya selama proses perubahan tersebut dapat disebut sebagai proses belajar.

Belajar merupakan perubahan yang terjadi dalam diri individu, karena terjadinya interaksi antara individu dengan lingkungannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dan juga membuat yang bersangkutan lebih mampu berhubungan dengan lingkungannya. Belajar merupakan hasil interaksinya dengan pengalaman. Perubahan perilaku tersebut karena pengalamannya.

Belajar mensyaratkan adanya pengaturan kondisi yang optimal sehingga mampu menghasilkan perubahan, dan proses pembentukannya memerlukan dorongan yang sesuai dengan minatnya. Belajar bersangkutan dengan pertumbuhan intelektual tersebut ditandai dengan kata-kata, simbol-simbol tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang akan dilakukan.

Perkembangan intelektual tergantung pada terjadi proses interaksi yang teratas dan menyatunya hubungan guru dan peserta didiknya atau antara pamong belajar dengan warga belajarnya. Proses pembelajarannya harus memperahtikan faktor lingkungan peserta didik, tersedianya waktu yang dibutuhkan peserta didik. Kegiatan belajar yang bersangkutan dengan sikap dapat dipelajari dengan tepat guna melalui penggunaan model-model dan dorongan orang lain.

Belajar untuk tahu menjadi basis bagi belajar untuk dapat melakukan; belajar untuk dapat melakukan merupakan basis bagi belajar untuk mandiri; belajar untuk mandiri merupakan basis belajar untuk bekerjasama. Tahu, dapat melakukan, mandiri dan kemampuan bekerjasama merupakan kesatuan dan prasyarat bagi individu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Hubungan antara pilar tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak semua individu yang tahu dapat melakukan dalam arti memiliki keterampilan.

Tidak semua yang mandiri mampu bekerjasama dengan orang lain, karena kemampuan bekerjasama menuntut syarat-syarat lain yang lebih terkait dengan aspek psikologis, dan yang mampu bekerjasama pasti telah memiliki basis kemandirian, keterampilan, dan pengetahuan yang cukup memadai. Dengan demikian, pengetahuan menjadi basis dan keterampilan menjadi basis awal dari keterampilan melakukan kerja sama dengan orang lain.

Searah dengan empat pilar pembelajaran, muncul atau pertanyaan tentang mana yang lebih penting antara belajar untuk hidup dan hidup untuk belajar. Pertanyaan ini muncul untuk menguji paradigma pembelajaran yang lebih menekankan kepada pemerolehan keterampilan, karena disisi lain masih bertahan satu pandangan yang menyatakan bahwa belajar yang menghasilkan keterampilan belajar (bukan belajar keterampilan), merupakan kewajiban dasar manusia sebagai bagian dalam proses menjadi (yang diharapkan, yang utuh, yang sesungguhnya). Berbagai teori secara konsisten juga masih menempatkan keterampilan atau *skill to earning a living* sebagai salah satu aspek tujuan belajar.

Pembelajaran berbasis *life skills* dilatarbelakangi oleh rasional yang cukup kuat, dan dapat dilihat dari tiga dimensi, baik dimensi makro (skala luas), skala menengah, maupun skala mikro. Dilihat dari dimensi makro adalah upaya pemberian ketrampilan kompleks bagi sumber daya manusia Indonesia untuk memasuki persaingan global.

Dilihat dari dimensi skala menengah adalah upaya pemberian keterampilan bagi putra-putri daerah untuk membangun daerah sejalan dengan tuntutan otonomi, sebagaimana ditegaskan Subandriyo dan Hidayanto (2000) bahwa pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi ialah upaya membekali siswa dengan berbagai keterampilan yang berguna untuk mengatasi persoalan kehidupan sehari-hari.

Konsep tersebut sangat tepat untuk dijadikan terobosan bagi persoalan nasional yang cukup mendesak, tetapi disisi lain merupakan indikasi bahwa program pembelajaran pada hampir semua lini pendidikan belum menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang memadai.

Pada era gobalisasi, Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan ketat dalam perdagangan internasional sebagai konsekuensi dari berlakunya pasar bebas di kawasan ASEAN dan Asia Fasifik. Untuk itu, pendidikan harus diorientasikan sesuai dengan kondisi dan tuntutan tersebut, agar output pendidikan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi. Dalam kondisi ini, manajemen birokratik sentralistik yang telah menghasilkan pola penyelenggaraan pendidikan yang seragam dalam berbagai kondisi lokal yang berbeda untuk berbagai lapisan masyarakat yang berbeda, tidak bisa dipertahankan lagi.

Dikatakan demikian, karena muatan dan proses pembelajaran di sekolah selama ini menjadi miskin variasi, berbasis pada standar nasional yang kaku, dan diimplementasikan di sekolah atas dasar petunjuk-petunjuk yang cenderung serba detail.

Di samping itu, peserta didik dievaluasi atas dasar akumulasi pengetahuan yang telah diperolehnya, sehingga orang tua tidak mempunyai variasi pilihan atas jasa pelayanan pendidikan bagi anak-anaknya, sumber-sumber pembelajaran di “dunia nyata” dan unggulan daerah tidak dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan di sekolah, dan lulusan hanya mampu menghafal tanpa memahami.

Tantangan masa depan yang beberapa indikatornya telah nampak akhir-akhi ini, menuntut manusia yang mandiri, sehingga peserta didik harus dibekali dengan kecapakan hidup (life skill) melalui muatan, proses pembelajaran dan aktivitas lain di sekolah. Kecapakan hidup di sini tidak semata-mata terkait dengan motif ekonomi secara sempit, seperti keterampilan untuk bekerja, tetapi menyangkut aspek sosial-budaya seperti cakap, berdemokrasi, ulet, dan memiliki budaya belajar

sepanjang hayat. Dengan demikian pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup pada hakekatnya adalah pendidikan untuk membentuk watak dan etos.

Program broad-based education (BBE), yang diterjemahkan pendidikan berbasis masyarakat luas yang berorientasi kecakapan hidup (life skill-LS) adalah inisiatif pemerintah pusat untuk menjawab tantangan tersebut. Program ini berbasis masyarakat luas karena melayani kebutuhan sebagian besar masyarakat, yakni lulusan sekolah yang memiliki kecakapan hidup. Implementasi program Board-based Education terfokus pada lima hal sebagai berikut:

1. Reorientasi pembelajaran menuju pembelajaran dan evaluasi yang efektif
2. Pengembangan budaya sekolah
3. Peningkatan efektivitas manajemen sekolah
4. Penciptaan hubungan yang harmonis, dan sinergis antara sekolah dengan masyarakat, serta
5. Pengisian muatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Program BBE-LS secara alami berada dalam kerangka MBS/MPMBS, karena kelima penekanan tersebut bersandar pada pengambilan keputusan di level masyarakat sekolah. Proses pembelajaran, evaluasi, kondisi sekolah, dan manajemen sekolah yang efektif sulit dilaksanakan pada pola sentralistik, tetapi akan menemukan kesempatan yang luas dalam konteks MBS/MPMBS. Pengisian BBE-LS akan mendorong partisipasi dalam hubungan yang harmonis, dan sinergis dengan masyarakat jika dikembangkan dalam konteks MBS/MPMBS, yang responsif dan antisipatif.

Arah perubahan paradigma pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru meliputi berbagai aspek mendasar sebagaimana yang tertulis dibawah ini:

- a. Paradigma lama
  - Sentralistik
  - Kebijakan yang top down

- Orientasi pengembangan parsial; pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan teknologi perakitan
  - Peran pemerintah sangat dominan
  - Lemahnya peran institusi nonsekolah
- b. Paradigma baru
- Desentralistik
  - Kebijakan yang bottom down
  - Orientasi pengembangan holistik; pendidikan untuk pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan produktif, kesadaran hukum
  - Meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif
  - Pemberdayaan institusi masyarakat: keluarga, LSM, pesantren, dan dunia usaha.

Pokok-pokok paradigma baru pendidikan yakni:

1. Pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang demokratis
2. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang menjawab tantangan global
3. Pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis
4. Pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan berkompetitif
5. Masyarakat demokratis memerlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis.

Paradigma baru pendidikan di atas mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak lagi dipikulkan kepada sekolah semata, akan tetapi dikembalikan kepada masyarakat dalam arti sekolah dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab. Dalam paradigma baru ini, masyarakat yang selama ini pasif terhadap pendidikan, tiba-tiba ditantang menjadi penanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab ini tidak hanya sekedar memberikan

sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah dan membayar uang sekolah, akan tetapi yang lebih penting masyarakat ditantang untuk turut menentukan jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk meningkatkan mutu pendidikan dan memikirkan kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik.

### **Makna Keterampilan Belajar**

Proses belajar macam apakah yang cocok dengan perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat informasi? Sudah pasti proses belajar dengan cara “menyuapi” atau mekanistik akan membawa subyek didik kepada “shock” masa depan. Yang jelas dalam masyarakat informasi kita lebih banyak menggunakan daya akal (brain power) dari pada daya fisik memperkenalkan proses belajar yang inovatif, yaitu belajar secara antispatoris dan partisipatoris. Hal ini berbeda dengan apa yang disebut “maintenance learning” yang tidak memerlukan kemampuan untuk menganalisa sehingga sukar untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Apabila demikian halnya maka tidak dapat diharapkan adanya partisipasi. Kebebasan berpikir jadinya merupakan hal yang sangat esensial. Tanpa kebebasan berpikir, tidak ada alternatif, dan tidak ada proses penilaian. Dengan sendirinya tidak ada perkembangan sistem nilai.

Ada yang mengkhawatirkan bahwa dengan datangnya masyarakat informasi, manusia akan kehilangan kepribadiannya. Ternyata justru sebaliknya akan muncul penekanan akan arti nilai-nilai dalam kehidupan manusia, termasuk nilai-nilai agama, hubungan antar manusia, estetika, bahasa. Dengan kata lain masyarakat informasi akan membuka horizon yang lebih luas bagi manusia untuk belajar, belajar tanpa batas.

Dalam kaitan dengan proses belajar inovatif ini, dalam teori-teori proses belajar terlalu diberi tekanan kepada “belajar memecahkan masalah”. Hal ini kadang-kadang berlebihan karena banyak hal yang dianggap

masalah sebenarnya bukan masalah. Justru yang penting ialah mengidentifikasi, mengerti, dan bila perlu merumuskan kembali masalah itu. Sekali tampak bahwa proses belajar masa depan harus di dalam suasana kebebasan berpikir. Disinilah terletak faktor manusia dalam belajar. Dalam kaitan ini perlu kita jauhkan harapan yang berlebihan terhadap komputer dalam kehidupan manusia, juga dalam proses belajar. Justru dengan masuknya komputer sebagai alat pembantu belajar yang lebih praktis dan cepat, memberi peluang yang lebih banyak bagi subyek-subyek untuk mengadakan pilihan yang tepat dan sangat bervariasi. Inilah yang disebut 'the human touch' pada abad "technotronic" dan masyarakat "ethnotronic" ini.

Belajar adalah merupakan perubahan oleh Hidayanto (2002) disebutnya sebagai definis klasik yang masih dapat dipertahankan, karena paling relevan dengan keberadaan lembaga pendidikan sebagai agen perubahan. Definisi yang inklusive ini mengakomodasi semua tujuan belajar, dari tujuan trendah yakni mengetahui fakta sampai ke tujuan tertinggi yakni kemampuan memecahkan masalah.

Lembaga pendidikan sebagai agen perubahan dan tempat berkembangnya aspek intelektual (hand-on) tidak dapat direduksi hanya untuk salah satu tujuan belajar saja. Sekolah akan kehilangan makna jika menekankan pada salah satunya dengan mengabaikan yang lain. Karena tujuan awal diadakannya sekolah/lembaga pendidikan lain ialah untuk membekali peserta didik dengan berbagai aspek intelektual dan emosional yang fundamental sehingga ia cerda, bermoral dan terampil.

Learning to learn tumbuh dari sinergi antara intelektual dan moral yang berekspresi dari hasil belajar otentik (actual outcomes) dalam bentuk karya dan perilaku. Dimilikinya keterampilan belajar untuk belajar oleh peserta didik. Dengan sendirinya akan dikuasai sejumlah aspek lain, termasuk keterampilan untuk hidup. Keterampilan belajar bukan keterampilan tunggal tetapi

merupakan garis kontinum yang bermula dari titik awal kehidupan dan berakhir pada akhir hidup manusia itu sendiri.

Keterampilan belajar merupakan salah satu potensi dan tugas asasi manusia yang kualitas dan kuantitasnya dipengaruhi faktor eksternal. Pendidikan adalah faktor eksternal dalam bentuk rekayasa sistematis untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keterampilan belajar. Berbagai cara telah dilakukan para pakar untuk menumbuhkan keterampilan belajar, diantaranya model pembelajaran berpikir yang dikembangkan Purwadhi (2000) yang telah teruji dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis yang pada akhirnya dapat menumbuhkan keterampilan belajar (*skill to learn*).

Pembelajaran bagi tumbuhnya keterampilan belajar juga dirasakan sebagai salah satu kebutuhan mendasar bagi negara maju dalam menyongsong era globalisasi. Kurikulum harus lebih menekankan pada kemampuan berpikir kreatif dan kritis serta pemecahan masalah. Kemampuan tersebut bisa tumbuh jika peserta didik menghargai keterkaitan antardisiplin ilmu, menggunakan prosedur pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi serta mau bekerja dalam kelompok kerja.

Dorongan terhadap peserta didik untuk menghargai berbagai disiplin ilmu, tertib prosedur, serta berbagai aspek lain yang diperlukan dalam kehidupan dan interaksi dengan sesamanya menunjukkan bahwa siswa perlu memiliki berbagai keterampilan yang kompleks. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui penguasaan keterampilan belajar.

Dalam konteks pendidikan, belajar merupakan bagian dari keterampilan belajar. Muatan keterampilan belajar, akan muncul keterampilan lain, baik yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam dimensi belajar keterampilan lebih condong dan dominan pada aspek psikomotor.

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang secara teknis-operasional dilakukan

melalui pembelajaran. Program pembelajaran yang baik akan menghasilkan efek berantai pada kemampuan peserta didik/individu untuk belajar secara terus menerus melalui lingkungannya (lingkungan alam dan lingkungan sosial) sebagai sumber belajar yang tak terbatas.

Melalui proses belajar dari lingkungan, individu dapat menemukan kembali jati dirinya, dapat melakukan sesuatu yang baru, merasakan hubungan yang lebih akrab dengan alam dan sesamanya, dan dapat memperluas kapasitas pribadi dalam rangka kehidupan yang lebih luas. Melalui keterampilan belajar akan ditemukan suatu bentuk keterampilan khusus (vocasional skill yang sesuai dengan bakat dan minatnya serta dapat digunakan sebagai basis untuk memperoleh penghasilan layak.

Keterampilan khusus yang dimaksud adalah life skill dalam arti vocational skill yang diperoleh melalui keterampilan belajar. Jadi kedudukan belajar terampil merupakan bagian dari terampil belajar. Individu yang memiliki ketrampilan belajar, maka akan mudah memperoleh berbagai keterampilan lain, termasuk keterampilan untuk bekerja yang merupakan bagian dari kreativitas kehidupan jangka panjang.

Individu yang memiliki ketrampilan belajar lebih optimis karena memiliki banyak pilihan, sedangkan individu yang hanya memiliki keterampilan terbatas sebagai akibat terlalu memfokus pada satu keterampilan yang spesifik potensial menjadi orang yang pesimistik, karena tidak memiliki banyak pilihan dan kemampuan transfer ilmu.

Keterampilan belajar yang pertumbuhannya memerlukan berbagai prasyarat selaras dengan konsep “menjadi manusia pembelajar”. Dalam hal ini manusia hidup untuk belajar (learning how to be), konsep ini sesuai dengan pentingnya “keterampilan belajar” dan “belajar untuk hidup” sesuai dengan arah “belajar untuk terampil”. Hidup untuk belajar berarti memanfaatkan segenap potensi dirinya untuk memperlihatkan eksistensi dirinya terhadap orang lain.

Belajar untuk hidup berarti berupaya mendapatkan pekerjaan, dalam arti bahwa belajar untuk hidup lebih esensial lagi, karena belajar bukan hanya pelatihan tetapi proses untuk menjadi diri sendiri. Seorang yang terampil belajar ia akan menjadi pembelajar bagi dirinya yang berbasis pada kesadaran bahwa *we created by the creator to be creature with creativity* (kita adalah ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta dan dianugerahi daya cipta untuk mencipta).

Bila seseorang telah menjadi manusia pembelajar, ia akan dapat menciptakan organisasi pembelajar, yakni organisasi yang terus menerus memprluas kapasitas menciptakan masa depan. Seorang pembelajar akan lebih memiliki tanggung jawab baik kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada sesama manusia. Seseorang pembelajar akan memperoleh keterampilan belajar dan akhirnya akan lebih manusiawi, karena mereka akan:

1. Menciptakan kembali kepribadiannya
2. Melakukan sesuatu yang baru
3. Merasakan hubungan yang lebih dalam dengan dunia
4. Dapat memperluas kapasitas proses pembentukan kehidupan.

Tujuan akhir dari keterampilan belajar ialah dimilikinya kemampuan memecahkan masalah secara bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus lebih dahulu melalui dua tujuan antara, yaitu:

1. Mampu mengenali hakikat dirinya, potensi dan bakat-bakat terbaiknya
2. Dapat berusaha sekuat tenaga untuk mengaktualisasikan segenap potensinya, mengekspresikan dan menyatakan dirinya sepenuhnya/seutuhnya dengan cara menjadi dirinya sendiri.

Seseorang dapat mengenali hakikat dirinya, potensi dan bakat terbaiknya karena dalam proses belajarnya akan berhadapan dengan berbagai tantangan, kesulitan, dan berbagai kendala, yang kesemuanya merupakan ujian bagi penemuan dirinya sendiri atau suatu proses pemahaman

diri. Melalui proses ini ia dapat mengetahui potensi dirinya secara benar sehingga ia akan konsisten pada satu bidang yang darinya dimunculkan satu maha karya. Proses ini berbasis pada konsep pendidikan transformatif dan merupakan model pendidikan yang kooperatif dan akomodatif terhadap kemampuan peserta didik menuju proses berpikir yang bebas dan kreatif.

Implementasi pendidikan transformatif ialah pada keikutsertaan siswa dalam memahami realitas kehidupan dari yang konkret sampai yang abstrak. Realitas kehidupan ini akan menjadi sumber inspirasi dan kreativitas dalam melakukan analisis dan membangun visi kehidupan.

Untuk mencapai tujuan akhir, maka peserta didik harus mampu mengaktualisasikan segenap potensi diri dan mengekspresikannya secara otentik. Aktualisasi diri ini adalah bagian dari kebutuhan untuk berprestasi dan merupakan salah satu indikator berkembangnya kreativitas masyarakat.

Dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa seharusnya lebih membuka peluang bagi tumbuhnya kebutuhan berprestasi yang termanifestasikan pada keterampilan belajar. Melalui media keterampilan belajar individu akan tumbuh dengan memperoleh hasil belajar yang maksimal berupa perilaku mulia maupun karya bermanfaat bagi lingkungan sosial budaya dan lingkungan alamnya sekitar. Pendidikan siap pakai merupakan frame dari belajar terampil. Konsep tersebut dalam jangka waktu tertentu mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, meskipun konsep tersebut masih menjadi perdebatan sesuai dengan sudut pandang seseorang.

Sejauh mana seseorang memiliki keterampilan yang relevan dengan dunia usaha dan industri yang ada disekitarnya, lebih jauh lagi bagi keterampilan yang dimaksud bukan hanya keterampilan vocational (kejuruan) tetapi juga keterampilan personal berupa aktualisasi diri, keterampilan sosial berupa kemampuan berkomunikasi secara harmonis dengan sesama anggota masyarakat, dan

keterampilan akademik berupa kemampuan menelaah secara detail masalah umum yang dihadapi oleh diri dan lingkungannya, dan dapat memecahkannya secara bertanggung jawab.

Tugas lembaga pendidikan bukan memberi yang diinginkan oleh masyarakat, melainkan memberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, lembaga pendidikan bukan pusat pelayanan masyarakat yang secara pasif melayani tuntutan masyarakat, tetapi lebih sebagai lembaga yang perlu mengkritisi apa yang sedang di masyarakat.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, juga akan keliru jika fungsi SDM hanya ditempatkan sekedar pekerja atau salah satu faktor produksi. Dalam waktu yang bersamaan ia tidak hanya berperan sebagai pekerja atau faktor produksi, tetapi sekaligus sebagai produsen, konsumen, sumber gagasan, serta sumber penggerak untuk pemanfaatan seluruh peluang. Suatu pandangan yang naif jika kekuatan manusia hanya dipandang dari segi penguasaan keterampilan kejuruan semata.

Dalam kaitan ini, lulusan lembaga pendidikan perlu dibekali sikap positif, orientasi nilai, visi dan misi, serta pemilikan cara berpikir yang menganggap penting inovasi, perubahan, dan penyempurnaan cara bertindak secara berkelanjutan. Semakin jelas bahwa terampil belajar merupakan aspek yang lebih substantif dan lebih mendasar, karena diperlukan bagi setiap individu peserta didik untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks, sedangkan belajar terampil diperlukan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan dasar manusia.

## **Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia**

Abad ke-21 adalah era globalisasi dengan ciri-ciri adanya saling keterbukaan dan ketergantungan antarnegara. Akibat saling keterbukaan dan ketergantungan ditambah dengan arus informasi yang sangat cepat maka

kompetisi antar negara pun akan semakin ketat terutama pada bidang ekonomi. Bagi Indonesia, globalisasi ini tidak hanya memiliki dimensi domestik akan tetapi juga dimensi global.

Dari segi dimensi domestik, globalisasi ini memberi peluang positif terutama untuk mengadopsi dan menerapkan inovasi yang datang dari luar untuk meningkatkan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat. Disamping itu dari segi keuntungan domestik, pengaruh globalisasi ini dapat mendidik masyarakat untuk memiliki pola pikir kosmopolitan dan pola tindak kompetitif, suka bekerja keras, mau belajar untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi kerja. Dari segi global, kita hidup di dalam dunia yang terbuka, dunia yang tanpa batas, dan perdagangan bebas serta makin meningkatnya kerjasama regional.

Pokok paradigma baru pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang demokratis
2. Masyarakat demokratis memerlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis
3. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang menjawab tantangan internal dan global
4. Pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis
5. Dalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan berkompetitif dalam rangka kerjasama
6. Pendidikan harus mampu mengembangkan kebhinekaan menuju kepada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu di atas kekayaan kebhinekaan masyarakat, dan
7. Pendidikan harus mampu meng-Indonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi warga negara Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan aktualisasi pendidikan nasional yang baru dengan prinsip-prinsip:

- a. Partisipasi masyarakat didalam mengelola pendidikan (community based - education)
- b. Demokratisasi proses pendidikan
- c. Sumber daya pendidikan yang profesional
- d. Sumber daya penunjang yang memadai

Paradigma baru pendidikan di atas mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak lagi dipikulkan kepada sekolah semata, akan tetapi dikembalikan kepada masyarakat dalam arti sekolah dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab. Dalam paradigma baru ini, masyarakat yang selama ini pasif terhadap pendidikan, tiba-tiba ditantang menjadi penanggung jawab pendidikan.

Tanggung jawab ini tidak hanya sekedar memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah dan membayar uang sekolah, akan tetapi yang lebih penting masyarakat ditantang untuk turut serta menentukan jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk meningkatkan mutu pendidikan dan memikirkan kesejahteraan tenaga pendidik agar dapat memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena banyak kendala yang mempengaruhi, antara lain:

1. Bagi masyarakat hal ini merupakan masalah baru sehingga perlu proses sosialisasi.
2. Bagi masyarakat yang tinggal di ibu kota propinsi, kabupaten/kota, masalahnya lebih sederhana karena tingkat pendidikan dan ekonomi relatif baik, sehingga tidak sulit menyeleksi orang-orang yang akan duduk pada posisi tanggung jawab ini.
3. Bagi masyarakat yang tinggal di ibu kota kecamatan dan desa masalahnya menjadi rumit karena tingkat pendidikan masyarakatnya rendah dengan kondisi kehidupan miskin.

Namun demikian, untuk peningkatan mutu dalam rangka demokratisasi pendidikan maka manajemen

berbasis sekolah merupakan alternatif terbaik karena menyangkut paradigma tanggung jawab yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Upaya peningkatan mutu sumber daya manusia telah dicanangkan melalui Ketetapan MPR (2004) berkenaan dengan pendidikan mengamanatkan sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan
3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.

Inti ketiga butir ketetapan di atas menyimpulkan bahwa:

1. Baik mutu maupun pemerataan pendidikan sama-sama mendapat perhatian
2. Pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan, khususnya para guru dan kesejahteraan guru dilaksanakan dengan meningkatkan anggaran pendidikan yang berarti
3. Program pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan lokal.

Pendidikan berdasarkan sistem broad based education ialah konsep pendidikan yang memacu pada life skill. Tujuan utamanya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat dalam rangka

memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan standar hidup, bagi Pendidikan Formal adalah memberikan bekal keterampilan dasar bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa alasan mendasar yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Tidak semua lulusan SD, SLTP, dan SMU memiliki potensi intelektual untuk belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. SLTP, SMU, atau SMK yang ada masih bersifat umum, dan lulusannya dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akibatnya lulusan SD yang tidak memiliki potensi intelektual untuk belajar di SLTP umum menjadi putus sekolah karena tidak tersedia SLTP keterampilan.
3. Ketidakmampuan orang tua karena masalah kemiskinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi lulusan SD, SLTP, dan SMU tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Fakta mengungkapkan bahwa secara nasional setiap tahun terdapat sekitar 600.000 lulusan SD, dan jumlah yang sama juga terjadi pada SLTP dan SMU. Mayoritas atau sekitar 60 % berasal dari keluarga miskin atau berpenghasilan rendah.
4. Untuk memasuki perguruan tinggi harus lulus UMPTN. Sedangkan yang lulus hanya 10 % sesuai dengan daya tampung yang tersedia
5. Biaya pada pendidikan tinggi swasta relatif lebih besar, hanya dapat dijangkau oleh masyarakat golongan menengah ke atas, sedangkan masyarakat miskin yang jumlahnya mayoritas tidak mungkin menjangkaunya.
6. Banyak orang tua yang sudah memiliki persepsi bahwa untuk menjadi orang yang berhasil tidak harus memiliki gelar dari pendidikan tinggi
7. Bahkan sarjana lulusan perguruan tinggi banyak yang menganggur.

Kenyataan-kenyataan di atas secara langsung menambah jumlah generasi muda yang menganggur. Mereka

tidak memiliki keterampilan untuk bekerja mandiri terutama pada sektor informal. Pilihan terakhir adalah bekerja musiman sebagai buruh kasar dengan upah yang rendah, disamping ada yang bekerja sebagai tenaga kerja keluarga terutama dalam bidang pertanian.

Untuk memecahkan masalah ini, perlu pendidikan keterampilan yang sesuai dengan peluang kesempatan kerja yang dibutuhkan masyarakat dengan mempertimbangkan bakat dan minat, serta kemungkinan mereka dapat bekerja mandiri atau bekerja pada orang lain.

Pendekatan ini sifatnya manusiawi, artinya bahwa terdapat pengakuan bahwa mereka memiliki potensi untuk dapat berkembang. Karena itu, gagasan untuk mendirikan SLTP keterampilan sudah merupakan kebutuhan yang dirasakan bagi anak-anak SD yang tidak mampu melanjutkan pendidikan di SLTP umum. Sedangkan bagi lulusan SLTP perlu diarahkan melanjutkan pendidikan di SMK sehingga SMU betul-betul diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki potensi akademis untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Masalah kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda ini tidak saja disebabkan karena keterbatasan lowongan kerja yang tersedia, tetapi terutama karena umumnya mereka tidak siap pakai karena tidak memiliki kualifikasi keterampilan yang diharapkan. Keadaan ini dapat terjadi, karena sebagian besar dari mereka berasal dari sekolah umum dan bukan kejuruan. Bahkan tamatan dari sekolah kejuruan pun juga bukan jaminan untuk siap kerja. apabila pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan berencana untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat, maka pembangunan itu harus difokuskan pada penyediaan lapangan kerja dan SDM yang berkualitas.

Pada abad ke XX yang lalu persaingan jumlah mahasiswa Indonesia diluar negeri bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga sangat ketinggalan. Misalnya pada Universitas-universitas Inggris, rasio perbandingan mahasiswa tugas belajar dari Indonesia 1 orang, Malaysia 7 orang dan Singapura 14 orang.

Mahasiswa Indonesia umumnya dari latar belakang pegawai negeri dari berbagai departemen, sedangkan dari Malaysia dan Singapura selain pegawai negeri, juga tidak sedikit tamatan SLTA terbaik yang direkrut oleh pemerintah sesuai dengan bidang ilmu yang dibutuhkan untuk pembangunan dan harus kembali kenegeranya setelah menyelesaikan studi. Hal yang sama mungkin terjadi di Amerika Serikat, Australia, Kanada dan negara-negara maju lainnya.

Meskipun demikian, di antara mahasiswa dari Indonesia tersebut juga terdapat tamatan SLTA yang belajar atas biaya sendiri, tetapi tidak ada jaminan bahwa yang bersangkutan akan kembali setelah menyelesaikan pendidikannya, bahkan sebaliknya banyak diantara mereka memilih bekerja diluar negeri dengan berbagai alasan seperti jaminan insentif yang lebih tinggi, pengalaman atau hiburan.

Gambaran tersebut, memberi implikasi terhadap kondisi kehidupan ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti:

1. Dari segi jumlah tenaga ahli, Indonesia ketinggalan dari kedua negara tsb.
2. Orientasi pendidikan pada kedua negara tsb. Mengacu kepada mutu dalam arti global, sehingga kedua negara tersebut tidak perlu mendirikan universitas-universitas negeri dan swasta dengan biaya yang sangat mahal.
3. Sebaliknya Indonesia kaya dengan perguruan tinggi negeri dan swasta tapi kualitas lulusannya masih rendah.
4. Sarjana ekonomi dari National University of Singapore, Universitas Kebangsaan Malaysia, dan University of the Philipines telah banyak mengisi pekerjaan yang bergengsi dinegara-negara industri maju, sedangkan dari perguruan tinggi di Indonesia belum mampu memperoleh kesempatan yang sama. Menyadari ketertinggalan tersebut, maka sudah saatnya

pemerintah dan masyarakat menunjukkan kemauannya untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Pendidikan bukanlah segalanya melainkan satu-satunya alat untuk membangun bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

### **Hakekat Life Skill (Kecakapan Hidup)**

Konsep life skill merupakan salah satu fokus analisis dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup atau bekerja. Dengan demikian life skill dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. Istilah hidup, tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja, namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar ditempat kerja, dan mempergunakan teknologi.

Program pendidikan life skill adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada dimasyarakat. Life skill ini memiliki cakupan yang luas, berinteraksi antara pengetahuan yang diyakini sebagai unsur penting untuk hidup lebih mandiri.

Life skill merupakan kemampuan komunikasi secara efektif, kemampuan mengembangkan kerja sama, melaksanakan peranan sebagai warga negara yang bertanggung jawab, memiliki kesiapan serta kecakapan untuk bekerja, dan memiliki karakter dan etika untuk terjun ke dunia kerja.

Ciri pembelajaran life skills adalah:

1. Terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar
2. Terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama

3. Terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar, usaha mandiri, usaha bersama
4. Terjadi proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasiona, akademik, manajerial, kewirausahaan
5. Terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan dengan benar, menghasilkan produk bermutu
6. Terjadi proses interaksi saling belajar dari ahli
7. Terjadi proses penilaian kompetensi
8. Terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha bersama

Apabila dihubungkan dengan pekerjaan tertentu, life skills dalam lingkup Pendidikan No-Formal ditujukan pada penguasaan vocational skills, yang intinya terletak pada penguasaan specific occupational job. Apabila dipahami dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa life skills dalam konteks kepemilikan specific occupational skills sesungguhnya diperlukan oleh setiap orang. Ini berarti bahwa program life skills dalam pemaknaan program Pendidikan No-Formal diharapkan dapat menolong mereka untuk memiliki harga diri dan kepercayaan diri mencari nafkah dalam konteks peluang yang ada dilingkungannya.

Program pembelajaran baik dalam jalur Pendidikan Formal maupun Pendidikan No-Formal wajib memberikan keterampilan pilihan life skill oleh nara sumber teknis, sehingga dengan memiliki keterampilan tersebut diharapkan para peserta didik dapat memiliki bekal untuk dapat bekerja dan berusaha yang dapat mendukung pencapaian taraf hidup yang lebih baik.

Pada dasarnya life skill membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar (learning how to learn). Menghilangkan kebiasaan dan pola pikir yang tidak tepat (learning how to unlearn). Menyadari dan mensyukuri potensi diri untuk dikembangkan dan diamankan, berani menghadapi problema kehidupan, dan memecahkan secara kreatif.

Beberapa prinsip pelaksanaan life skill education, yaitu:

1. Etika sosio-religius bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan.
2. Pembelajaran menggunakan prinsip learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together and learning to cooperate
3. Pengembangan potensi wilayah dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan pendidikan
4. Penetapan manajemen berbasis masyarakat, kolaborasi semua unsur terkait yang ada dalam masyarakat
5. Paradigma learning for life dan school for work dapat menjadi dasar kegiatan pendidikan, sehingga memiliki pertautan dengan dunia kerja
6. Penyelenggaraan pendidikan harus senantiasa mengarahkan peserta didik agar:
  - a. Membantu mereka untuk menuju hidup sehat dan berkualitas
  - b. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, dan
  - c. Memiliki akses untuk mampu memenuhi standar hidupnya secara layak

Dalam wacana pendidikan nasional muncul beberapa konsep inovatif seperti: school-based management, community-based education, dan broad-based education. Istilah school-based management, merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah sebagai satu entitas sistem. Dalam format ini, kepala sekolah dan guru-guru sebagai kelompok profesional, dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya (stakeholder sekolah), dianggap memiliki kapasitas untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi sekolah dalam upaya mengembangkan program-program sekolah yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi sekolah.

Community-based education adalah suatu gagasan yang menempatkan orientasi penyelenggaraan pendidikan

pada lingkungan kontekstual (ciri, kondisi, dan kebutuhan masyarakat) dimana kelembagaan pendidikan itu berada. Orientasi pengembangan program sekolah hendaknya merefleksikan ciri, sifat, dan kebutuhan masyarakat. Broad-based education adalah pendidikan berbasis luas, yaitu kebijakan penyelenggaraan terbesar. Sifat dasar yang menonjol dari lapisan masyarakat terbesar adalah pendidikan yang menekankan kecakapan hidup dan bekerja.

Jika dicermati ketiga gagasan yang dijelaskan tersebut memiliki titik temu, yaitu bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat pengguna, dengan memperhatikan ciri, sifat, dan kebutuhan masyarakatnya, sementara pengelolaan sekolah mampu mengakomodasi kepentingan tersebut dengan cara melibatkan pihak-pihak yang ebrkepentingan dengan sekolah, yang direfleksikan dalam visi, misi dan program-program strategisnya.

Dalam kondisi seperti itu, selain tetap melayani program-program akademiknya, sekolah harus mampu pula menyediakan paket atau program pembelajaran yang dapat memberikan jaminan kepemilikan life skills yang diorientasikan pada penguasaan spesifik occuvational skills. Program ini diharapkan memberi manfaat plus kepada peserta didik yang karena sebab tertentu tidak dapat mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life skill) melalui pendekatan Broad-based Education (pendidikan yang berbasis luas), yaitu kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi kepentingan lapisan masyarakat terbesar. Sifat dasar yang menonjol dari lapisan masyarakat terbesar adalah pendidikan yang menekankan life skill atau bekerja.

Perkembangan Iptek yang begitu cepat mengakibatkan inovasi pengetahuan begitu melimpah, sehingga orang tidak akan mampu mempelajari semuanya. Karena itu harus dipilih bagian-bagian yang esensial. Dalam era sekarang seseorang selain membutuhkan kecapakan

umum, juga membutuhkan “kemampuan belajar bagaimana cara belajar” learning how to learn dengan harapan dapat digunakan untuk belajar sendiri, jika seseorang ingin mengembangkan diri dikemudian hari. Perkembangan Iptek yang cepat membuat pengetahuan yang saat ini sering kali sudah menjadi usang setelah peserta didik lulus. Dengan modal learning how to learn dan general life skill yang dimiliki mereka dapat mempelajari pengetahuan baru.

Pemahaman itulah yang mendasari konsep pendidikan berbasis luas (Broad Based Education-BBE), bahwa pendidikan mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik sebagai bentuk syukur terhadap anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pendidikan harus mendasarkan pada kebutuhan masyarakat secara luas dengan menekankan pada penguasaan life skill generik sebagai pondasi pengembangan diri lebih lanjut.

Dengan demikian konsep pendidikan berbasis luas berlaku di seluruh jenjang pendidikan. Pendidikan berbasis luas merupakan pendekatan yang memberikan orientasi yang lebih menyeluruh, kuat dan mendasar, sehingga memungkinkan warga masyarakat yang terjadi pada dirinya, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat.

Di New Zealand gagasan seperti itu direfleksikan menjadi motto sebuah college, yaitu young men taking their place in the world, yang menekankan pada pentingnya kemampuan future problem solving, kejelasan vocational pathways dan penyelenggaraan belajar dengan pendekatan integrated curriculum (<http://www.nelcollege.schoolnz>). Pemerintah negara ini menghendaki semua generasi mudanya memiliki esensial skills sebagai berikut:

1. Information skills
2. Numeracy skills
3. Problem solving, and
4. Decision-making skills

Gagasan tersebut sangat beralasan, karena secara umum perkembangan peradaban masyarakat telah menuntut kesanggupan sistem pendidikan memiliki

keterkaitan dengan tuntutan masyarakat luas dan dunia kerja. Dengan demikian paradigma *school to work* harus selalu menjadi landasan semua kegiatan pendidikan.

Sebenarnya yang diperlukan masyarakat sekarang adalah reorientasi pendidikan dari orientasi pencapaian tujuan (*subject mater oriented*) menjadi orientasi kecakapan hidup (*life skill oriented*). Ini berarti bahwa bahan belajar dipahami sebagai alat dan bukan tujuan. Bahan belajar adalah alat untuk mengembangkan *life skill* yang akan digunakan peserta didik menghadapi kehidupan nyata.

*Life skill* yang dipilih hendaknya diyakini dapat menjadikannya mampu mendapatkan penghasilan yang layak, untuk itu perlu dilakukan *need assesment* guna menentukannya. Kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.

Suatu model hubungan antara *life skills*, *employability skills*, *vocational skills*, dan *specific occupational skills*. Konsep *life skills* telah diuraikan diatas. Istilah *employability skills*, mengacu pada serangkaian keterampilan yang mendukung seseorang untuk menunaikan pekerjaannya supaya berhasil.

Jika *employability skills* dihubungkan dengan pekerjaan tertentu, maka dapat mengarah pada *vocational skills*, yang intinya terletak pada penguasaan *specific occupational job*, yaitu keterampilan khusus untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Ini menunjukkan bahwa pengembangan *life skills* dalam konteks pendidikan formal (sekolah) selayaknya difokuskan pada penguasaan *specific occuvational skills* (pekerjaan tertentu/*specific*). Program tersebut merupakan elaborasi yang dengan sendirinya dijiwai oleh pemaknaan *life skills*, *employability skills*, dan *vocational skills*.

Jika dicermati dengan seksama, maka dapat dikatakan bahwa life skills dalam konteks kepemilikan spesifik occupational skills sesungguhnya diperlukan oleh setiap orang. Artinya pengembangan program life skills dalam dimensi tersebut sejatinya menyatu dengan program pendidikan di sekolah bahwa semua peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu seharusnya telah memiliki life skills.

Dalam pendidikan formal di Indonesia, masalah tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan kelompok lulusan SLTP dan SMU yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pengembangan program life skills pada jenjang tersebut diharapkan dapat membantu mereka untuk meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri dalam mencari nafkah dalam konteks peluang yang ada di lingkungan sosialnya.

Dalam konteks Pendidikan No-Formal, khususnya bagi anak yang berada pada kelompok usia pendidikan Dasar dan Menengah yang tidak dapat mengikuti Pendidikan Formal karena berbagai alasan, seperti: letak pemukiman yang jauh dari sekolah, tingkat pendapatan keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dan karena bencana alam/kerusakan. Bagi mereka pendidikan alternatif pada jalur Pendidikan No-Formal sepatutnya lebih banyak memiliki muatan life skills khususnya spesifik occupational skills sesuai dengan kondisi lingkungan alam dan lingkungan sosial budayanya.

## **Penutup**

Pendidikan adalah interaksi antara pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan pendidikan. Interaksi pendidikan berfungsi untuk membantu pengembangan seluruh potensi, kecakapan, dan karakteristik peserta didik (intelektual, sosial perilaku, sikap maupun fisik metodik).

Lingkungan pendidikan terbagi atas 5 yaitu: (1) Keluarga, (2) Sekolah, (3) Masyarakat, (4) lembaga Agama, dan (5) media massa.

Lingkungan strategis mencakup lingkungan nasional dan lingkungan global. Lingkungan nasional ditandai dengan 2 fenomena yang sangat substansial yaitu: (a) Masih berlangsungnya krisis multidimensi, (b) Kuatnya tuntutan untuk dilakukannya reformasi total dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan kehidupan beragama.

Pendidikan berfungsi mengembangkan dan memupuk tanggung jawab dalam setiap warga neagara dan juga pendidikan berfungsi sebagai penggerak proses modernisasi dalam pembangunan nasional.

Pendidikan berlangsung dalam 3 bentuk antara lain:

1. Pengajaran yang berfokus pada pengembangan intelektual
2. Latihan yang berfokus pada keterampilan
3. Bimbingan yang berfokus pada afektif

Konsekuensi dari lingkungan nasional adalah bahwa pendidikan dituntut untuk mampu membantu bangsa ini keluar dari krisis. Sementara itu, globalisasi semakin nyata, dan gejala ini tidak lepas dari erbagai faktor, diantaranya pesatnya penerapan teknologi informasi, tumbuhnya berbagai masalah kependudukan dan lingkungan, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memecahkan masalah nasional dan menonjolnya perkembangan organisasi non pemerintah.

Pesatnya perkembangan global mengharuskan pendidikan menerapkan berbagai prinsip yang sangat mendasar yaitu :

1. Mutu dengan standar supaya bangsa Indonesia dapat bersaing secara global
2. Penggunaan berbagai cara belajar dengan mendayagunakan beragam sumber belajar.

Sejalan dengan pendidikan moral, pendidikan nasional diarahkan pada pemupukan nilai-nilai sosial yang menunjang pembangunan nasional sperti rasa

kesetiakawanan, tanggung jawab sosial, dan hidup berdisiplin. Erat kaitannya dengan pendidikan moral ialah pendidikan agama. Pendidikan ini sifatnya menyeluruh dan berkesinambungan.

Kebijakan dalam bidang pendidikan menghadapi era globalisasi antara lain:

1. Pendidikan yang seimbang antara kebutuhan lahiriah dan kebutuhan rohaniah.
2. Pendidikan berfungsi sebagai penunjang peningkatan taraf hidup
3. Pendidikan lingkungan hidup, termasuk pendidikan kependudukan
4. Pendidikan berfungsi menjaga dan meningkatkan stabilitas nasional.

## **BAB VII**

# **MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH**

### **Pendahuluan**

Lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah membawa implikasi penting pada sejumlah sektor atau bidang kehidupan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, kedua undang-undang tersebut telah membawa implikasi yang sangat besar pada perubahan manajemen pendidikan. Jika sebelumnya pengelolaan pendidikan lebih bersifat sentralistis dengan pemerintah pusat sebagai penentu utama segala kebijakan, maka dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut kewenangan untuk pengelolaan pendidikan didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten/kotamadya dan juga masing-masing sekolah-sekolah.

Bank Dunia dalam *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*<sup>1</sup> merekomendasikan perlunya diberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah yang disertai dengan manajemen sekolah yang bertanggung jawab. Dalam otonomi yang lebih besar ini, hendaknya para kepala sekolah diberikan wewenang yang lebih luas dalam pemanfaatan sumber daya dan pengembangan strategi-strategi yang berbasis sekolah sesuai dengan kondisi setempat.

Menyusul rekomendasi Bank Dunia tersebut, Departemen Pendidikan Nasional mempromosikan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (*School-based Management*)

---

<sup>1</sup> World Bank, *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*, (Jakarta: Depdikbud, 1998), p.6

untuk diterapkan di sekolah-sekolah.<sup>2</sup> Salah satu implikasi penting dari penerapan manajemen berbasis sekolah adalah perubahan peran kepala sekolah. perubahan manajemen pendidikan yang sebelumnya bersifat sentralistik kepada manajemen berbasis sekolah merupakan suatu perubahan paradigma dalam manajemen pendidikan dan karena itu harus diikuti dengan perubahan mentalitas dari para pelaksana atau ujung tombaknya. Di sini, redefinisi peran kepala sekolah menjadi hal yang sangat urgen.

### **Tujuan Kajian**

1. Mengetahui masalah pokok pencapaian pendidikan
2. Mengetahui manajemen sekolah.
3. Dapat menjelaskan salah satu karakteristik manajemen berbasis sekolah dalam hal strategi-strategi manajemen.
4. Mengidentifikasi pendidikan berbasis masyarakat.
5. Mengetahui peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat.

### **Manajemen Berbasis Sekolah**

Akhir-akhir ini, di Indonesia, Bank Dunia menganalisis kembali berbagai hasil studi dan dokumen tentang pendidikan untuk kemudian dijadikan acuan dalam memberikan rekomendasi pendidikan di masa depan terutama pada pasca krisis. Hasil analisis dimaksud adalah sebuah laporan yang diberi judul *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery* (September 1998). Laporan ini ditujukan untuk menjadi salah satu landasan dalam menentukan agenda ke depan dalam upaya memecahkan berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama pada tingkat pendidikan dasar, meskipun juga disinggung pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Pada umumnya,

---

<sup>2</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), p. 5.

analisis difokuskan pada hambatan-hambatan yang dialami dan strategi-strategi pemecahannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

## 1. Penataan Kelembagaan dan Desentralisasi Pendidikan Dasar

Ada empat unsur yang diidentifikasi oleh Bank Dunia yang menjadi penghambat potensial terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya pada tingkat pendidikan dasar, yaitu sistem organisasi yang kompleks di tingkat pendidikan dasar, manajemen yang terlalu sentralistik pada tingkat SLTP, terpecah-belah dan kakunya proses pembiayaan pada kedua jenjang tersebut, dan manajemen yang tidak efektif pada jenjang sekolah.

Terdapat empat masalah pokok yang secara potensial menghambat pencapaian pendidikan dasar yang bermutu.

*Pertama*, kompleksnya pengorganisasian pendidikan dasar, di mana dua departemen berperan sama kuat, yaitu Depdiknas (bertanggung jawab pada materi pendidikan dan mutu teknis seperti kurikulum, kualifikasi dan sertifikasi guru, testing, evaluasi buku teks, dan kelayakan bahan-bahan ajar); dan Depdagri (bertanggung jawab atas ketenagaan, material, dan sumber daya lainnya yang biasa disebut "3M" sekolah). Di samping itu, untuk sekolah-sekolah keagamaan, Departemen Agama bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap sekolah negeri maupun swasta. Dualisme pengelolaan ini berakibat fatal karena membuat rancunya pembagian tanggung jawab dan peranan manajerial.

perencanaan dan pembiayaan, serta perebutan kewenangan atas guru antara kedua lembaga tersebut. Praktik pengelolaan yang memisahkan fungsi teknik-edukatif dan fungsi administratif dan sumber daya seperti ini tidak efisien, minimal pada empat elemen berikut.

- Pengeluaran untuk peningkatan mutu pendidikan menjadi terabaikan karena berada di luar lingkup

kedua departemen untuk mencairkan sumber dananya.

- Peningkatan mutu menjadi terhambat karena perlengkapan yang disediakan oleh kantor dinas sering tidak sesuai dengan kebutuhan atau permintaan sekolah. Di samping itu, subsidi pemerintah dalam bentuk BOP sering mengalami realokasi di tingkat dinas terutama untuk menutupi pengeluaran dinas sehingga subsidi dana yang semestinya Rp700.000 diterima oleh sekolah pada umumnya tinggal berkisar antara Rp200.000-Rp250.000 per tahun.
- Karier guru sering tidak menentu karena promosi dari guru SD untuk menjadi guru SLTP harus melibatkan dua departemen. Selain promosi dan pemindahan guru atau kepala SD sering diputuskan secara sepihak oleh dinas tanpa mengacu pada penilaian yang dibuat oleh Depdiknas.
- Dualisme pengadministrasian tersebut pada akhirnya tidak memberikan iklim yang kondusif untuk dilakukannya koordinasi kebijakan, perencanaan, dan implementasi dalam rangka mencapai tujuan wajib belajar pendidikan dasar.

*Kedua*, praktik manajemen yang terlalu sentralistik pada tingkat SLTP. Meskipun tanggung jawab pengelolaan SLTP sepenuhnya berada pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, praktik yang sangat sentralistik atau program pembiayaan dan perencanaan investasi dirasakan menghambat pencapaian tujuan wajib belajar pendidikan dasar. Dengan pengelolaan seperti ini, perluasan kesempatan dan cara kerja yang efisien pada SLTP akan sulit terwujud. Program-program wajib belajar SLTP mengalami hambatan seperti tuntutan wajib belajar untuk keluarga kurang mampu, ketidakefisienan dana pemerintah untuk menjangkau keluarga kurang mampu, dan struktur subsidi untuk pemerintah untuk sekolah swasta yang tidak efektif. Hambatan-hambatan tersebut tidak dapat

dipecahkan secara efektif dari tingkat atas seperti yang terjadi sekarang.

*Ketiga*, praktik penganggaran yang terpecah-belah dan kaku. Di samping sistem organisasinya yang kompleks, komponen ini menambah rumitnya pengelolaan pendidikan dasar. Anggaran pembangunan atau biasa yang disebut DIP disiapkan oleh tiga unit, yaitu Bappenas, Depdiknas, dan Depdagri. Sedangkan anggaran rutin yang biasa disebut DIK disiapkan oleh Depkeu, Depdiknas, dan Depdagri. Depag juga memiliki anggaran pendidikan sendiri. Dalam praktiknya, masing-masing anggaran mempunyai aturannya sendiri sehingga yang terjadi, antara lain perencanaan, kaji-ulang, dan persetujuan anggaran memakan waktu satu tahun, dan tidak ada fleksibilitas dalam pengalihan dana dari satu kategori ke kategori lain. Sisa anggaran yang satu tidak bisa digunakan untuk kepentingan kegiatan yang lain. Informasi anggaran pun tersebar pada lima departemen/instansi (Depkeu, Bappenas, Depdiknas, Depdagri, dan Depag). Di samping itu untuk anggaran SD, sedikitnya terdapat empat tingkat pengadministrasian, yaitu pusat (Depdiknas dan Depdagri), propinsi (Kanwil dan Dinas I), kabupaten (Kandep dan Diknas II), dan kadang-kadang kecamatan (Kancam dan Dinas Kecamatan). Praktik seperti ini memiliki dampak negatif, antara lain tidak ada tanggung jawab yang jelas antar unit, tidak ada evaluasi secara reguler terhadap kebutuhan riil yang diperlukan, dan tidak ada jaminan bahwa dana dialokasikan dengan benar-benar berasaskan pemerataan.

*Keempat*, manajemen pada tingkat sekolah yang tidak efektif. Sekolah adalah institusi yang memegang peranan kunci dalam menentukan mutu pendidikan dasar dan kepala sekolah merupakan pelaku utama dalam memainkan peranan tersebut. Peningkatan mutu sekolah memerlukan kepala sekolah yang mampu: (1) menjabarkan sumber daya yang ada untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi guru, bahan pengajaran yang cukup, dan pemeliharaan fasilitas yang baik; (2) memberikan waktu

yang cukup untuk pengelolaan dan pengkoordinasian proses instruksional; dan (3) berkomunikasi secara teratur dengan staf, orang tua, siswa, dan masyarakat terkait. Di Indonesia kepala sekolah negeri memiliki otonomi yang sangat terbatas dalam mengelola sumber daya dan manajemen sekolah. Dalam aspek yang lain, kepala sekolah tidak dilengkapi dengan kemampuan kepemimpinan dan manajerial yang baik, karena selain hanya dibekali beberapa hari pelatihan, rekrutmen mereka lebih didasarkan atas urutan jenjang kepangkatan. Tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan bahwa kepala sekolah yang lemah akan gagal dalam mencari dukungan masyarakat, padahal hal ini sangat penting dalam desentralisasi.

Desentralisasi pendidikan mutlak dilakukan mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang karakteristik daerah, masyarakat dan budaya yang berbeda. Pemberlakuan sentralisasi pendidikan di waktu lalu tentu telah banyak merugikan kemajuan pendidikan. Posisi pengelola pendidikan di daerah terkesan tidak bisa berbuat banyak sebab segalanya telah terpola dari pusat. Hal ini menjadikan pendidikan di daerah kurang beranjak pada peningkatan kualitas. Meskipun dalam kenyataannya desentralisasi bukan satu-satunya jawaban atas pobleem pendidikan, pengalaman menunjukkan bahwa langkah itu perlu diambil oleh suatu pemerintahan yang ingin meningkatkan kondisi belajar-mengajar.

Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara, pemerintah pusat memegang kendali dalam tiga aspek kebijakan, yaitu memelihara kesatuan bangsa (sebagai contoh: melalui desain kurikulum); menggerakkan asas persamaan dan pemerataan dalam pendidikan antardaerah, kelompok status sosial-ekonomi, dan antara laki-laki dan perempuan; dan menetapkan standardisasi pendidikan, evaluasi, dan tes. Di luar ketiga aspek ini, pada dasarnya, sebagian besar fungsi-fungsi yang lain dapat didesentralisasikan pada tingkat yang lebih rendah, termasuk rekrutmen, penggajian, penetapan guru, penetapan lokasi sekolah, dan pemeliharaan infrastruktur.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan yang muncul dalam penerapan desentralisasi pendidikan dan menuju pada manajemen pendidikan berbasis sekolah, maka beberapa hal yang dilakukan:

*Pertama*, pambardayaan lokal. Langkah ke arah desentralisasi pendidikan sebetulnya telah dirintis oleh pemerintah sejak 1996, meskipun pelaksanaannya masih sebatas uji coba dan lebih tepat disebut sebagai dekonsentrasi dari pada desentralisasi. Pada periode ini, pemerintah pusat telah mengalihkan proses persiapan dan implementasi beberapa program SLTP ke tingkat kantor wilayah. Pada tahun berikutnya (1997), kebijakan baru diterapkan, yaitu memberikan tanggung jawab kepada Kepala Daerah Tingkat II (Bupati) untuk menyukseskan program wajib belajar.

*Kedua*, menetapkan kembali tanggung jawab atas perencanaan jangka panjang, Dati II sebagai titik berat pengelolaan merupakan rencana jangka panjang desentralisasi. Rencana jangka panjang ini memiliki tiga ciri, yaitu penetapan tanggung jawab pengelolaan tingkat SLTP sama dengan tingkat SD sehingga struktur institusi pendidikan dasar menjadi sederhana dan selaras.

*Ketiga*, pembangunan kemampuan kelembagaan. Perubahan-perubahan yang mendasar ini tidak dapat diselesaikan dalam semalam karena memerlukan konsensus antara berbagai pelaku dan pengembangan kapasitas lokal. Jumlah personel yang bermutu dan kompeten untuk menjalankan fungsi baru tersebut, saat ini, belum cukup tersedia di Dati II. Untuk sementara, staf pusat yang dianggap mampu dapat diperbantukan untuk fungsi tersebut. Meskipun penempatan tenaga yang diperbantukan ini dimungkinkan, staf biasanya enggan karena tidak ada kepastian akan insentif dan jenjang karier. Alternatif lainnya, Kanwil dan Kandep dapat membantu merekrut staf yang bermutu untuk berpartisipasi dalam program perbantuan tenaga, sementara pemerintah lokal melakukan usaha jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan staf mereka sendiri. Pada tingkat pusat,

peningkatan kemampuan staf dalam menetapkan standar dan menyediakan bantuan teknis untuk tingkat yang lebih rendah sangat diperlukan, khususnya tenaga untuk melakukan pengendalian mutu, memantau, dan mengevaluasi program-program yang diimplementasikan di tingkat lokal.

*Keempat*, memberikan otonomi yang lebih besar dengan manajemen sekolah yang bertanggung jawab. Otonomi yang lebih besar harus diberikan kepada kepala sekolah dalam pemanfaatan sumber daya dan pengembangan strategi-strategi berbasis sekolah sesuai dengan kondisi setempat. Namun demikian, otonomi yang lebih besar ini harus diikuti dengan pemilihan kepala sekolah yang memiliki keterampilan dan karakteristik yang diperlukan untuk sekolah yang bernuansa otonom, pemberian penghargaan kepada kepala sekolah yang baik dan mengganti mereka yang kurang baik, dan pengembangan keterampilan manajemen kepala sekolah. Sebagaimana evaluasi Proyek Peningkatan Mutu SD (*Primary Education Quality Improvement Project*, PEQIP) mencatat bahwa program-program seperti ini membantu kepala sekolah untuk memahami aspek-aspek di luar peranan administrasi mereka yang kemudian dapat meningkatkan mutu kepemimpinan pendidikan.

*Kelima*, sistem pendanaan yang menjadi pemerataan dan efisiensi. Kiranya sulit untuk mencapai tujuan yang berganda ini dengan mengandalkan satu mekanisme pendanaan saja. Mengkombinasikan tiga mekanisme pendanaan yang berbeda memungkinkan pemerintah untuk bergerak semakin mendekati tujuan. Tiga strategi dalam menyalurkan dana ke Dati II adalah: (1) *matching grants* berdasarkan sumbangan orang tua siswa melalui BP3, (2) *performance-based grant*, dan (3) *unrestricted grants* ke kabupaten berdasarkan jumlah siswa.

## **Model Manajemen Berbasis Sekolah**

MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang pendidikan. Sebagai wujud dari reformasi pendidikan, MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah. Model ini dimaksudkan untuk menjamin semakin rendahnya kontrol pemerintah pusat, dan di pihak lain semakin meningkatnya otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi.

Di samping itu, model pengelolaan sekolah ini juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru, dan administrator yang profesional. Dengan demikian, sekolah akan bersifat responsif terhadap kebutuhan masing-masing siswa dan masyarakat sekolah. Prestasi belajar siswa dapat dioptimalkan melalui partisipasi langsung dari orang tua dan masyarakat sekolah. MBS menuntut komitmen semua unsur terkait (personal sekolah, orang tua, dan masyarakat yang lebih luas) dalam mengambil keputusan-keputusan tentang pendidikan di sekolahnya. Dengan demikian, kalangan profesional, orang tua, dan masyarakat dapat saling melengkapi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah.

Dalam MBS, delegasi tanggung jawab dan wewenang akan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Alasannya adalah MBS menawarkan kebebasan yang besar kepada sekolah, namun hal itu tetap disertai seperangkat tanggung jawab yang harus dipikul oleh sekolah. Tanggung jawab tersebut adalah terjaminnya partisipasi masyarakat, pemerataan, efektivitas, serta manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah. Oleh karena itu, tidak dapat dihindarkan perlunya ada perangkat peraturan yang memberikan peran tertentu kepada

pemerintah pusat dan Daerah dalam pelaksanaan model ini.

Beberapa lingkup kebijakan yang ditawarkan dalam penerapan MBS meliputi: (a) kurikulum yang bersifat inklusif, (b) proses belajar-mengajar yang efektif, (c) lingkungan sekolah yang mendukung, (d) sumber daya yang berbasas pemerataan, dan (e) standardisasi dalam hal-hal tertentu, monitoring, evaluasi, dan tes. Kelima strategi tersebut harus menyatu ke dalam empat lingkup fungsi pengelolaan sekolah, yaitu: (1) manajemen/organisasi/kepemimpinan, (2) proses belajar-mengajar, (3) sumber daya manusia, dan (4) administrasi sekolah.

Strategi yang ditempuh dalam pelaksanaan MBS meliputi: (1) Pengalokasian dana langsung ke sekolah merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan otonomi sekolah. Selama ini sekolah memperoleh dana yang pengalokasiannya melalui birokrasi yang kompleks dan mengikat, (2) Pelaksanaan MBS memerlukan tenaga yang memiliki keterampilan yang memadai, minimal mampu mengelola dan mengerti tentang prinsip-prinsip MBS. Selama ini tenaga yang ada baik di tingkat sekolah maupun di tingkat pengawas kurang memiliki keterampilan dalam profesi mereka. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan agar dana yang dialokasikan secara langsung tersebut mampu dikelola sesuai dengan prinsip MBS sehingga hasilnya akuntabel.

## **Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community-Based Education)**

Dewasa ini pendidikan berbasis masyarakat banyak dibicarakan di Indonesia. Akan tetapi, apabila para ahli pendidikan dan para praktisi pendidikan berbasis masyarakat bertemu untuk mendiskusikan topik ini, tidak dicapai kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan ini, bahkan sering berujung pada kebingungan dan ketidakjelasan. Padahal, kejelasan konseptual itu

sangat membantu terjadinya diskusi yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, dikemukakan komentar tentang konteks sosial-politik yang memungkinkan pendidikan ini diterapkan di Indonesia serta beberapa persoalan kebijakan relevan.

Pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia menunjuk pada pengertian yang beragam, di antaranya: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan, (2) Pengambilan keputusan yang berbasis sekolah, (3) Pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta atau yayasan, (4) Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pusat pelatihan milik swasta, (5) Pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah, (6) Pusat kegiatan belajar masyarakat, (7) Pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput seperti LSM dan pesantren.

Dalam semua bentuk pendidikan berbasis masyarakat tersebut, terkandung definisi implisit tentang “masyarakat”. Banyak orang menggunakan istilah ini untuk membedakannya dengan pendidikan yang “berbasis pemerintah” (*state-based education*). Meskipun banyak pengertian tentang masyarakat, lazimnya istilah ini menunjuk pada kumpulan orang-orang yang hidup dalam hubungan yang akrab satu sama lain, yang dibedakan dari kelompok kepentingan khusus atau kelompok keagamaan.

Pengertian tentang “berbasis” (*based*) dapat menunjuk pada derajat kepemilikan masyarakat, maka hal itu sepenuhnya menjadi milik masyarakat. Kepemilikan mengimplikasikan adanya pengendalian secara penuh terhadap pengambilan keputusan. Kepemilikan penuh berarti bahwa masyarakat memutuskan tujuan dan sasaran, pembiayaan (tingkatan dan sumber), kurikulum, materi belajar (misalnya buku teks), standar dan ujian, guru dan kualifikasinya, persyaratan siswa/peserta, tempat, atau pokoknya segala.

“Pendidikan” mengacu kepada pendekatan-pendekatan sistematis dalam belajar dan mengajar, termasuk pelatihan. Salah satu cara untuk memetakan pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan cara

memplot berbagai bentuk pendidikan berbasis masyarakat ke dalam dua dimensi, yaitu pada satu dimensi adalah pemerintah *versus* swasta, dan pada dimensi lainnya adalah derajat kepemilikan masyarakat.

Meningkatnya minat terhadap pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia adalah sejalan dengan cepatnya perubahan sosial dan liberalisasi. Konteks ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan parameter pendidikan berbasis masyarakat. Beberapa faktor kontekstual yang ikut memicu perluasan pendidikan berbasis masyarakat: (1) keterbatasan sekolah reguler/konvensional; (2) penegasan keragaman budaya; (3) penguatan masyarakat madani (*civil society*); (4) kendala-kendala yang dihadapi oleh anggaran belanja pemerintah; (5) desentralisasi layanan publik/pemerintahan.

Sejalan dengan meningkatkan minat terhadap pendidikan berbasis masyarakat, pemerintah akan terus-menerus dituntut untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dalam bidang ini. Rentangan pilihan kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah amatlah luas, antara lain berikut ini.

*Pertama*, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam iklim yang *laissez faire*. Pemerintah membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk melibatkan diri dalam berbagai bentuk pendidikan tanpa ada campur tangan atau kontrol dari pemerintah.

*Kedua*, melakukan pengaturan tentang keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat nasional (melalui instrumen Peraturan Pemerintah) atau tingkat lokal (melalui Peraturan Daerah) yang menyangkut batasan, rambu-rambu, standar, dan lain-lain.

*Ketiga*, memberikan subsidi dan dukungan. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan/hibah (*grants*)

atau bentuk dukungan lainnya untuk memotivasi/mendorong keterlibatan dan kepemilikan masyarakat; pemberian penghargaan atau bantuan dana atau sarana kepada kelompok masyarakat yang telah berhasil menciptakan model program yang baik; dan berbagai bentuk model pendanaan bersama.

*Keempat*, reformasi aturan. Melalui kebijakan ini, berbagai aturan yang (selama ini terbukti) menghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis diubah dan diperbaiki agar lebih sesuai dengan tantangan dan kebutuhan baru yang berkembang cepat.

### **Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Dari hasil pengkajian lapangan diketahui bahwa pendidikan luar sekolah harus bertumpu pada masyarakat, bukan pada pemerintah. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu program pendidikan luar sekolah dikembangkan, perlu dipahami dengan benar apa dan bagaimana masyarakat itu sehingga dapat diungkap kebutuhan nyata dan kekuatan yang ada di masyarakat. Program yang disusun kemudian dibahas dengan masyarakat dan menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Dominasi pemerintah harus dikurangi, kalau tidak bisa dihilangkan.

Ada lima aspek yang menjadi acuan pendidikan luar sekolah dalam mengembangkan dan melaksanakan konsep pendidikan berbasis masyarakat.

*Pertama*, teknologi yang dipelajari hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di masyarakat. Teknologi canggih yang diperkenalkan dan adakalanya dipaksakan sering berubah menjadi pengarbitan masyarakat yang akibatnya tidak digunakan sebab kehadiran teknologi itu bukan karena dibutuhkan, melainkan karena dipaksakan. Hal ini yang membuat masyarakat menjadi rapuh.

*Kedua* adalah kelembagaan, artinya harus ada wadah yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dikembangkan oleh masyarakat. Di sini digugah dan

ditumbuhkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan lembaga pendidikan luar sekolah.

*Ketiga* adalah sosial, artinya program belajar harus bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar. Oleh karena itu, program harus digali berdasarkan potensi lingkungan dan berorientasi pasar, bukan berorientasi akademik semata.

*Keempat* adalah kepemilikan program belajar, artinya kelembagaan harus menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. Selama ini terbukti bahwa rasa memiliki oleh instansi pemerintah tidak mampu membangkitkan partisipasi masyarakat, yang ada hanyalah pemaksaan program, dalam arti semuanya dirancang oleh instansi yang bersangkutan. Sementara itu, adakalanya petugas pelaksana tidak mengerti mengapa harus demikian. Di pihak lain, kepemilikan yang berada di tangan masyarakat membuat keterpaduan antarinstansi menjadi semakin nyata dan kekakuan yang ada selama ini akibat apa yang disebut dengan “egoisme sektoral” bisa cair dan terjadi saling mendukung antara pihak-pihak yang terlibat.

*Kelima* adalah organisasi, artinya aparat pendidikan luar sekolah tidak menangani sendiri programnya, melainkan bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Organisasi inilah yang menjadi pelaksana dan mitra masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka dan berhubungan dengan sumber-sumber pendukung program.

Dari lima aspek di atas maka konsep yang dianut oleh pendidikan luar sekolah tentang pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dirancang, diatur dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan dan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya dirancang oleh masyarakat untuk membelajarkan masyarakat sehingga mereka

berdaya, dalam arti mereka memiliki kekuatan untuk membangun dirinya sendiri yang sudah barang tentu melalui interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, konsep pendidikan berbasis masyarakat menjadi “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”.

Sementara itu, Watson (1991) mengemukakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki tiga elemen.

*Pertama*, mementingkan harga belajar. Di sini ada beberapa penekanan seperti pentingnya mendengar suara warga belajar, menggunakan apa yang dikatakan warga belajar sebagai dasar untuk mengembangkan program belajar, percaya bahwa setiap orang mempunyai kemampuan belajar karena setiap warga belajar memiliki kekuatan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, serta kesetaraan di antara warga dan pembina program. Kemudian, mendorong warga belajar untuk ikut aktif terlibat dalam kegiatan belajar dan kegiatan kemasyarakatan, dan memperhatikan kebutuhan belajar masyarakat karena sebenarnya mereka tahu apa yang mereka butuhkan.

*Kedua*, program dimulai dari perspektif. Ada tiga perspektif dalam melihat masyarakat, yaitu konservatif, liberal, dan kritis.

*Ketiga*, pembangunan masyarakat yang menekankan bahwa program belajar harus berlokasi di masyarakat, menjawab kebutuhan belajar masyarakat, menciptakan rasa memiliki, dan program itu dirancang, diputuskan, serta diatur oleh masyarakat sehingga mereka membentuk kesatuan yang lebih besar.

Selain dua pendapat di atas, Brookfield (1987) membandingkan antara pendidikan berbasis masyarakat dengan pendidikan berbasis sekolah antara lain ditunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, masalah yang diangkatnya relevan dengan kebutuhan masyarakat, urutan pembelajaran tergantung pada warga belajar, waktu belajarnya fleksibel, menggunakan konsep penggunaan fungsional.

Beberapa peran yang harus dimainkan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah yang bertumpu pada masyarakat antara lain:

- 1) Peran sebagai pelayan masyarakat.
- 2) Peran sebagai fasilitator.
- 3) Peran sebagai pendamping.
- 4) Peran sebagai mitra.
- 5) Peran sebagai penyandang dana.

### **Penutup**

1. Manajemen berbasis sekolah adalah alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang pendidikan. Keberhasilan penerapan MBS sangat tergantung pada kemampuan pelaksana dan perumus kebijakan dalam mengurangi sisi lemah MBS dan di pihak lain memaksimalkan manfaatnya bagi sekolah.
2. Pendidikan berbasis masyarakat sudah ada dan tumbuh di Indonesia dalam berbagai bentuk, hanya belum dirumuskan secara konseptual. Untuk memperkuat pendidikan berbasis masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang gemar belajar, cerdas, terampil, mandiri, dan berdaya saing, peran pemerintah sebagai penentu perlu bergeser sebagai pelayan, pendamping, pendorong, dan penggugah masyarakat sehingga menimbulkan keinginan belajar, kesediaan untuk mengambil bagian dalam setiap kegiatan, kesediaan untuk mengambil tanggung jawab serta menumbuhkan kreativitas masyarakat.
3. Pendidikan berbasis masyarakat harus bertumpu pada masyarakat, tidak boleh bertumpu pada pemerintah. Pendidikan berbasis masyarakat harus didukung oleh kemitrasejajaran dengan tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah. Penganekaragaman program pembelajaran merupakan pilihan yang sesuai dengan keanekaragaman kebutuhan masyarakat karena itu perlu dikembangkan.

4. Pola penganggaran yang selama ini ditempuh dapat mematikan kreativitas masyarakat, dan tidak mungkin dapat mendukung konsep pendidikan berbasis masyarakat. PKBM sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang ditumbuhkan oleh masyarakat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dan yang sudah berkembang dan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengusaha, dan dirasakan makna kehadirannya oleh masyarakat, perlu terus ditata, dibina, didukung dan dikembangkan sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beckner, Weldon and Wayne Dumas, ed. (1970). *American Education : Foundations and Superstructure*, International Textbook Company. Scranton, Pennsylvania.
- Conklin, John E. 1984. *Sociology : An Introduction*, New York : McMillan Publishing Cp, Inc.
- Coombs, Philip H. (1968). *The World Educational Crisis : A System analysis*, The Oxford University Press. London and New York.
- Faure, Edgar et al. (1972). *Learning to Be : The World of Education Today and Tomorrow*. Unesco, Paris.
- Jalal, Fasli, Dr.2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa
- Ki Hadjar Dewantara. (1977). *Karya Ki Hadjar Dewantara bagian Pertama : Pendidikan, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa*. Yogyakarta.
- Kneller, George F. 1976. *Foundation of Education*, New York : John Wiley and Sons, Inc.
- M.M, Nurkolis, Drs. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta : PT Grasindo
- Reitman, sandford W. (1977). *Foundation of Education for Prospective Teachers*, Allyn and Bacon Ins. Boston.
- Said, Muh, H, Dr, Prof.1985. *Ilmu Pendidikan*. Bandung : Alumni
- Soedjatmoko. 1986. *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan : Pilihan karangan*, Jakarta : BP3ES.
- Uno Hamzah, (2007) *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*, Penerbit: Bumi Aksara Jakarta.
- Uno Hamzah, (2008) *Profesi Kependidikan*, Penerbit : Bumi Aksara Jakarta
- Yoesoef, Daoed. 1986. *Pancasila, Kebudayaan dan Ilmu Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*, Yogyakarta : UGM & SKH.

